

ISSN: 1829-8109

# JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN

*Forestry Socio Economic Journal*

Volume 3 Nomor 3, September Tahun 2006



**DEPARTEMEN KEHUTANAN**

Ministry of Forestry

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN**

Forestry Research and Development Agency

**PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEHUTANAN**

Centre for Socio Economic and Policy on Forestry Research

**BOGOR INDONESIA**

JURNAL SOSEK	Vol. 3	No. 3	Hal 161 - 232	Bogor 2006	ISSN 1829-8109
--------------	--------	-------	---------------	---------------	-------------------

JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN (*Forestry Socio Economic Journal*) Vol. 3 No. 3 September Tahun 2006

ISSN: 1829-8109

# JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN

*Forestry Socio Economic Journal*

**Volume 3 Nomor 3, September Tahun 2006**

Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan adalah media resmi publikasi ilmiah dalam bidang Sosial Budaya Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor yang sebelumnya bernama Jurnal Sosial Ekonomi. Panitia Penilai Jabatan Peneliti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Suratnya Nomor : 34.424/IV.305/ISSN/2000 TANGGAL 21 Nopember 2000 menetapkan majalah ini sebagai majalah ilmiah.

*Forestry Socio and Economic Journal is a Scientific Publication of Centre for Socio Economic and Policy on Forestry in Centre for Socio Economic and Policy on Forestry Research Bogor. Committee for Functional Researchers Evaluation, National Science Institute with the Degree, Nomor : 32.424/IV.305/ISSN/2000 on 21 November 2000 stipulated this Journal as a Scientific Publication.*

**PENANGGUNG JAWAB** (*Editor in Chief*) : Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

**DEWAN REDAKSI** (*Editorial Board*)  
Ketua (*Chairman*) merangkap Anggota : Dr. Ir. Haryatno Dwiprabowo, M.Sc.

Anggota (*Members*) : 1. Dr. Apul Sianturi, MS  
2. Ir. Satria Astana, MSc  
3. Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA  
4. Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, MA  
5. Dr. Ir. Kirsfianti L. Ginoga, MSc  
6. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS  
7. Ir. Subarudi, M. Wood.Sc

**SEKRETARIAT REDAKSI** (*Editorial Secretariat*)  
Ketua (*Chairman*) merangkap Anggota : Kepala Bidang Pelayanan dan Evaluasi Penelitian

Anggota (*Members*) : 1. Kepala Sub. Bidang Pelayanan Penelitian  
2. Nedi Ramdani, Bc.Ek, S.IP

Diterbitkan oleh (*Published by*) :

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

(*Centre for Socio Economic and Policy on Forestry Research*)

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

(*Forestry Research and Development Agency*)

Alamat (*Address*) : Jalan Gunung batu No. 5, PO. BOX 272 Bogor 16610, Indonesia

Telepon (*Phone*) : 62-0251-633944

Fax (*Fax*) : 62-251-634924

Email : publikasi\_puslitsosek@yahoo.com

ISSN: 1829-8109

# **JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN**

*Forestry Socio Economic Journal*

---

---

**Volume 3 Nomor 3, September Tahun 2006**



**DEPARTEMEN KEHUTANAN**

Ministry of Forestry

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN**

Forestry Research and Development Agency

**PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEHUTANAN**

Centre for Socio Economic and Policy on Forestry Research

**BOGOR INDONESIA**

JURNAL SOSEK	Vol. 3	No. 3	Hal 161 - 232	Bogor 2006	ISSN 1829-8109
--------------	--------	-------	---------------	---------------	-------------------

# JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN

*Forestry Socio Economic Journal*

---

**Volume 3 Nomor 3, September Tahun 2006**

## DAFTAR ISI

KAJIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI PASAMAN, SUMATERA BARAT ( <i>Study of Xcommunity Partisipation toward Protection Forest in Pasaman, West Sumatra</i> ) Bakhdal, Nani Sri Wahyuni dan Muhammad Ali .....	161 - 174
ANALISIS PARTISIPASI PADA PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI KOTO PANJANG, RIAU) ( <i>Participation Analisys of Community Forestry Program : Case Study in Koto Panjang, Riau</i> ) Yanto Rochmayanto, Dodi Frianto dan Edi Nurrohman .....	175 - 189
KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP KAWASAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN KONSERVASI TERPADU ( <i>Society Rely to Kerinci Seblat National Park Area Post of Implemented of Integrated Conservation Program</i> ) Mamat Rahmat, Helmi dan Rahmat Syahni .....	191 - 204
KEARIFAN LOKAL PETANI DALAM MEREHABILITASI LAHAN KRITIS (STUDI KASUS DI DESA SUMBEREJO, KECAMATAN BATUWARNO, KABUPATEN WONOGIRI) ( <i>Local Farmer's Wisdom in Critical Land Rehabilitation (Case Study at Sumberejo Village, Batuwarno Sub District, Wonogiri District)</i> ) Sulistya Ekawati .....	205 - 214
PERAMBAHAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI : SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGIS ( <i>Forest Encroachment at National Park of Rawa Aopa Watumobai : A Sociological Approach</i> ) Subarudi dan Indra A.S.L.P. Putri .....	215 - 229
Indeks Pengarang .....	231 - 232

## JURNAL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KEHUTANAN

ISSN: 1829 - 8109

Terbit : September 2006

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya.

UDC (OSDCF) 630\*901:907.12

Bakhdal, Nani Sri Wahyuni & Muhammad Ali

Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Hutan Lindung Di Pasaman, Sumatera Barat

Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 3 No. 3, hal. 161 - 174

Hutan lindung berfungsi sebagai pengatur tata air, namun di sisi lain ia mendapat tekanan serius dari masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hal ini maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui hubungan hutan lindung dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Kajian ini dilakukan di Nagari Padang Matinggi dan Nagari Binjai, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda survey dengan wawancara terhadap 60 responden (kepala keluarga) masing-masing 30 orang dari setiap nagari. Data dianalisa secara tabulasi dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan lindung berkultur asli Minang dan Mandailing dengan pendidikan rendah (SD), berpendapatan relatif rendah, dengan anggota keluarga lebih dari empat orang, dan bermatapencaharian sebagai petani. Pandangan terhadap hutan lindung sangat dipengaruhi oleh adat lokal yang menyatakan bahwa kawasan hutan lindung adalah wilayah ulayat. Penggunaan hutan lindung untuk kegiatan ekonomi dapat dilakukan sepanjang mendapat izin "ninik mamak", sementara dari pemerintah dinyatakan sebagai kawasan terlarang. Dualisme status kawasan ini selanjutnya menimbulkan berbagai tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan lindung. Masyarakat di nagari yang masih kuat adatnya menunjukkan tingkat partisipasi yang lemah dibandingkan dengan yang longgar. Kekuatan partisipasi juga dipengaruhi oleh pengetahuan tentang manfaat yang diperoleh dari poyek pengelolaan hutan lindung yang dilakukan pemerintah; partisipasi akan meningkat jika proyek memberikan kontribusi finansial kepada warga setempat. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kepastian status kawasan hutan lindung pada nagari yang masih kuat pengaruh adatnya dengan mengikutsertakan para "ninik mamak" dan mempertahankan proyek-proyek yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kata kunci : Hutan lindung, masyarakat sekitar hutan, partisipasi masyarakat.

UDC (OSDCF) 630\*922.2

Yanto Rochmayanto, Dodi Frianto & Edi Nurrohman

Analisis Partisipasi Pada Program Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Koto Panjang, Riau)

Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 3 No. 3, hal. 175 - 189

Partisipasi merupakan sumber daya sosial yang sangat berperan besar dalam mensukseskan suatu program pembangunan pedesaan. Ukuran keberhasilan program hutan kemasyarakatan bukan hanya dari dimensi biofisik, tetapi juga perubahan perilaku. Hasil penelitian di Koto Panjang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat relatif rendah, diklasifikasikan sebagai tingkat partisipasi untuk insentif. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemikiran dan tenaga/jasa, yang keduanya diberikan pada 3 tahapan pembangunan HKm : perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal (persepsi, manfaat, umur dan pendapatan) dan faktor eksternal (insentif dan komunikasi). Faktor insentif dan komunikasi memberikan pengaruh nyata pada perbedaan perilaku partisipasi di kedua desa. Sedangkan kecenderungan secara umum adalah masyarakat desa Tanjung Alai lebih partisipatif dari masyarakat Tanjung. Upaya meningkatkan partisipasi dapat didekati dari optimalisasi organisasi penggerak serta penajaman persepsi HKm dan sistem pertanian menetap. Pembinaan harus dilakukan terus-menerus dan merata dengan metode pendekatan persuasif Perbaikan konsep HKm tentang target, orientasi, proses dan *frame work* perlu dilakukan menuju pengelolaan sumber daya hutan yang partisipatif.

Kata kunci : Partisipasi, masyarakat, hutan kemasyarakatan (HKm).

<p>UDC (OSDCF) 630*901:907.11 Mamat Rahmat, Helmi &amp; Rahmat Syahni</p> <p>Ketergantungan Masyarakat Terhadap Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Pasca Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Terpadu</p> <p>Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 3 No. 3, hal. 191 - 204</p> <p>Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan program <i>Integrated Conservation and Development Project (ICDP)</i> pada kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Program ICDP dalam pengelolaan TNKS telah dimulai sejak tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2002. Pertanyaan utama yang diajukan adalah apakah pelaksanaan program ICDP dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya di dalam kawasan TNKS dan sejauh mana pengaruh program ICDP serta faktor faktor-faktor sosial ekonomi lainnya terhadap pendapatan masyarakat, baik pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS maupun pendapatan dari luar kawasan TNKS sebagai alternatif pola pengembangan kedepan.</p> <p>Penelitian ini dilaksanakan di Desa Napal Licin dan Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan yang termasuk desa-desa penyangga TNKS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ICDP tidak dapat menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TNKS, terutama terhadap lahan perladangan. Pelaksanaan program ICDP belum mampu menurunkan pendapatan masyarakat dari dalam kawasan TNKS, disamping itu juga belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dari luar kawasan TNKS.</p> <p>Dalam rangka melaksanakan kegiatan konservasi TNKS, maka kegiatan perladangan di dalam kawasan TNKS harus dihentikan. Sebagai kompensasinya disarankan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan zona pemanfaatan khusus TNKS secara legal sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat yang tidak mengakibatkan kerusakan kawasan TNKS tetapi memiliki nilai ekonomi tinggi. Pola penanaman karet secara tradisional (non intensif) pada zona pemanfaatan khusus merupakan pilihan yang lebih baik dalam rangka pelestarian kawasan TNKS dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.</p> <p>Kata kunci: Program Konservasi dan Pembangunan Terpadu, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Ketergantungan masyarakat lokal.</p>	<p>UDC (OSDCF) 630*901:233 Sulistya Ekawati</p> <p>Kearifan Lokal Petani Dalam Merehabilitasi Lahan Kritis (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)</p> <p>Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 3 No. 3, hal. 205 - 214</p> <p>Kebijakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada masa lalu lebih menekankan aspek teknis dan mengabaikan aspek sosial, termasuk diantaranya nilai budaya lokal masyarakat setempat, akibatnya kegiatan tersebut kurang berhasil. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui kearifan lokal masyarakat dalam merehabilitasi lahan sebagai pembelajaran sosial bagi semua <i>stakeholders</i>. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal. Data dikumpulkan pada tahun 2005 dengan melakukan <i>indepth interview, focus group discussion, content analysis</i> dan <i>observation</i>. Proses analisis data secara interaktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa: masyarakat dengan kearifannya sanggup merehabilitasi lahan kritis yang ada di sekitarnya dengan memilih jenis tanaman yang sesuai. Tanaman jati (<i>Tectona grandis</i>) dianggap sebagai “sejatine kayu” (sesungguhnya kayu), karena mempunyai keunggulan dalam hal: kemampuan beradaptasi di lahan kritis, keawetan kayu, kualitas kayu, kemampuan memunculkan sumber mata air dan nilai jual yang tinggi. Teknik pengelolaan tanaman yang diterapkan sangat sederhana, dengan ciri : bibit lokal, jarak tanam rapat, pemeliharaan tidak intensif dan sistem tebang butuh. Pengelolaan tanaman tersebut menjadikan hutan rakyat yang ada dikelola secara lestari. Saran kajian ini adalah kebijakan pembangunan ke depan, termasuk diantaranya dalam kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, harus memperhatikan bukan hanya aspek teknis, tetapi juga aspek ekonomis, sosial dan budaya masyarakat setempat.</p> <p>Kata kunci : Kearifan lokal, nilai, rehabilitasi lahan.</p>
<p>UDC (OSDCF) 630*901:907.11 Subarudi &amp; Indra A.S.L.P. Putri</p> <p>Perambahan Hutan Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai : Sebuah Pendekatan Sosiologis</p> <p>Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 3 No. 3, hal. 215 - 229</p> <p>Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) adalah kawasan pelestarian alam yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki 5 (lima) tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan rendah, savana, rawa, dan mangrove. Ancaman terbesar dari kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayatinya adalah perambahan hutan. Oleh karena kajian tentang perambahan hutan di kawasan TNRAW menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk: (i) mengidentifikasi kondisi dan permasalahan umum TNRAW, (ii) mengkaji karakteristik dan perilaku perambah, dan (iii) menyusun strategi penanganan dan penyelesaian kasus perambahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa TNRAW terletak di 4 kabupaten, yaitu kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana dengan luas kawasan 105.194 hektar. Permasalahan utama dalam pengelolaan TNRAW adalah perambahan yang luasnya sudah mencapai sepertepuluh dari total kawasannya. Modus operandi perambahan sangat unik yang bernaung dibawah proses jual-beli lahan dari penduduk asli kepada pendatang (baca perambah hutan). Dari sisi hukum, posisi jual beli lahan sangat lemah dan sudah menjurus kepada tindakan kriminal berupa penipuan dan “mark up” luasan tanah jual beli di kawasan TNRAW. Upaya penyelesaian konflik perambahan hutan di kawasan TNRAW dapat diselesaikan dengan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanganan terhadap perambah, dan peningkatan efektivitas pengelolaan TNRAW. Berkaitan dengan penanganan terhadap perambah dapat dilakukan melalui serangkaian tahapan, yaitu: (i) tatap muka dengan masyarakat perambah dan penjual lahan, (ii) meneliti dan klarifikasi surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan, (iii) penyelidikan atas kasus-kasus pemalsuan dan tindak kriminal, (iv) penyidikan/pemeriksaan atas kasus penyerobotan lahan, dan (v) sosialisasi hasil kerja tim kepada masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum.</p> <p>Kata kunci : Perambahan Hutan, Taman Nasional, and Pendekatan Sosiologis I.</p>	

## FORESTRY SOCIO ECONOMIC JOURNAL

ISSN: 1829 - 8109

Date of issue : September 2006

*The descriptors given are keywords. The abstract sheet may be reproduced without permission or charge.*

UDC (OSDCF) 630\*901:907.12

*Bakhdal, Nani Sri Wahyuni & Mubammad Ali*

*Study of Community Participation toward Protection Forest in Pasaman, West Sumatra*

*Forestry Socio Economic Journal Vol. 3 No. 3, p. 161 - 174*

*The main function of protection forest is as water regulator and it is very important for the communities around. Some protection forests in West Sumatra get serious pressure from them, because they do not know about the borders and use some its resource. The research was conducted in Nagari Padang Matinggi and Nagari Binjai Pasaman regency, West Sumatra Province to Oknow social condition and community participation around protection forest. Data were collected by interviewing and distributing questionnaires to 60 respondents (30 respondents each village). The result of the research showed that the communities who live around the location are Minangkabaus and Mandailings, low education, low income, more than four members family, and worked as farmer. The community with strong culture showed higher participation than those with weak culture. The level participation is also effected by the project development in protection forest. If the project gives financial contribution to household, the participation will increase. Beside that, according to respondent, the protected forest is the area of their elders (nirik mamak), so they can manage the protected forest under permission from their ninik mamak only. While the government claims that the same area should be functioned as protected area. Based on this finding the government has to take an action by giving more knowledge to the community about forestry zone, so that they understand which areas are belong to them and which areas are belong to the government.*

*Keywords : Forest protection, community around forest, community participation*

UDC (OSDCF) 630\*922.2

*Yanto Rochmayanto, Dodi Frianto & Edi Nurrohman*

*Participation Analysis of Community Forestry Program : Case Study in Koto Panjang, Riau*

*Forestry Socio Economic Journal Vol. 3 No. 3, p. 175 - 189*

*Participation is an importance social resources to success a village development program. Successful size of CF program not only biophysical dimension, but also behaviors changing. Study result in Koto Panjang showed that level of community participation were low, and it was classified as participation for incentive level. Community participation were form as an opinion and service labor, both were gave on 3 step of CF developing : planning, executing, evaluating.*

*Participation is influenced by internal factors (perception, utility distribution, ages and revenues) and external factors (incentive and communication). Revenues and communication give a significant influences to behavior differences between the village. Even though the general tendency showed that community of Tanjung Alai more participative than Tanjung. Effort to increase participation can approached by optimalization of motorial organization and sharpness of CF and permanent farm system. Community building must be do continuously and spread with persuasive approach method. Revise of CF concept about goal, orientation, process and frame work is necessary to increase the participative forest resources management.*

*Keywords : Participation, community, Community Forestry (CF)*

<p>UDC (OSDCF) 630*901:907.11 Mamat Rahmat, Helmi &amp; Rahmat Syabni</p> <p><i>Society Rely to Kerinci Seblat National Park Area Post of Implemented of Integrated Conservation Program</i></p> <p><i>Forestry Socio Economic Journal Vol. 3 No. 3, p. 191 - 204</i></p> <p><i>This research aimed to analyse impact of Integrated Conservation and Development Project (ICDP) program in Kerinci Seblat National Park (KSNP) area. ICDP program in KSNP management have started since 1998 year and have finished in 2002 year. Primary question raised are: did ICDP program decrease local society rely on the resources gained from KSNP area, did ICDP program affected to local society income from the resources outside the KSNP area, and what factors influenced pattern of buffer zone-village development in forwards?</i></p> <p><i>The research was conducted in Napal Licin Village and Pulau Kidak Village, Ulu Rawas Sub District, Musi Rawas District, South Sumatra Province, part of buffer zone-village of KSNP. The results of this study show that ICDP program could not decrease society relied on KSNP area. ICDP program have not yet could degrade earnings of society from within area of KSNP, despitefully also not yet can improve earnings of society from outside area of KSNP.</i></p> <p><i>In conservation of KSNP, shifting cultivation in KSNP area have to stopped. As the compensation, it's suggested to improve society accessed in special exploiting zone of TNKS legally. The accesed could be an alternative to society living pattern which not impacted to damage on KSNP area but gaining high economic value. Non intensive cultivation of rubber in special exploiting zone was better choice for the agenda of conservation KSNP area and also improve earnings of local society.</i></p> <p><i>Keywords: Integrated Conservation and Development Project (ICDP), Kerinci Seblat National Park (KSNP), Local society rely.</i></p>	<p>UDC (OSDCF) 630*901:233 Sulistya Ekwawati</p> <p><i>Local Farmer's Wisdom in Critical Land Rehabilitation (Case Study at Sumberjo Village, Batuwarno Sub District, Wonogiri District</i></p> <p><i>Forestry Socio Economic Journal Vol. 3 No. 3, p. 205 - 214</i></p> <p><i>The past policy of rehabilitation and soil conservation emphasized on technical aspect and disregard social aspect. It also disregard local cultural value of society. The consequences is that activities were less in success. The objective of this article is to find out local wisdom of society in farm rehabilitation as a social learning for all stakeholders. The research strategy used single case study. Data was collected by in depth interview, focus group discussion, content analysis and observation, in 2005. Analyses of data was processed by interactive method. Result of study indicates that society with its wisdom is ready to rehabilitate critical land in surroundings neighborhood by choosing appropriate crop type. Teak plants (<i>Tectona grandis</i>) are considered to be "sejatine kayu" (real of wood), because it is excellence in their ability to adapt in critical land, durability of wood, quality of wood, the ability to generated the source of wellspring and high sell value. Management technique of crop is applied with very simple method, characteristic by local seed, very close planting space, no intensive maintenance and need cutting system. Those kinds of crop management cause private forest is sustained managed. This study suggest policy for development of rehabilitation and soil conservation activities, need to take not only on technical aspect, but also economic, social and local society culture.</i></p> <p><i>Keyword: Local wisdom, rehabilitation and soil conservation, policy.</i></p>
<p>UDC (OSDCF) 630*901:907.11 Subarandi &amp; Indra A.S.L.P. Putra</p> <p><i>Forest Encroachment at National Park of Rawa Aopa Watumobai: A Sociological Approach</i></p> <p><i>Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kebutanan Vol. 3 No. 3, hal. 215 - 229</i></p> <p><i>The National Park of Rawa Aopa Watumobai (NPRAW) located in South East Sulawesi province has five main sub-ecosystems that are: (i) low land rain forest, (ii) low mountain forest, (iii) savana, (iv) peat forest, and (v) mangrove. The biggest threat of sustainable ecosystems is forest encroachment. Therefore, the research conducted was focused on the process of the forest encroachment. The aims of this research are: (1) to identify general condition and problems at the NPRAW, (2) to analyze the character and behavior of forest encroachers, and (3) to formulate a solution strategy for handling the forest encroachment. The results of the research showed that the total area of the NPRAW is 105,194 ha spread out over 4 districts (South Konawe, Konawe, Kolaka, and Bombana). The main problem faced by the NPRAW is forest encroachment achieving a tenth of its total area. The forest encroachment is triggered by a land transaction between local and migrants communities. The land transaction is an illegal activity from the poin of view of the existing regulation because it covers crime, trapping, and mark up on it. The strategies for handling the forest encroachment are: (i) community empowering, (ii) proper handling of forest encroachment cases, and (iii) efective management of the NPRAW.</i></p> <p><i>Keywords : Forest Encroachment, National Park, and Sociological Approach.</i></p>	

# KAJIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI PASAMAN, SUMATERA BARAT

*(Study of Community Partisipation toward Protection Forest in  
Pasaman, West Sumatra)*

Oleh / By :  
Bakhdal, Nani Sri Wahyuni & Muhammad Ali<sup>1)</sup>

## ABSTRACT

*The main function of protection forest is as water regulator and it is very important for the communities around. Some protection forests in West Sumatra get serious pressure from them, because they do not know about the borders and use some its resource. The research was conducted in Nagari Padang Matinggi and Nagari Binjai Pasaman regency, West Sumatra Province to Oknow social condition and community participation around protection forest. Data were collected by interviewing and distributing questionnaires to 60 respondents (30 respondents each village). The result of the research showed that the communities who live around the location are Minangkabaus and Mandailings, low education, low income, more than four members family, and worked as farmer. The community with strong culture showed higher participation than those with weak culture. The level participation is also effected by the project development in protection forest. If the project gives financial contribution to housebold, the participation will increase. Beside that, according to respondent, the protected forest is the area of their elders (ninik mamak), so they can manage the protected forest under permission from their ninik mamak only. While the government claims that the same area should be functioned as protected area. Based on this finding the government has to take an action by giving more knowledge to the community about forestry zone, so that they understand which areas are belong to them and which areas are belong to the government.*

*Keys words : forest protection, community around forest, community participation*

## ABSTRAK

Hutan lindung berfungsi sebagai pengatur tata air, namun di sisi lain ia mendapat tekanan serius dari masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hal ini maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui hubungan hutan lindung dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Kajian ini dilakukan di Nagari Padang Matinggi dan Nagari Binjai, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda survey dengan wawancara terhadap 60 responden (kepala keluarga) masing-masing 30 orang dari setiap nagari. Data dianalisa secara tabulasi dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan lindung berkultur asli Minang dan Mandailing dengan pendidikan rendah (SD), berpendapatan relatif rendah, dengan anggota keluarga lebih dari empat orang, dan bermatapencarian sebagai petani. Pandangan terhadap hutan lindung sangat dipengaruhi oleh adat lokal yang menyatakan bahwa kawasan hutan lindung adalah wilayah ulayat. Penggunaan hutan lindung untuk kegiatan ekonomi dapat dilakukan sepanjang mendapat izin "ninik mamak", sementara dari pemerintah dinyatakan sebagai kawasan terlarang. Dualisme status kawasan ini selanjutnya menimbulkan berbagai tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan lindung. Masyarakat di nagari yang masih kuat adatnya menunjukkan tingkat partisipasi yang lemah dibandingkan dengan yang longgar. Kekuatan partisipasi juga dipengaruhi oleh pengetahuan tentang manfaat yang diperoleh dari proyek pengelolaan hutan lindung yang dilakukan pemerintah; partisipasi akan meningkat jika proyek memberikan kontribusi finansial kepada warga setempat. Oleh karena itu, perlu dilakukan

<sup>1)</sup>Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Wilayah Sumatera

sosialisasi kepastian status kawasan hutan lindung pada nagari yang masih kuat pengaruh adatnya dengan mengikutsertakan “para ninik mamak” dan mempertahankan proyek-proyek yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kata kunci : hutan lindung, masyarakat sekitar hutan, partisipasi masyarakat.

## I. PENDAHULUAN

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena karakteristik ekosistem atau sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemelihara kesuburan tanah. Secara formal hutan lindung menurut Undang-undang No 41 tahun 1999 adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Peruntukan tersebut termasuk jenis manfaat *intangible* yang berasal dari ekosistem hutan lindung (Bahruni, 1992), dan manfaat ini tidak kalah pentingnya dibandingkan manfaat *tangible*. Menurut Badan Planologi Kehutanan (2002) dalam Anonim (2004) secara keseluruhan sisa hutan lindung di Indonesia berkisar 15% dari total daratan; yang idealnya harus mencapai 30%.

Meskipun diketahui mempunyai manfaat besar dalam mengatur tata air serta mencegah erosi dan banjir, namun demikian keberadaan hutan lindung masih belum direspon secara positif oleh masyarakat sekitarnya. Sebagai bukti adalah masih didapati berbagai masalah tekanan terhadap kawasan hutan lindung, yang antara lain disebabkan oleh belum mantapnya lembaga pengelola serta tata batasnya, adanya persaingan kebutuhan lahan; letaknya yang berdekatan dengan pemukiman; hukum dan perundangan yang lemah; dan persepsi yang berbeda dari berbagai sektor (Anonim, 1998 dan Ginoga 2003).

Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan lindung terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pada masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah bentuk interaksi lebih banyak terjadi secara langsung seperti pengambilan kayu, getah, buah, pakan ternak, kayu bakar dan lain-lain. Sementara itu, bagi masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi tinggi interaksi terjadi secara tidak langsung, seperti menjadi pemodal dalam usaha *illegal logging*. Segala bentuk interaksi masyarakat dengan hutan lindung pada umumnya dipengaruhi oleh faktor permintaan hasil hutan dan kebutuhan finansial petani itu sendiri (Anonim, 2004).

Interaksi masyarakat dengan hutan lindung dalam beberapa kasus didapati memberikan kontribusi finansial terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat yang hidup di sekitarnya. Di Jember misalnya (Anonim 2004) dengan memanfaatkan lahan hutan lindung untuk kegiatan agroforestri tanaman jagung dan buah-buahan maka pendapatan petani menjadi bertambah, dengan kontribusi 36% dari total pendapatan petani. Di samping itu, pemanfaatan hutan lindung untuk tanaman karet di Jambi juga memberikan kontribusi sebesar 63% dari total pendapatan petani. Kedua bentuk interaksi di Jember dan Jambi tersebut menunjukkan bahwa interaksi masyarakat dengan hutan lindung secara langsung dapat menambah pendapatan masyarakat di sekitarnya. Di pihak lain, kawasan hutan lindung juga dapat terpelihara jika pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan tersebut dilakukan secara ketat.

Salah satu propinsi di Sumatera yang masih cukup luas kawasan hutan lindungnya adalah Propinsi Sumatera Barat (Sumbar). Kawasan Hutan Lindung di Sumbar tercatat seluas 910.533 ha atau 21% dari total luas propinsi (4.289.800 ha). Angka prosentase ini

menempatkan Propinsi Sumbar pada urutan kedua setelah Aceh (33%) dalam urutan hutan lindung terluas di Sumatera (Ginoga, 2003). Namun, upaya pengelolaan hutan lindung di Sumbar masih banyak menghadapi masalah dengan masyarakat sekitarnya. Interaksi yang terjadi bukan saja dari masyarakat umum bahkan juga tumpang tindih dengan keperluan Instansi lain. Sejalan dengan perkembangan zaman, kini upaya pengelolaan hutan lindung dihadapkan pada era otonomi daerah yakni bagaimana caranya memberdayakan sumber alamnya sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sejauh ini belum ada informasi yang memaparkan masalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung. Oleh karena itu diperlukan kajian yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik sosial, tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.

## II. BAHAN DAN METODA

### A. Lokasi dan Waktu

Pasaman merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumbar yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan luas hutan lindungnya tercatat 289.480 ha atau 36,95% dari total kawasan hutan yang ada serta tersebar hampir pada semua kecamatan. Gambaran fisiografis wilayah pasaman adalah cukup bervariasi, dari datar hingga bergunung-gunung. Titik terendah terletak di Kec. Sungai Beremas (5 m dpl) dan tertinggi Gunung Talamau (2.913 m dpl) di Kec. Talamau. Sedangkan jenis-jenis tanah yang terdapat di wilayah ini antara lain: Latosol, Podsolik Merah Kuning, Andosol (tanah hitam), Podsolik Coklat, Litosol dan Regosol (Anonim, 2001). Penelitian dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Sumpur (luas 122.493 ha) dan Hutan Alahan Panjang (36.919 Ha); dengan lokasi nagari di Padang Matinggi (Kecamatan Rao) yang berbatasan dengan HL Sumpur dan Nagari Binjai (Kecamatan Tigo Nagari) yang berbatasan dengan Hutan Alahan Panjang. Pelaksanaan dilakukan pada bulan Juli - September 2004.

### B. Obyek, Bahan dan Alat

Obyek penelitian ini adalah penduduk/masyarakat yang bertempat tinggal di Nagari Padang Matinggi (Kecamatan Rao) dan Nagari Binjai (Kecamatan Tigo Nagari) sedangkan bahan dan peralatan yang digunakan antara lain yaitu bahan *quisioner*, alat tulis, *tape recorder*, kaset, kamera photo, dan perlengkapan lapangan.

### C. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari laporan Dinas kehutanan setempat, Bappeda Pasaman, laporan pengusaha pengguna jasa hutan lindung (PDAM), data statistik desa, kecamatan dan kabupaten. Sedangkan data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung di lapangan, yakni di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Pasaman sebagai sampel desa yang menolak kegiatan proyek reboisasi; dan Nagari Padang Matinggi, Kecamatan Rao, sebagai desa yang menerima proyek reboisasi. Untuk mengetahui kondisi partisipasi masyarakat dari dua nagari yang terpilih dilakukan pengumpulan data dengan wawancara dan pengisian dan diskusi kepada 60 responden yang diambil secara acak; masing-masing 30 Kepala Keluarga untuk setiap nagari.

## D. Pengolahan Data

Data hasil pengamatan kemudian dianalisis secara deskripsi guna mendapatkan karakteristik kondisi social, pengetahuan dan tingkat dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan hutan lindung. Digunakan analisis tabulasi untuk melihat hubungan tingkat partisipasi masyarakat dengan kondisi sosial dan program pengelolaan hutan lindung yang dilakukan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Sosial Ekonomi Responden

#### 1. Umur dan Asal

Usia responden yang paling rendah adalah 25 tahun baik di Padang Matinggi maupun di Binjai, sedangkan usia tertinggi tercatat 70 tahun di Nagari Binjai dan 56 tahun di Nagari Padang Matinggi. Dari usia ini terlihat bahwa responden minimal sudah berusia 25 tahun dan maksimal 70 tahun, sehingga sudah terdapat kebiasaan untuk menentukan mana yang benar dan salah dalam pengelolaan kawasan hutan. Dalam ajaran Islam seseorang sudah dianggap dewasa jika sudah mentruasi (biasanya usia 14 tahun) dan laki-laki biasanya berusia 16 tahun. Dengan demikian, para responden terdiri dari anggota masyarakat dewasa sehingga dapat memberikan penilaian benar atau salah, baik dan buruk sesuai dengan sistem nilai dari lingkungan sosial budayanya.

Sebagian besar responden di Padang Matinggi berusia 26 - 35 tahun (43,3%), diikuti dengan usia 36 - 40 tahun (33,3%). Demikian juga halnya di Binjai kelas usia 26 - 35 tahun dan 36 - 40 tahun lebih dominan dibanding dengan usia lain. Hal ini menunjukkan bahwa responden pada kedua Nagari kebanyakan masih berusia produktif. Karakter umur responden selanjutnya dapat dilihat pada Table (1).

Tabel 1. Variasi Usia Responden

Table 1. Respondent Age Variation

Umur (Tahun) Age (Year)	Nagari Padang Matinggi (Padang Matinggi Village)		Nagari Binjai (Binjai Village)	
	N	%	N	%
? 25	2	6,7	4	13,3
26 – 35	13	43,3	9	30,0
36 – 45	10	33,3	9	30,0
46 – 55	4	13,3	6	20,0
> 56	1	3,3	2	6,7
Total (total)	30	100,0	30	100,0

Sumber (Source): Diolah dari data primer September 2004 (From primary data in September 2004)  
n = jumlah responden (number of respondent)

Seluruh responden di Padang Matinggi adalah warga asli penduduk setempat. Sedangkan di Binjai sebagian besar 21 KK (70,0%) adalah penduduk setempat, dan sisanya 9 KK (30,0%) berasal dari tempat lain. Besarnya angka responden sebagian penduduk asli menunjukkan kemungkinan besarnya adat kebiasaan setempat dalam merespon pengelolaan hutan lindung di sekitar nagari mereka.

## 2. Mata Pencarian dan Pendapatan

Berdasarkan mata pencarian dan pendapatan terlihat bahwa responden kebanyakan berusaha di sektor pertanian, seperti dalam Tabel (2). Semua responden di Padang Matinggi bermatapencarian utama sebagai petani; sebagai usaha sampingan terdapat juga yang berusaha sebagai tukang, buruh, berdagang, dan lain-lain.

Tabel 2. Mata pencarian dan pendapatan responden

Table 2. Occupation and Income

Mata Pencarian (Occupation)		Padang Matinggi		Binjai		Pendapatan (Income) (Rp) x 1000	Padang Matinggi		Binjai	
		N	%	n	%		n	%	n	%
Utama (Primary)	Tani (Farmer)	30	100	29	96,7	< 500	15	50,0	17	56,7
	Non Tani (Non farmer)	0	0	1	3,3	500 – 1000				
Sampingan (Secondary)	Tukang	2	6,7	0	0	> 1000.	14	46,7	11	36,7
	Buruh (Labour)	2	6,7	3	10,0					
	Dagang	2	6,7	1	3,3		1	3,3	2	6,7
	Lain-lain	2	-	4	13,3					

Sumber (Source): Diolah dari data primer September 2004 (From primary data in September 2004)  
n = jumlah responden (number of respondent)

Pendapatan responden dari usaha tani tercatat kurang dari Rp. 500.000,- baik di Padang Matinggi maupun di Binjai. Hanya 1 - 2 KK (6,7%) yang berpendapatan di atas Rp 1.000.000,- per bulan. Jika upah minimum regional Rp. 20.000,- per hari (atau Rp 600.000,-/bulan) maka sebagian besar responden berpendapatan di bawah nilai upah minimum.

## 3. Luas Lahan dan Anggota Rumah Tangga

Sebagai petani, semua responden baik di Padang Matinggi maupun di Binjai mempunyai lahan. Luas lahan yang dimiliki responden cukup bervariasi mulai dari paling sempit 1/4 ha, hingga paling luas 5 ha. Luas sempitnya kepemilikan lahan responden tergantung pada cara pengelolaan dan variasi dalam penggunaan lahan apakah untuk kebun atau ladang.

Tabel 3. Kepemilikan Lahan dan Anggota Rumah Tangga Responden

Table 3. Land Owner and Number of Family Respondent

Luas Lahan ( <i>Land wide</i> )	Padang Matinggi		Binjai		Jumlah anggota rumah tangga ( <i>Number of family</i> )	Padang Matinggi		Binjai	
	n	%	n	%		n	%	n	%
< 0,5	2	6,7	5	16,7	? 4 jiwa ( <i>person</i> )	12	40,0	15	50,0
0,5 - 1	19	63,7	14	46,7					
> 1	9	30,0	11	36,7	> 4 jiwa ( <i>person</i> )	18	60,0	15	50,0
Total	30	100,0	30	100,0					

Sumber (*Source*): Diolah dari data primer September 2004 (*From primary data in September 2004*)  
n = jumlah responden (*number of respondent*)

Sebagai keluarga petani maka lahan adalah sesuatu yang penting bagi responden. Meskipun semua responden memiliki lahan, akan tetapi apabila dikaitkan dengan jumlah rumah tangga maka terlihat bahwa anggota rumah tangga berjumlah lebih dari empat orang; lebih besar dari jumlah ideal program keluarga berencana nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan kebutuhan lahan dari anggota rumah tangga sehingga ada kecenderungan masyarakat untuk menekan kawasan hutan di sekitar nagari seperti adanya kebun sawit dalam kawasan hutan lindung yang berdekatan dengan Nagari Binjai.

#### 4. Pendidikan dan Status Sosial

Pendidikan responden bervariasi dari tidak sekolah sampai dengan tamat menengah sekolah tingkat atas (SMU). Hal ini berarti juga bahwa responden mengikuti masa pendidikan selama 0 tahun sampai 12 tahun. Berdasarkan Tabel (4) terlihat bahwa responden yang berpendidikan di atas atau lebih enam tahun lebih rendah dibandingkan yang berpendidikan sampai enam tahun (SD). Dengan demikian, pendidikan responden masih tergolong rendah. Hal ini dapat dimaklumi karena aksesibilitas wilayah nagari dan jumlah sarana pendidikan termasuk masih sulit dijangkau dan sangat terbatas (lebih kurang 25 km dari ibu kota kabupaten).

Meskipun berpendidikan relatif rendah, responden kebanyakan mempunyai status sosial sebagai tokoh masyarakat antara lain sebagai “ninik mamak”, cerdik pandai, maupun tokoh formal nagari. Dari Tabel (4) tergambar bahwa 56,7% responden di Padang Matinggi termasuk tokoh, demikian juga di Binjai tercatat 50,0% adalah tokoh masyarakat. Dengan demikian, ketokohan seseorang kebanyakan dipandang dari segi garis keturunan dan kepahamannya terhadap adat istiadat, walaupun seseorang itu hanya memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah.

Tabel 4. Pendidikan dan Status Sosial

Table 4. Education and Social Status

Pendidikan (Education)	Padang Matinggi		Binjai		Status sosial (Social status)	Padang Matinggi		Binjai	
	n	%	n	%		n	%	n	%
≥ 6 tahun (year)	16	53,3	20	66,7	Biasa (common)	13	43,3	15	50,0
> 6 tahun (year)	14	46,7	10	33,3	Tokoh (leader)	17	56,7	15	50,0
Total	30	100,0	30	100,0	Total	30	100,0	30	100,0

Sumber (Source): Diolah dari data primer September 2004 (From primary data in September 2004)

n = jumlah responden (number of respondent)

## B. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hutan Lindung

Pengetahuan terhadap adanya kawasan hutan lindung bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya penting untuk diketahui. Ketidaktahuan terhadap kawasan dapat mendorong masyarakat melakukan aktivitas konsumtif sehingga dapat mengganggu kelestarian kawasan lindung. Kebanyakan responden mengetahui adanya kawasan hutan lindung di sekitar nagari. Lebih separuh dari total responden (70,0%) menyatakan mengetahui adanya hutan lindung, sebanyak 26,7% tidak tahu dan hanya 3,3% tidak berpendapat. Namun demikian, hampir semua responden menyatakan tidak mengetahui status kawasan hutan formal. Bagi mereka hutan adalah kawasan “rimbo” yang dapat diusahakan untuk kebun atau ladang. Dalam pandangan responden, hutan disekitar kampung adalah tanah ulayat yang dikuasai oleh para “datuk” sebagai personifikasi “ninik mamak” masyarakat adat.

Istilah hutan lindung tidak banyak diketahui, tetapi “Bosweschen” yang dari bahasa Belanda lebih dikenal daripada istilah hutan lindung, bahkan dalam kawasan hutan ulayat-pun tidak terdapat bagian yang perlu dilindungi. Siapa yang kuat (modal maupun tenaga) setelah mendapat restu “ninik mamak” boleh membuka hutan untuk diusahakan sebagai kebun atau lainnya. Di Padang Matinggi, keberadaan hutan lindung terlihat jelas dengan adanya tanaman reboisasi jenis *Pinus merkusii*. Meskipun demikian, tidak semua responden mengetahui bahwa kawasan tersebut adalah hutan lindung. Berbeda dengan di Binjai, kawasan hutan lindung tidak dapat di bedakan dengan kawasan hutan ulayat karena vegetasi tropis yang menutupinya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Table 5. Pengetahuan responden terhadap hutan lindung

Table 5. Respondent knowledge toward forest protection

No	Aspek Pengetahuan (Knowledge aspects)	Respon (Response)	Padang Matinggi		Binjai		Total	
			n	%	n	%	n	%
1.	Mengetahui adanya hutan lindung ((forest protection present)	Ya (Yes)	20	66.7	22	73.3	42	70
		tidak (No)	10	33.3	6	20.0	16	26.7
		tidak berpendapat (No comment)	0	0	2	6.7	2	3.3
2.	Mengetahui batasnya (Forest Protection boundary)	Ya (Yes)	12	40.0	17	56.7	29	48.3
		tidak (No)	18	60.0	12	40.0	30	50.0
		tidak berpendapat (No comment)	0	0	1	3.3	1	1.7
3.	Tahu fungsi hutan lindung (Functions of Forest Protection)	Ya (yes)	24	80.0	26	86.7	50	83.3
		tidak (No)	6	20.0	4	13.3	10	16.7
		Tidak berpendapat (No comment)	0	0	0	0.0	0	0
4.	Lembaga pengelola hutan lindung (Instution of forest protection)	Mengetahui	16	53.3	20	66.7	36	60.0
		Tidak tahu	8	26.7	8	26.7	16	26.7
		Tidak berpendapat	6	20.0	2	6.7	8	13.3
5.	Dikelola baik (Good management)	Ya (Yes)	12	40.0	11	36.7	23	38.3
		Tidak (No)	8	26.7	11	36.7	19	3.7
		Tidak berpendapat (No comment)	10	33.3	8	26.6	18	30.0
6.	Pemanfaatan kayu (logging activity)	Ya (Yes)	0	0	19	63.3	19	31.7
		Tidak (No)	17	56.7	3	10.0	20	33.3
		Tidak berpendapat (No comment)	13	43.3	8	26.7	21	35.0
7.	Untung dan rugi adanya hutan lindung (advantage or disdvantage)	Untung (Advantage)	13	43.3	3	10.0	16	26.7
		Rugi (Disadvantage)	17	56.7	27	90.0	44	73.3
8.	Konversi hutan lindung (forest convertion)	Ya (Yes)	21	70	23	76.7	44	73.3
		Tidak (No)	7	23.3	2	6.7	9	15.0
		Tidak berpendapat (No comment)	2	6.7	5	16.7	7	11.7

Sumber (Source): Diolah dari data primer September 2004 (From primary data in September 2004)

n = jumlah responden (number of respondent)

Meskipun yang mengetahui keberadaan hutan lindung lebih banyak dari yang tidak, akan tetapi tidak semua responden mengetahui batasnya. Hanya 40,0% di Padang Matinggi yang mengetahui batas berupa beton merah, dan 60,0% tidak mengetahuinya. Hal ini terjadi karena jarak pemukiman dengan kawasan hutan lindung relatif jauh antara 2 - 10 km. Berbeda dengan di Binjai, dimana yang mengetahui batas lebih besar dari yang tidak mengetahui (seperti dalam Tabel 5). Keseringan berinteraksi antara responden dengan kawasan hutan lindung di Binjai menyebabkan responden di nagari ini lebih banyak mengetahui batas hutan lindung. Di samping itu, tanda batas hutan di Binjai lebih banyak terlihat dibandingkan dengan di Padang Matinggi.

Sudah menjadi budaya setempat, terutama di Binjai, penggunaan hutan ulayat diprioritaskan untuk para anak cucu dan kemenakan dari pihak ibu. Pendatang yang “bersumando” termasuk yang diizinkan juga. Bagi pihak lain yang hendak menggarap hutan perlu mendapat izin dari “ninik mamak” (datuk). Kawasan hutan lindung dalam kawasan hutan ulayat menjadi perkara yang rancu dalam hal pengelolaan karena pada kawasan yang sama terdapat dua pihak pengelola, dalam hal ini adalah pemerintah dan para datuk. Hutan lindung bagi pemerintah adalah hutan yang perlu dijaga, sementara bagi datuk hutan adalah sumber alam cadangan untuk tempat berusaha anak-kemanakannya. Bagi warga, jika ada modal maka hutan ulayat (apakah berstatus hutan lindung) dapat diusahakan untuk berladang atau berkebun terutama jenis sawit.

Secara formal, sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, hutan lindung berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah serta mencegah intrusi laut. Sehubungan dengan itu, di Padang Matinggi dan Binjai hanya empat fungsi yang secara realistik dapat terpenuhi dari hutan lindung terhadap masyarakat sekitarnya, yaitu: mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Pengetahuan responden terhadap fungsi hutan lindung terlihat cukup baik dimana 83,3% dari total responden menyatakan mengetahui fungsinya. Namun kebanyakan responden hanya mengetahui satu fungsi (45,0%) yakni sebagai kawasan untuk mencegah banjir, diikuti kemudian dengan mengetahui dua fungsi (31,7%), selanjutnya dapat dilihat pada Tabel (6).

Walaupun responden kebanyakan mengetahui fungsi hutan lindung, terutama untuk mencegah banjir, namun demikian responden pada kedua nagari kebanyakan menyatakan rugi dengan adanya hutan lindung, masing-masing 56,7% di Padang Matinggi dan 90,0% di Binjai. Lahan semakin sempit sehingga tidak dapat bertani dan gangguan babi hutan (*Sus sp*) serta monyet (*Macaca spp*) adalah alasan utama mengapa responden menyatakan rugi dengan adanya hutan lindung. Hal ini selanjutnya terlihat jelas dari pandangan responden yang sebagian besar setuju (73,3%) jika hutan lindung dikonversi menjadi areal usaha tani masyarakat.

Tabel 6. Pengetahuan Terhadap Fungsi Hutan Lindung  
 Table 6. Knowledge of Forest Protection Function

Fungsi hutan lindung ( <i>Forest protection functions</i> )	Padang Matinggi		Binjai		Total	
	n	%	n	%	n	%
1. Empat fungsi sbg pengatur tata air, mencegah banjir, erosi, menjaga kesuburan tanah ( <i>four function as preventing flood, erosion, and soil fertilization</i> )	0	0	0	0	0	0
2. Tiga fungsi sebagai pencegah banjir, erosi, menjaga kesuburan tanah ( <i>three function as preventing flood, erosion, and soil fertilization</i> ).	4	13.3	0	0	4	6.7
3. Dua fungsi sebagai pencegah banjir & erosi ( <i>Two function as preventing flood, and erosion</i> ).	11	36.7	8	26.7	19	31.7
4. Satu fungsi sebagai pencegah banjir ( <i>only one function as preventing flood,</i> )	9	30.0	18	60.0	27	45.0
5. Tidak tahu ( <i>not know</i> )	6	20.0	4	13.3	10	16.7
<b>Total</b>	30	100.0	30	100.0	60	100.0

Sumber (*Source*): Diolah dari data primer September 2004 (*From primary data in September 2004*)  
 n = jumlah responden (*number of respondent*)

Pengetahuan terhadap lembaga pengelola hutan lindung memperlihatkan hasil yang beragam. Tabel (5) menunjukkan bahwa jumlah responden yang mengetahui lembaga pengelola hampir sama dengan yang tidak. Hal ini jelas terlihat di Binjai karena pengaruh “ninik mamak” terhadap tanah ulayat di kawasan hutan lindung lebih kuat dibandingkan dengan di Padang Matinggi. Kekuatan pengaruh “ninik mamak” ditambah lagi dengan kurangnya patroli petugas kehutanan menyebabkan lebih dari separuh responden menyatakan tidak kenal dengan lembaga pengelola hutan lindung. Lebih jauh dampak dari ketidaktahuan ini adalah masih banyak responden di Binjai (63,3 %) yang memanfaatkan hutan lindung untuk mengambil hasil kayu.

### C. Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Lindung

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung dapat dilihat dari keikutsertaan mereka dalam program yang dilakukan Dinas Kehutanan Pasaman terhadap kawasan hutan lindung. Di samping itu, partisipasi juga dapat ditinjau dari aktivitas bersifat swadaya yang dilakukan oleh masyarakat terhadap hutan lindung. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Kehutanan Pasaman (2004) diketahui adanya program penghijauan dan reboisasi di Padang Matinggi dan Binjai baik dalam kawasan hutan lindung maupun di luar kawasan hutan lindung.

Tabel 7. Partisipasi responden dalam pengelolaan hutan lindung

Table 7. *Participation toward forest protection managment*

No	Aspek Partisipasi ( <i>Partisipation aspect</i> )	Responden	Padang Matinggi		Binjai	
			N	%	n	%
1.	Mengetahui adanya program reboisasi/penghijauan ( <i>know to reforestation/replanting program</i> )	Ya ( <i>yes</i> )	30	100.0	11	36.7
		Tidak ( <i>no</i> )	0	0	19	63.3
2.	Menerima reboisasi/penghijauan ( <i>Accept to reforestation/replanting program</i> )	Ya ( <i>yes</i> )	30	100.0	0	0
		Tidak ( <i>no</i> )	0	0	30	100.0
3.	Terlibat dalam kegiatan reboisasi/penghijauan ( <i>fallow in reforestation/replanting program</i> )	Ya ( <i>yes</i> )	18	60.0	0	0
		Tidak ( <i>no</i> )	12	40.0	30	100.0
4.	Keterlibatan dalam ( <i>fallow in</i> ): a. Perencanaan ( <i>Planning</i> )	Ya ( <i>yes</i> )	6	20.0	0	0
		Tidak ( <i>no</i> )	24	80.0	30	100.0
	b. evaluasi ( <i>Evaluation</i> )	Ya ( <i>yes</i> )	3	10.0	0	0
		Tidak ( <i>no</i> )	27	70.0	30	100.0
5.	Kegiatan swadaya ( <i>Self program</i> )	Ya ( <i>yes</i> )	11	36.7	0	0
		Tidak ( <i>no</i> )	19	63.3	30	100.0

Sumber (*Source*) : Data primer September 2004 (*From primary data in September 2004*)

n = jumlah responden (*number of respondent*)

Program reboisasi yang dilakukan pada tahun 1980-an telah berhasil dengan baik di Padang Matinggi. Hasil kegiatan tersebut telah menghijaukan kawasan yang tadinya kritis, sehingga menimbulkan persepsi yang positif bagi masyarakat terhadap upaya pengelolaan hutan lindung. Dari Tabel (6) terlihat bahwa responden di Padang Matinggi semuanya mengetahui dan menerima upaya reboisasi dan penghijauan pada hutan lindung dan lahan adat. Bahkan tokoh-tokoh nagari ini secara aktif mendatangi kantor Dinas Kehutanan Pasaman dengan maksud agar kegiatan GERHAN (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan) pada tahun 2003 dan 2004 dilakukan di Nagari mereka. Matinggi. Permintaan ini disambut baik oleh pihak Dinas Kehutanan sehingga pada tahun 2003 dan 2004 proyek GERHAN dilakukan di Padang Matinggi, setelah sebelumnya ditolak di Binjai.

Berbeda dengan di Binjai, semua responden tidak dapat menerima GERHAN karena berbagai alasan yang bersifat sosio-ekologis. Meskipun terdapat juga yang mengetahui program GERHAN, tetapi mereka sepakat untuk menolaknya. Oleh karena itu pula tidak ada responden yang terlibat aktif pada kegiatan tersebut. Sementara di Padang Matinggi tercatat 18 KK (60%) terlibat dalam kegiatan reboisasi, dan hanya 40% yang tidak. Sebenarnya masih banyak yang berkeinginan ikut, akan tetapi target peserta yang diinginkan dalam program kegiatan tersebut sudah mencukupi.

Menurut Terra, Malik dan Wali Padang Matinggi (2004), sebenarnya proyek GERHAN di Kabupaten Pasaman pada Pebruari 2004 memilih lokasi di Binjai. Tetapi, selama hampir dua bulan dengan tujuh kali pertemuan antara Dinas Kehutanan dan tokoh masyarakat Binjai tidak didapati keputusan yang bulat. Bahkan, sebaliknya masyarakat menolak proyek tersebut dengan “Deklarasi Pernyataan Penolakan” yang ditandatangani oleh semua “Datuk” (12 orang) dan 1 orang anggota masyarakat biasa. Paling tidak terdapat empat alasan yang menjadi motivasi penolakan tersebut. Pertama lahan adat yang digunakan perlu diganti dengan “bungo sirih” semacam uang ganti rugi dari penggunaan lahan ulayat. Dan “bungo sirih” ini dikuasai oleh “ninik mamak” yang penggunaannya berada dalam wewenang “datuk”. Kedua, adanya ketakutan masyarakat yang merasa tidak akan dapat lagi mengusahakan lahan dimana tanaman GERHAN ditanam. Menurut informasi yang mereka terima, setelah tanaman besar maka areal tidak dapat diusahakan lagi. Padahal menurut Petugas Dinas Kehutanan informasi tersebut tidaklah benar. Lahan-lahan yang akan ditanam adalah kawasan hutan lindung, yang sudah berubah menjadi areal pertanian (kebun dan sawah). Ketika areal ini dibuat patok tanda batas maka masyarakat tidak dapat menerimanya. Ketiga, adanya keyakinan masyarakat bahwa di sekitar nagari tidak ada hutan lindung, yang ada hanya hutan ulayat. Oleh karena itu, tidak perlu dibuat reboisasi. Keempat, adanya provokator yang tidak menginginkan masuknya proyek GERHAN karena adanya kegiatan untuk memanfaatkan hutan dalam bentuk *illegal logging* dan menginginkan agar tanah ulayat lebih baik digunakan untuk untuk kebun sawit daripada untuk proyek penghijauan.

Sebaliknya, masyarakat Nagari Padang Matinggi menyatakan kesiapan agar wilayahnya dijadikan lokasi GERHAN maka direncanakan pertemuan di Muara Cibadak, Padang Matinggi dengan pihak Dinas Kehutanan Pasaman. Pada saat pertemuan terlihat animo masyarakat sangat tinggi karena dari  $\pm 120$  yang direncanakan hadir, ternyata yang datang lebih 300 orang. Hampir semua tokoh penting hadir dan sepakat menerima proyek GERHAN dengan alasan : pertama, reboisasi pernah dilaksanakan di Padang Matinggi pada tahun 1976-1984. Hasilnya padang ilalang yang luasnya  $\pm 10.000$  ha telah berubah menjadi hutan tusam sehingga banyak manfaat yang diterima masyarakat seperti udara segar dan sumber air. Lebih dari itu, hutan tusam sekarang sudah dapat dipanen getahnya. Setiap 1 kg getah pinus maka nagari mendapat *fee* sebesar Rp. 50,- (5%) karena harga 1 kg getah = Rp. 1.000,-. Pengalaman reboisasi pinus tahun 1976-1984 inilah sangat mengesankan bagi masyarakat. Kedua, tahun 1997 adalagi proyek padat karya dari Dinas Hutbun yang membagi bibit karet (*Havea brasiliensis*) sehingga tertanam  $\pm 25$  ha. Kini tanaman karet tersebut juga sudah menghasilkan getah. Ketiga, adanya lahan kritis yang cukup luas di wilayah nagari. Persoalan lahan kritis ini sudah terpikirkan, bahkan sudah diusulkan agar dihijaukan. Keempat, adanya lapangan kerja buat masyarakat dengan bekerja sebagai tenaga lapangan yang upahnya Rp. 20.000,-/orang/hari.

Berdasarkan empat alasan tersebut di atas maka proyek GERHAN di Padang Matinggi mendapatkan respon sangat positif dari masyarakat. Lebih dari 60% masyarakat turut berpartisipasi dalam program tersebut. Bukti lain adalah masyarakat tidak curiga pada program ini, padahal program ini sangat dicurigai oleh masyarakat di Binjai. Walaupun aktif berpartisipasi dalam kegiatan GERHAN namun partisipasi tersebut hanya sebatas pelaksana untuk mendapatkan upah. Dari Tabel (6) terlihat hanya 20,0% menyatakan ikut dalam perencanaan proyek dan hanya 10,0% yang turut dalam evaluasi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Padang Matinggi terlihat dominan dalam kegiatan pelaksanaan untuk mendapatkan upah kerja, sedangkan di Binjai tidak ada partisipasi sama sekali.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pada umumnya masyarakat telah mengetahui adanya hutan lindung di sekitar pemukimannya. Namun demikian, kawasan hutan lebih dikenal dengan nama “boswescen” daripada hutan lindung sehingga perlu sosialisasi untuk meluruskan pengertian tersebut ke arah yang sebenarnya. Lebih lanjut sebagian besar responden mengetahui batas kawasan hutan lindung karena adanya interaksi yang intensif dari masyarakat dalam memasukinya. Di samping itu, adanya tanaman reboisasi juga efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap batas kawasan. Berkaitan dengan hal ini maka batas berupa beton atau tanaman reboisasi penting dipelihara dan juga segera membuat batas baru pada lokasi yang rawan gangguan.
2. Sebagian besar karakter masyarakat yang hidup di sekitar hutan lindung adalah masyarakat asli yang lahir dan dewasa di desanya, berusia produktif, bekerja sebagai petani dengan pendapatan rata-rata Rp 500.000 - Rp 1.000.000/bulan, berpendidikan rendah, mempunyai jumlah anggota keluarga lebih dari dua orang, dan rata-rata memiliki lahan. Kehidupan sosial mereka diwarnai oleh batasan-batasan adat yang ketat dengan dominasi peran dari lembaga “nirik mamak”. Pandangan masyarakat terhadap hutan dipengaruhi oleh pandangan “nirik mamak”. Jika pandangan “nirik mamak” positif maka besar kemungkinan pandangan masyarakat terhadap hutan pun akan positif. Sebaliknya akan negatif jika pandangan “nirik mamak” negatif.
3. Partisipasi masyarakat dapat meningkat jika kegiatan proyek dalam hutan lindung memberikan keuntungan finansial bagi masyarakat. Di Padang Matinggi partisipasi lebih baik dibandingkan dengan di Nagari Banjai karena di Padang Matinggi kegiatan proyek reboisasi telah nyata memberikan peningkatan pendapatan keluarga. Sedangkan di Binjai masyarakat belum mendapatkan pengalaman kegiatan reboisasi sehingga tidak dapat secara langsung mendukung kegiatan pembangunan kawasan hutan lindung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1998. Buku Pedoman Kehutanan Indonesia. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Anonim, 1999. Penyempurnaan Data Dasar Kawasan Lindung Serta Perencanaan Teknis Pengelolaan Cagar Alam dan Daerah Penyangga. Proyek Bantuan Pengelolaan Kawasan Lindung DATI I Sumatera Barat. Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Padang.
- Anonim, 2004. Laporan Tahunan Hasil Penelitian Tahun 2003 Buku II. Badan Litbang Kehutanan, Departemen Kehutanan. Jakarta. Hal 117-123.
- Bahruni. 1992. Perencanaan Proyek Pengembangan Manfaat Intangible Sumberdaya Hutan. Laboratorium Politik Ekonomi dan Sosial Kehutanan. Jurusan Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Ginoga, K.L., 2003. Kajian Sosial Ekonomi Pengelolaan Hutan Lindung. Proposal Penelitian Terpadu (PPT). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi

Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan. Bogor.

Singarimbun, M. dan Sopian E., 1989. Metode Penelitian Survey. LP3ES, Jakarta.

Terra, Malik dan Wali Nagari Padang Matinggi (2004), Wawancara Pribadi. Lubuk Sikaping, Pasaman.

Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

**ANALISIS PARTISIPASI PADA PROGRAM HUTAN  
KEMASYARAKATAN  
(STUDI KASUS DI KOTO PANJANG, RIAU)  
(Participation Analisis of Community Forestry Program :  
Case Study in Koto Panjang, Riau)**

Oleh / By :  
Yanto Rochmayanto, Dodi Frianto & Edi Nurrohman

**ABSTRACT**

*Participation is an importance social resources to success a village development program. Successful size of CF program not only biophysical dimension, but also behaviors changing. Study result in Koto Panjang showed that level of community participation were low, and it was classified as participation for incentive level. Community participation were form as an opinion and service/ labor, both were gave on 3 step of CF developing: planning, executing, evaluating.*

*Participation is influenced by internal factors (perception, utility distribution, ages and revenues) and external factors (incentive and communication). Revenues and communication give a significant influences to behavior differences between the village. Even though the general tendency showed that community of Tanjung Alai more participative than Tanjung. Effort to increase participation can approached by optimalization of motorial organization and sharpness of CF and permanent farm system. Community building must be do continuously and spread with persuasive approach method. Revise of CF concept about goal, orientation, process and frame work is necessary to increase the participative forest resources management.*

*Key words : participation, community, Community Forestry (CF)*

**ABSTRAK**

Partisipasi merupakan sumber daya sosial yang sangat berperan besar dalam mensukseskan suatu program pembangunan pedesaan. Ukuran keberhasilan program hutan kemasyarakatan bukan hanya dari dimensi biofisik, tetapi juga perubahan perilaku. Hasil penelitian di Koto Panjang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat relatif rendah, diklasifikasikan sebagai tingkat partisipasi untuk insentif. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemikiran dan tenaga/jasa, yang keduanya diberikan pada 3 tahapan pembangunan HKM : perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal (persepsi, manfaat, umur dan pendapatan) dan faktor eksternal (insentif dan komunikasi). Faktor insentif dan komunikasi memberikan pengaruh nyata pada perbedaan perilaku partisipasi di kedua desa. Sedangkan kecenderungan secara umum adalah masyarakat Desa Tanjung Alai lebih partisipatif dari masyarakat Tanjung. Upaya meningkatkan partisipasi dapat didekati dari optimalisasi organisasi penggerak serta penajaman persepsi HKM dan sistem pertanian menetap. Pembinaan harus dilakukan terus-menerus dan merata dengan metode pendekatan persuasif. Perbaikan konsep HKM tentang target, orientasi, proses dan *frame work* perlu dilakukan menuju pengelolaan sumber daya hutan yang partisipatif.

Kata kunci : partisipasi, masyarakat, hutan kemasyarakatan (HKM).

---

<sup>1</sup>Loka Litbang Hasil Hutan Bukan Kayu

## I. PENDAHULUAN

Hutan kemasyarakatan merupakan pola baru dalam rezim pengelolaan hutan di Indonesia yang berakar pada konsepsi *community based*. Oleh karena itu partisipasi menjadi elemen kunci pada program hutan kemasyarakatan (HKm).

Dalam konteks pembangunan yang bernuansa pemberdayaan masyarakat seringkali parameter-parameter fisik bukan faktor yang ideal untuk mengukur seberapa besar keberhasilan penerapan program. Ada indikator lain yang lebih relevan dijadikan acuan, yaitu partisipasi. Sebab partisipasi adalah simbol dukungan secara fisik dan psikologis terhadap keputusan dan kebijakan formal.

Hutan kemasyarakatan yang dibangun berdasarkan konsep pengelolaan hutan partisipatif, ukuran keberhasilannya tidak hanya dari seberapa tinggi persen tumbuh tanaman, berapa luas lahan kritis berhasil dihijaukan, atau berapa banyak produk yang dihasilkan. Tetapi ada yang lebih substansial dari ukuran-ukuran fisik tersebut, yaitu seberapa jauh keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan ini.

Oleh karena itu, penilaian dan evaluasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan menjadi sangat penting. Kegiatan ini akan mengulas sampai sejauh mana efektifitas program HKm dalam mendukung dan meningkatkan partisipasi pada pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi : (1) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada program HKm, (2) tingkat partisipasi masyarakat dalam program HKm, dan (3) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam program HKm

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi para pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk membenahi bagian-bagian yang belum relevan, (apakah pada mekanisme aplikasi program, para pelaksana, konsepsi yang belum sempurna, atau karakteristik masyarakat). Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan instropeksi untuk membenahan bentuk dukungan terhadap program yang berbasis masyarakat.

## II. METODOLOGI

### A. Kerangka Analisis

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kualitatif analisis, yaitu mendeskripsikan hasil yang diperoleh atas pokok masalah berupa sistem kelembagaan HKm. Selanjutnya penelitian dilaksanakan dengan pendekatan survey pada program HKm dengan mengambil 2 desa sebagai pilot proyek pembangunan HKm atas dana bantuan OECF tahun 2000. Desa tersebut yaitu Desa Tanjung dan Desa Tanjung Alai yang terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau.

Partisipasi masyarakat pada kegiatan HKm di kedua desa tersebut dianalisa dengan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif serta statistik non parametrik.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada program HKm didekati dengan cara mengobservasi kegiatan masyarakat dan mengidentifikasi substansi yang diberikan masyarakat dalam keikutsertaannya pada pembangunan dan pengelolaan HKm. Selain itu, keikutsertaan masyarakat tersebut diidentifikasi pada beberapa tahapan pembangunan HKm yang dikelompokkan menurut fungsi manajemen, yaitu *planning*

(perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengendalian).

Tingkat partisipasi masyarakat pada program HKm didekati dari perhitungan frekuensi atau persentase pada masing-masing bentuk partisipasi dan pada masing-masing tahapan pembangunan HKm. Penggolongan tingkat partisipasi dibedakan menurut kriteria sebagai berikut:

1. Apabila frekuensi keterlibatannya setara dengan 75% atau lebih menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi,
2. Apabila frekuensi keterlibatannya antara 50% - 74.99% menunjukkan tingkat partisipasi yang sedang,
3. Apabila frekuensi keterlibatannya di bawah 50% lebih menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah.

Perbedaan perilaku partisipasi pada kedua desa menurut bentuk dan tahapannya dapat diperbandingkan dengan pendekatan analisis *chi square*, sehingga dapat diketahui apakah perilaku partisipasi antara kedua desa tersebut berbeda secara signifikan atau memiliki pola partisipasi yang relatif sama.

Selanjutnya, diidentifikasi sejumlah faktor internal dan eksternal yang diduga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program HKm. Tingkat pengaruhnya didekati menurut frekuensi dan prosentase, sedangkan perbedaan perilaku faktor-faktor tersebut dalam hubungannya dengan kemampuan memberikan pengaruh terhadap partisipasi di kedua desa dianalisa melalui pendekatan *chi square*.

## B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan kuisioner, yang berisi daftar pertanyaan terstruktur sesuai dengan variable yang akan dianalisa. Responden yang terpilih sebanyak 67 orang peserta HKm yang ditetapkan secara acak sederhana. Digunakan juga wawancara dan diskusi kelompok untuk menjangkit data dan informasi yang menyangkut kemauan dan kemampuan berpartisipasi. Disamping itu untuk melihat realita pelaksanaan HKm diadakan observasi secara langsung dilapangan dan studi dokumentasi.

## C. Metode Analisa Data

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif analisis, karena bertujuan mendiskripsikan hasil yang diperoleh atas kajian dari pokok masalah. Untuk mengetahui hubungan antar variable digunakan uji statistik kai kuadrat dengan formula koreksi Yates (Simon, 1996 dan Sugiyono, 2002) :

$$X^2 = \frac{n (|ac-bd| - 1/2 n)^2}{(a+b)(a+c)(b+d)(c+d)}$$

Keterangan:

X<sup>2</sup> : Nilai kai kuadrat

a : Frekuensi pada kategori 1, kelompok 1

b : Frekuensi pada kategori 2, kelompok 1

c : Frekuensi pada kategori 1, kelompok 2

d : Frekuensi pada kategori 2, kelompok 2

n : Jumlah sampel

Nilai kai kuadrat hitung dibandingkan dengan nilai kai kuadrat tabel pada taraf nyata 0,05, dengan kriteria keputusan : jika  $X^2$  hitung  $>$   $X^2$  tabel, maka hipotesis awal diterima (perilaku partisipasi berbeda nyata pada kedua desa), sedangkan jika  $X^2$  hitung  $<$   $X^2$  tabel, maka hipotesis awal ditolak (artinya perilaku partisipasi tidak berbeda nyata pada kedua desa).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk-bentuk Partisipasi

HKm Koto Panjang secara administratif terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. HKm Koto Panjang merupakan *pilot project* pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Propinsi Riau yang dibangun pada tahun 1999.

Lokasi HKm tersebar pada 2 (dua) desa yaitu Desa Tanjung dan Desa Tanjung Alai, masing-masing seluas 903,80 ha dan 1096,42 ha. Keduanya merupakan areal penyangga bendungan Koto Panjang dengan ketinggian tempat berkisar antara 115-140 mdpl. Keadaan tofografinya secara umum curam sampai dengan sangat curam dengan kemiringan 40% sampai dengan 70%.

Dari hasil identifikasi diketahui bahwa secara umum terdapat dua bentuk partisipasi masyarakat dalam program HKm, yaitu (1) partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, ide, pendapat, kritik dan saran, (2) partisipasi dalam bentuk sumbangan jasa/tenaga. Di kedua desa tidak diketemukan sama sekali partisipasi dalam bentuk materi atau uang, karena memang segala sesuatunya disubsidi oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan melalui BPDAS Indragiri Rokan, Pekanbaru.

Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemikiran maupun tenaga atau jasa dituangkan dalam 3 (tiga) tahapan pembangunan HKm, yaitu :

1. Tahap Perencanaan meliputi : pemilihan jenis, penentuan lokasi garapan, musyawarah-musyawarah, pelatihan teknis dan manajemen, pembentukan kelembagaan (pengorganisasian) HKm.
2. Tahap Pelaksanaan meliputi : persiapan lahan, persiapan bahan tanaman, penanaman, pemeliharaan (penyulaman, pemupukan, penyiangan dan penanggulangan hama dan penyakit).
3. Tahap Pengendalian meliputi : monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan, pertumbuhan tanaman dan kinerja kelompok tani HKm.

Temuan bentuk partisipasi di atas sejalan dengan pengertian partisipasi menurut Awang (2003), yaitu keterlibatan aktif dan bermakna dari masa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, seperti : (a) dalam proses pembentukan keputusan untuk tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber dayanya, (b) pelaksanaan program/proyek secara sukarela, dan (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program/proyek.

Kaitannya dengan partisipasi pembangunan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, dalam hal ini pembangunan di bidang kehutanan, maka partisipasi masyarakat tersebut di atas dapat dilihat dari tiga pandangan : (a) cara pandang dimana partisipasi merupakan pembagian masal dari hasil-hasil pembangunan, (b) cara pandang dimana masyarakat secara masal telah menyumbang jerih payah dalam pembangunan, dan (c) partisipasi harus terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam pembangunan (Awang, 2003).

## B. Tingkat Partisipasi Masyarakat

### 1. Gambaran Umum Partisipasi Masyarakat

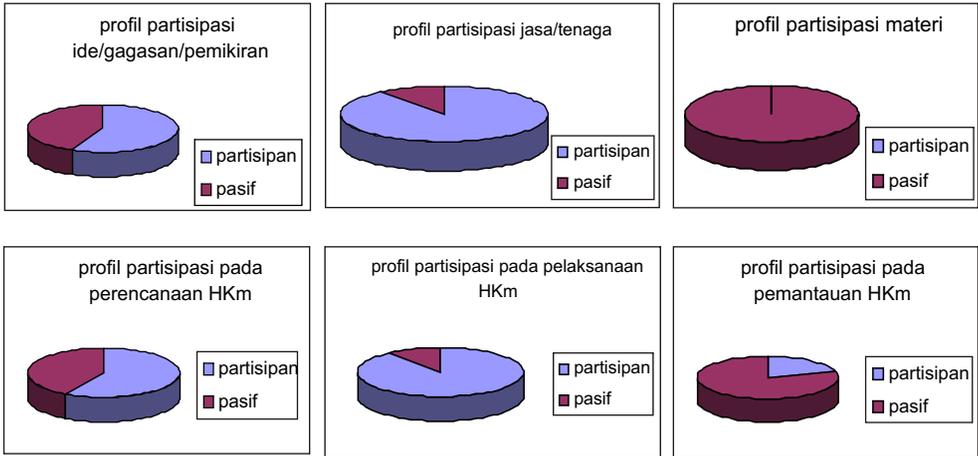
Menurut bentuk keterlibatannya pada program HKm, partisipasi dalam bentuk pemikiran secara umum di kedua desa menunjukkan derajat keterlibatan sedang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2, sebanyak 56.72% responden menunjukkan keterlibatannya, dan sisanya 43.28% tidak terlibat pada proses transformasi gagasan dan perancangan HKm.

Kondisi demikian berkaitan erat dengan pemahaman/persepsi masyarakat (personal maupun kelompok) terhadap program Hutan Kemasyarakatan. Semakin baik persepsi masyarakat akan tujuan, mekanisme, konsep pembagian hak dan kewajiban, serta masalah teknis dan metode HKm akan semakin mendukung motivasi setiap komponen masyarakat untuk memberi andil dalam proses penyusunan kerangka HKm bagi kepentingan mereka sendiri.

Dampak dari tingkat persepsi terhadap HKm dan partisipasi dalam bentuk pemikiran (atau dalam proses perencanaan HKm) sangat nyata pada tinggi rendahnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program HKm secara fisik. Tabel 2 menunjukkan bukti ini, bahwa ternyata pada kelompok masyarakat yang mengalami hambatan persepsi mengakibatkan rendahnya partisipasi pada bentuk pemikiran (proses perencanaan), dan berdampak langsung pada rendahnya partisipasi pada tahap pelaksanaan HKm (atau partisipasi dalam bentuk jasa/tenaga). Tetapi sebaliknya, pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat persepsi dan tingkat partisipasi pemikiran lebih baik, menyebabkan partisipasi pada proses pelaksanaan HKm lebih memuaskan.

Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemberian jasa/tenaga menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi (89.55%). Artinya masyarakat secara aktif terlibat pada pekerjaan-pekerjaan lapangan seperti pada kegiatan persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman HKm. Keadaan demikian dipicu oleh 2 (dua) hal pokok, yaitu insentif dan kebutuhan penduduk akan lahan dan pekerjaan. Tetapi daya tarik utama keikutsertaan ini adalah adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa upah persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan lain-lain sehingga seolah-olah masyarakat mendapatkan upah dari pekerjaan di lahan yang dikelolanya sendiri.

Sedangkan pada tahap pemantauan, memperlihatkan tingkat partisipasi yang relatif rendah. Pada umumnya pelaksana proyek HKm hanya melibatkan para ketua kelompok, aparat pemerintahan setempat dan para pemangku adat saja untuk melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian HKm. Oleh karena itu, proses perubahan dan perbaikan terhadap proses implementasi HKm di lapangan belum menjawab secara utuh bagi seluruh pelaku HKm.



Gambar 1. Profil partisipasi berdasarkan bentuk pengorbanan dan tahapan pembangunan HKm.

Figure 1. Profile of participation based on offering form and step of CF establishment

Ketika pola partisipasi HKm ditelaah pada masing-masing tahapan pembangunan HKm, secara umum menunjukkan tingkatan yang beragam. Partisipasi masyarakat cenderung tinggi (89.55%) pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat cenderung sedang (58.21%) pada tahap perencanaan, dan partisipasi masyarakat cenderung lemah (20.90%) pada tahap pemantauan.

Berdasarkan gambaran di atas selanjutnya pola partisipasi masyarakat peserta HKm di Koto Panjang dapat didefinisikan sesuai matriks berikut :

## 2. Perbandingan Perilaku Partisipasi pada Kedua Desa

Di kedua desa terdapat perbedaan perilaku partisipasi bentuk pemikiran yang sangat nyata, ditandai dengan nilai kai kuadrat sebesar 46,21. kecenderungan yang terjadi ternyata di masyarakat Tanjung keterlibatannya relatif rendah, sedangkan di Tanjung Alai cenderung terlibat seluruhnya. Demikian halnya perilaku partisipasi bentuk jasa/tenaga, masyarakat Tanjung Alai lebih kompak dari pada masyarakat Tanjung. Latar belakang pemahaman masyarakat terhadap program HKm ini ternyata memberikan pengaruh cukup besar bagi motivasi mereka pada keikutsertaannya mensukseskan program HKm.

Guna mengantisipasi kondisi diatas diperlukan upaya perubahan pola pendekatan, terutama di Desa Tanjung, dalam implementasi dan sosialisasi kegiatan-kegiatan hutan kemasyarakatan.

Tabel 1. Matriks Pola Partisipasi Masyarakat Hutan Kemasyarakatan Koto Panjang  
 Table 1. Matrix of people participation model in Community Forestry of Koto Panjang

Tingkat partisipasi masyarakat	Bentuk partisipasi	Tahapan pembangunan HKm	Uraian
Tinggi	Jasa/tenaga	Pelaksanaan HKm	Masyarakat banyak turut serta pada pekerjaan-pekerjaan lapangan pembangunan HKm, yaitu pada kegiatan pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Daya tarik utama keikutsertaan ini adalah adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah, sehingga seolah-olah masyarakat mendapatkan upah dari pekerjaan di lahan yang dikelolanya sendiri.
Sedang	Ide/gagasan/pemikiran.	Perencanaan	Lebih dari 50% peserta HKm menunjukkan keikutsertaannya pada sejumlah kegiatan perencanaan HKm Koto Panjang, seperti pada kegiatan pemilihan jenis, pola tanam, penentuan lokasi garapan, pelatihan teknis dan manajemen, pembentukan kelembagaan (pengorganisasian) HKm. Masyarakat menyumbangkan ide, gagasan dan pemikirannya pada acara-acara musyawarah kelompok, pertemuan internal, rapat koordinasi dengan pelaksana proyek HKm.
Kecil	-	Pemantauan	Sebagian kecil peserta HKm terlibat secara aktif pada kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan, pertumbuhan tanaman dan kinerja kelompok tani HKm. Pada umumnya pelaksana proyek HKm hanya melibatkan para ketua kelompok, aparat pemerintahan setempat dan para pemangku adat saja untuk melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian HKm.
Tidak ada	Materi	-	Tidak ada pengorbanan materi dari masyarakat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan/pengendalian HKm. Kondisi ekonomi masyarakat peserta HKm pada umumnya berpendapatan relatif rendah, dengan mata pencaharian sebagai petani.

Tabel 2. Tingkat partisipasi masyarakat menurut bentuk keterlibatannya  
 Table 2. Community participation level based on form of part

Nama Desa (Name of village)	Tingkat keterlibatan dalam bentuk (participation level in form)												Jumlah (Total)
	Pikiran (Idea)				Jasa/Tenaga (Service/Force)				Materi (Goods)				
	Banyak (More)		Tdk/ Kurang (No/Less)		Banyak (More)		Tdk/ Kurang (No/Less)		Banyak (More)		Tdk/ Kurang (No/Less)		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Tanjung	5	14,71	29	85,29	27	79,41	7	20,59	0	0,00	34	100	34
Tanjung Alai	33	100	0	0,00	33	100	0	0,00	0	0,00	33	100	33
Jumlah	38	56,72	29	43,28	60	89,55	7	10,45	0	0,00	67	100	67
Nilai (X <sup>2</sup> )	46.21*				5.55*				-ε-				

Keterangan (Remarks) :

\* : Berbeda nyata pada 0.05 = 3.481 (Significantly difference at 0.05 = 3.481)

f : frekuensi (frequency)

Menurut perhitungan statistik tampak bahwa masyarakat Tanjung kurang banyak dilibatkan pada tahap perencanaan pembangunan HKM. Partisipasinya sangat lemah, tidak seperti masyarakat Tanjung Alai yang cenderung terlibat seluruhnya. Keadaan ini sejalan dengan keterlibatan mereka dalam bentuk pemikiran yang telah diuraikan diatas. Lemahnya keterlibatan masyarakat Tanjung dalam tahap perencanaan ini menyebabkan ide, gagasan, pemikiran, kritik dan saran tidak bisa tersalur secara optimal.

Pada tahap pelaksanaan, perilaku partisipasi di kedua desa juga menunjukkan pola yang berbeda walaupun secara umum tingkat keterlibatannya relatif tinggi. Pada tahap ini sekitar 89.55% berpartisipasi dan sisanya 10.45% kurang berpartisipasi. Sementara pada tahap perencanaan tingkat keterlibatannya hanya 58.21% terlibat dan 41.79% kurang terlibat, kecenderungannya para peserta kelompok tani HKM di Tanjung Alai lebih partisipatif jika dibandingkan dengan di Tanjung. Tahap pelaksanaan ini berhubungan erat dengan partisipasi dalam bentuk tenaga karena kegiatan HKM menuntut kemauan kerja yang tinggi.

Kelemahan yang paling utama partisipasi pelaksanaan HKM, berdasarkan survey, wawancara langsung dan diskusi kelompok, terletak pada kegiatan pemeliharaan. Karena terjadi perbedaan selera sosial dengan petunjuk teknis pembangunan HKM dari Departemen Kehutanan. Hal ini dilatar belakangi oleh budaya sistem perladangan berpindah yang masih kental pada sisi kehidupan masyarakat. Dalam pengetahuan teknis mereka kaidah pengelolaan lahan adalah dengan pembakaran, pembersihan total dan tanpa pemupukan yang kesemuanya bertolak belakang dengan juknis dan pembinaan pemerintah.

Menyikapi fenomena ini diperlukan perubahan pola pendekatan dan intensifikasi pendampingan serta pembinaan kerja, yang lebih diarahkan pada kelompok masyarakat desa Tanjung.

Tabel 3. Tingkat partisipasi menurut tahapan program HKm

Table 3. Participation level based on step of CF program

Nama Desa (Name of village)	Tingkat keterlibatan pada tahapan (Participation level in step)												Jumlah (Total)
	Perencanaan (Planning)				Pelaksanaan (Actuating)				Pemantauan (Controlling)				
	Banyak (More)		Tdk/ Kurang (No/Less)		Banyak (More)		Tdk/ Kurang (No/Less)		Banyak (More)		Tdk/ Kurang (No/Less)		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Tanjung	6	17,65	28	82,35	27	79,41	7	20,59	1	2,94	33	97,06	34
Tanjung Alai	33	100	0	0,00	33	100	0	0,00	13	39,39	20	60,61	33
	39	58,21	28	41,79	60	89,55	7	10,45	14	20,90	53	79,10	67
Nilai (X <sup>2</sup> )	43.36*				5.55*				11.35*				

Perilaku partisipasi pada tahap pemantauan belum menyetuh seluruh lapisan sosial. Pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi terbatas hanya pada perangkat organisasi HKm (Koordinator dan ketua kelompok). Lebih dari itu, ternyata di Desa Tanjung tingkat partisipasi pengurus tersebut sangat lemah (2,94%) jika dibandingkan dengan di Tanjung Alai dengan tingkat partisipasi sebesar 39,39%. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi, pelibatan “ninik mamak” dan seluruh peserta HKm harus dibuka lebar-lebar.

### C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam suatu program pemerintah sebagaimana dalam penelitian Rusli (2001) tentang partisipasi masyarakat dalam program gerbang sari di Kabupaten Indragiri Hulu, dipengaruhi oleh faktor internal yang diasumsikan sebagai kemampuan berpartisipasi, dan faktor eksternal yang diasumsikan sebagai faktor penggerak (dinamika organisasi dan penyuluhan/komunikasi).

Mencermati perilaku partisipasi pada program HKm secara holistik dalam bentuknya dan dalam tahapan program, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Tanjung dan Tanjung Alai masih relatif rendah dan berjalan alami sesuai dengan keadaan internal masyarakat. Keadaan tersebut terlihat dari hasil uji statistik terhadap 4 faktor internal yaitu persepsi, distribusi manfaat, umur dan pendapatan.

Dari keempat faktor internal di atas hanya pendapatan yang memberikan hubungan nyata dengan partisipasi, sedangkan 3 faktor lainnya tidak memiliki hubungan nyata. Faktor lainnya, sebagai penggerak partisipasi dari luar (eksternal) yang memiliki hubungan nyata dengan partisipasi masyarakat adalah komunikasi (penyuluhan, pelatihan, pendampingan).

Beberapa hal yang menarik dari hasil telaah faktor-faktor internal dan eksternal ini adalah :

Tabel 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Table 4. Factors that influences to participation

Nama Desa (Name of village)	Nilai X <sup>2</sup> Faktor (Value of X <sup>2</sup> from factor)																							
	Insentif (Incentive)				Komunikasi (Communication)				Persepsi (Perception)				Manfaat (Benefits)				Umur (Age)				Pendapatan (Revenue)			
	T		R		T		R		T		R		T		R		T		R		T		R	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Tanjung	34	100	0	0,00	13	38,24	21	61,76	10	29,41	24	70,59	14	41,18	20	58,82	9	26,47	25	75,53	1	2,94	33	97,06
Tjg Alai	33	100	0	0,00	33	100	0	0,00	10	30,30	23	69,70	10	30,30	23	69,70	4	12,12	29	87,88	13	39,39	20	60,61
Jumlah	67	100	0	0,00	46	68,66	21	31,34	20	29,85	47	70,15	24	35,82	43	64,18	13	19,40	54	80,60	14	20,90	53	79,10
(X <sup>2</sup> )	0				26.887*				0.035				0.453				1.383				11.347*			

Keterangan (Remarks) :

\* : Berbeda nyata pada 0.05 = 3.481 (Significantly difference at 0.05 = 3.481)

T : Tinggi (High)

R : Rendah (Low)

f : frekuensi (Frequency)

1. Persepsi masyarakat mengenai HKm sangat lemah. Pola pertanian menetap yang menjadi dasar sistem kerja HKm belum mampu mengubah persepsi sistem perladangan berpindah pada setiap bentuk pengelolaan lahan. Yang paling buruk adalah persepsi *project oriented* yang menganggap bahwa program HKm adalah proyek, yang segala sesuatunya diukur dengan besaran finansial.
2. Masyarakat kurang merasakan manfaat HKm. Hal ini akibat dampak nyata HKm terhadap pendapatan (hasil sadapan karet, buah-buahan dan kayu komersil) baru bisa diperoleh 5-7 tahun sejak penanaman. Sementara tawaran tumpangsari di antara tanaman keras tidak optimal dilakukan untuk menutupi kebutuhan rutin setiap bulan.
3. Partisipasi di kedua desa terjadi akibat adanya insentif atau subsidi dari Departemen Kehutanan pada setiap kegiatan (pengadaan bahan maupun upah kerja). Berkaitan dengan persepsi dan penerimaan manfaat, adanya insentif secara bersama membentuk suatu pemahaman di masyarakat dimana mereka mau bekerja atau berpartisipasi hanya apabila tersedia insentif.

Menurut tingkatan partisipasi Hobbly (1996) dalam Awang (2003) karakter partisipasi di atas dapat digolongkan sebagai tingkat partisipasi untuk insentif. Kelemahan partisipasi model ini adalah jika insentif telah habis maka program dan teknologi yang digunakan tidak akan berlanjut. Sebagai suatu metode stimulasi, pendekatan insentif memang ada baiknya, tetapi perlu diwaspadai agar tidak menyebabkan ketergantungan.

Dengan demikian, yang sangat diperlukan sekarang adalah upaya menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sumber daya hutan, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat menuju partisipasi mandiri.

Tabel 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi dan Implikasinya  
*Table 5. Factors that influences to participation and their implication*

Faktor	Nilai X <sup>2</sup>	Kesimpulan	Kecenderungan	Saran
Insentif	-ε-	Tak terdefiniskan	Partisipasi pada kedua desa terjadi karena adanya insentif .	Harus disiapkan cara lain untuk mendidik masyarakat supaya tidak tergantung pada insentif.
Komunikasi	26,887	Perilaku partisipasi pada kedua desa berbeda nyata dari pengaruh komunikasi.	Komunikasi proyek HKm di Tanjung dianggap kurang oleh masyarakatnya. Di Tanjung Alai komunikasi relatif menyeluruh.	Penajaman dan perubahan pendekatan komunikasi di Desa Tanjung.
Persepsi	0,035	Perilaku partisipasi di kedua desa tidak ber-beda nyata dari pengaruh persepsi.	Persepsi tentang HKm umumnya rendah di kedua desa.	Pemahaman HKm dan system pertanian menetap perlu ditingkatkan.
Manfaat	0,453	Perilaku partisipasi di kedua desa tidak ber-beda nyata berdasarkan pengaruh dari manfaat HKm.	Kedua kelompok masyarakat masih menganggap manfaat HKm kurang, terutama dari sisi ekonomi.	Perlu adanya aneka usaha jangka pendek untuk menutup kebutuhan rutin.
Umur	1,383	Perilaku Partisipasi di kedua desa tidak ber-beda nyata dari pengaruh tingkat umur.	Para peserta HKm di kedua desa mayoritas berusia 50 tahun ke bawah.	Sasaran peserta dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya mengarah ke kelompok usia muda.
Pendapatan	11,347	Perilaku partisipasi di kedua desa berbeda nyata dari pengaruh tingkat pendapatan.	Masyarakat Tanjung yang tingkat pendapatannya rendah lebih banya berpartisipasi dibandingkan dengan masyarakat Tanjung Alai.	Sasaran peserta di Tanjung Alai sebaiknya lebih diarahkan pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 6. Tingkatan dan Karakter Partisipasi

Table 6. Levels and Characters of Participation

Tingkat (Level)	Nama partisipasi (Name of participation)	Karakter (Character)
1.	Manipulasi Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersifat keterwakilan</li> <li>• Tidak berbasis pada partisipasi individu</li> </ul>
2.	Partisipasi Pasif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi pada apa yang telah diputuskan</li> <li>• Informasi dari administrator tanpa perlu respon masyarakat atas keputusan/informasi</li> </ul>
3.	Partisipasi Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi rakyat dengan konsultasi, menjawab pertanyaan.</li> <li>• Definisi masalah, pengumpulan informasi dan analisa pengambilan keputusan bukan oleh masyarakat.</li> </ul>
4.	Partisipasi untuk insentif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan sumber daya,, pangan, pendapatan atau insentif material lainnya.</li> </ul>
5.	Partisipasi Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi dipandang dari luar masyarakat sebagai tujuan akhir untuk mencapai target.</li> </ul>
6.	Partisipasi Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan lembaga lokal.</li> <li>• Partisipasi sebagai suatu hak.</li> <li>• Pengambilan keputusan bersifat lokal oleh kelompok masyarakat..</li> </ul>
7.	Partisipasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inisiatif secara independen</li> <li>• Pihak luar merupakan <i>advisor</i>.</li> </ul>

Sumber (Source) : Awang, 2003 (diolah)

#### D. Reposisi Konsep Hutan Kemasyarakatan

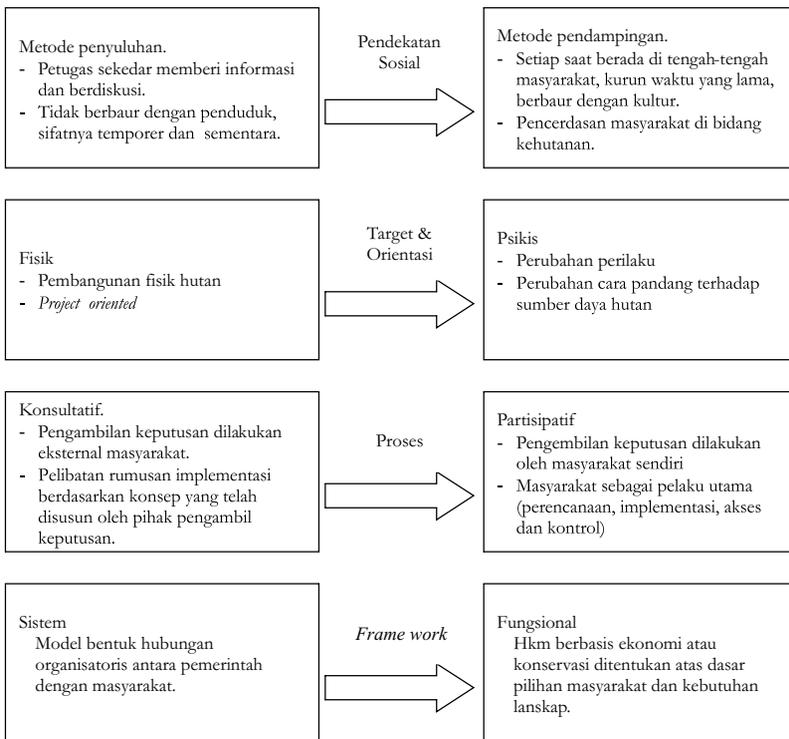
Banyak alasan untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, antara lain untuk : (a) merumuskan persoalan dengan lebih efektif, (b) mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah, (c) merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima, dan (d) membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian sehingga memudahkan penerapan (Bruce Mitchell, Setiawan, dan Rahmi, 2000).

Nilai penting tentang pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan dinyatakan juga oleh Iskandar (1999a). Menurutnya untuk mencapai manajemen hutan lestari diperlukan konsultasi dengan seluruh kelompok masyarakat. Proses ini sebaiknya bersifat terbuka dan terus menerus sekaligus sebagai proses pendidikan untuk mencapai kelestarian sumber daya hutan, kelestarian manfaat dari semua jenis hutan dan kelestarian bagi seluruh kelompok masyarakat.

Hal yang mendasar dalam pengelolaan hutan partisipatif adalah masyarakat diajak berpartisipasi, diajak pula memahami keuntungan dan pengorbanan yang harus dilakukan dalam kegiatan. Singkatnya, semua komponen masyarakat diberi informasi selengkap-lengkapannya (Iskandar, 1999b).

Sejalan dengan latar belakang tersebut dan sejumlah kelemahan implementasi HKm di Koto Panjang Riau, serta menuju partisipasi mandiri dalam pengelolaan sumber daya hutan, maka dipandang perlu melakukan reposisi konsep Hutan Kemasyarakatan. Konsep HKm yang dilakukan selama ini masih menitikberatkan pada pembangunan fisik, sehingga belum memberikan dampak terhadap perubahan perilaku dan cara pandang terhadap sumber daya hutan. Proses dan pendekatan pelibatan masyarakat itu sendiri masih belum tepat, karena upaya pelibatan tersebut bersifat konsultatif belaka. Pengambilan keputusan telah dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah, baru kemudian dibawa ke tengah masyarakat untuk dibahas dan merumuskan beberapa poin teknis implementasi di lapangan.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan serta mendorong situasi partisipatif dalam program Hutan Kemasyarakatan masa mendatang diperlukan metode pendampingan yang lebih efektif. Pendamping harus berada di tengah-tengah masyarakat dalam kurun waktu yang lama dan terus menerus, agar proses transfer pengetahuan berlangsung secara maksimal dan menumbuhkan kesadaran dari dalam baik personal maupun kultural mengenai pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan masyarakat. Lebih jelas beberapa pemikiran pergeseran konsep Hutan Kemasyarakatan diuraikan pada diagram berikut ini.



Gambar 1. Reposisi konsep Hutan Kemasyarakatan

Figure 1. Reposition of Community Forestry Concept

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Terdapat 2 bentuk partisipasi masyarakat Desa Tanjung dan Tanjung Alai dalam program Hutan Kemasyarakatan, yaitu partisipasi dalam bentuk ide/gagasan/pemikiran dan jasa/tenaga. Keduanya diberikan pada 3 tahap pembangunan HKM, yakni : perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi masyarakat relatif rendah dalam bentuk pemikiran pada tahap perencanaan dan pemantauan HKM. Sedangkan pada tahap pelaksanaan HKM partisipasi masyarakat relatif tinggi dengan keterlibatan dalam bentuk jasa/tenaga. Berdasarkan karakternya maka partisipasi masyarakat pada program HKM di Koto Panjang ini tergolong tingkat partisipasi untuk insentif. Akan tetapi terdapat beberapa potensi masyarakat belum dimanfaatkan, yaitu organisasi penggerak belum bekerja secara maksimal, dan persepsi masyarakat tentang HKM serta sistem pertanian belum dibangun secara optimal.

### B. Saran

Untuk memperbaiki partisipasi masyarakat dalam program HKM dan program lainnya dalam konteks pengelolaan hutan partisipatif atau berbasis pada masyarakat, paling tidak diperlukan 3 perubahan mendasar. Pertama, meningkatkan pola partisipasi dalam segala bentuknya baik pikiran, jasa/tenaga maupun materi melalui pengubahan pendekatan insentif/subsidi menjadi pendekatan dana bergulir, dan memperbaiki orientasi HKM dengan mengutamakan konsep yang berorientasi hasil jangka pendek.

Kedua, perlu menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang operasional dan dampak HKM dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, penyuluhan, optimalisasi pendampingan, serta intensifikasi dan/atau perubahan pola pendekatan sosial. Pembinaan yang terus menerus, merata dan metode pendekatan yang preferentif akan sangat membantu meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat.

Ketiga, secara menyeluruh diperlukan reposisi konsep Hutan Kemasyarakatan, meliputi : (1) perubahan konsep pendekatan sosial dari metode penyuluhan ke pendampingan, (2) perubahan target dan orientasi dari fisik dan *project oriented* ke arah psikis yakni perubahan perilaku dan cara pandang, (3) perubahan pendekatan proses dari konsultatif menuju partisipatif, dan (4) perubahan *frame work* dari HKM berbasis sistem menuju HKM berbasis fungsi bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awang, San Afri. 2003. Politik Kehutanan Masyarakat. Kreasi Wacana bekerja sama dengan Center of Critical Social Studies. Yogyakarta.
- Iskandar, Untung, 1999a, Aplikasi Manajemen Teknologi Menuju Manajemen Hutan Lestari, Biagraf Publishing, Yogyakarta.
- , 1999b, Dialog Kehutanan dalam Wacana Global, Biagraf Publishing, Yogyakarta.

- Bruce Mitchell, Setiawan & Dwita Hadi Rahmi. 2000. Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Rusli, Zaili. 2001. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Jiana volumue 1 nomor 1. Edisi Juli 2001.
- Simon, Hasanu. 1996. Metode Inventore Hutan. Aditya Media. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2003. Statistik Non Parametrik untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.

**KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP KAWASAN  
TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT PASCA PELAKSANAAN  
KEGIATAN KONSERVASI TERPADU**  
*(Society Rely to Kerinci Seblat National Park Area  
Post of Implemented of Integrated Conservation Program)*

Kasus di Desa Napal Licin dan Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten  
Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan  
*(Case Study in Napal Licin Village and Pulau Kidak Village, Ulu Rawas Sub District,  
Musi Rawas District, South Sumatera Province)*

Oleh / By :  
Mamat Rahmat<sup>1)</sup>, Helmi<sup>2)</sup> & Rahmat Syahni<sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

*This research aimed to analyse impact of Integrated Conservation and Development Project (ICDP) program in Kerinci Seblat National Park (KSNP) area. ICDP program in KSNP management have started since 1998 year and have finished in 2002 year. Primary question raised are: did ICDP program decrease local society rely on the resources gained from KSNP area, did ICDP program affected to local society income from the resources outside the KSNP area, and what factors influenced pattern of buffer zone-village development in forwards?*

*The research was conducted in Napal Licin Village and Pulau Kidak Village, Ulu Rawas Sub District, Musi Rawas District, South Sumatra Province, part of buffer zone-village of KSNP. The results of this study show that ICDP program could not decrease society relied on KSNP area. ICDP program have not yet could degrade earnings of society from within area of KSNP, despitefully also not yet can improve earnings of society from outside area of KSNP.*

*In conservation of KSNP, shifting cultivation in KSNP area have to stopped. As the compensation, it's suggested to improve society accessed in special exploiting zone of TNKS legally. The accesed could be an alternative to society living pattern which not impacted to damage on KSNP area but gaining high economic value. Non intensive cultivation of rubber in special exploiting zone was better choice for the agenda of conservation KSNP area and also improve earnings of local society.*

*Key word : integrated Conservation and Development Project (ICDP), Kerinci Seblat National Park (KSNP), Local society rely.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan program *Integrated Conservation and Development Project* (ICDP) pada kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Program ICDP dalam pengelolaan TNKS telah dimulai sejak tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2002. Pertanyaan utama yang diajukan adalah apakah pelaksanaan program ICDP dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya di dalam kawasan TNKS dan sejauh mana pengaruh program ICDP serta faktor faktor-faktor sosial ekonomi lainnya terhadap pendapatan masyarakat, baik pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS maupun pendapatan dari luar kawasan TNKS sebagai alternatif pola pengembangan kedepan.

---

<sup>1)</sup> Calon Peneliti pada Balai Litbang Hutan Tanaman Palembang

<sup>2)</sup> Dosen Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Napal Licin dan Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan yang termasuk desa-desa penyangga TNKS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ICDP tidak dapat menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TNKS, terutama terhadap lahan perladangan. Pelaksanaan program ICDP belum mampu menurunkan pendapatan masyarakat dari dalam kawasan TNKS, disamping itu juga belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dari luar kawasan TNKS.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan konservasi TNKS, maka kegiatan perladangan di dalam kawasan TNKS harus dihentikan. Sebagai kompensasinya disarankan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan zona pemanfaatan khusus TNKS secara legal sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat yang tidak mengakibatkan kerusakan kawasan TNKS tetapi memiliki nilai ekonomi tinggi. Pola penanaman karet secara tradisional (non intensif) pada zona pemanfaatan khusus merupakan pilihan yang lebih baik dalam rangka pelestarian kawasan TNKS dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Kata-kata kunci : program Konservasi dan Pembangunan Terpadu, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Ketergantungan masyarakat lokal.

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, diantaranya adalah: 1). Perlunya mempertahankan keanekaragaman hayati; 2). Perlunya mencegah kerusakan sumberdaya alam yang dapat menimbulkan bencana; dan 3). Perlunya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar Taman Nasional. Ketiga tantangan tersebut juga dihadapi oleh Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Benturan kepentingan antara upaya-upaya konservasi dengan kehidupan masyarakat sekitar Taman Nasional seringkali terjadi. Menurut Salafsky dan Wollenberg (2000), masyarakat sekitar hutan pada umumnya menggantungkan hidupnya kepada alam yang terdapat di sekitar tempat tinggal mereka. Ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya di sekitarnya dapat memicu benturan kepentingan antara pengelola Taman Nasional dengan masyarakat sekitar.

Ketergantungan masyarakat sekitar terhadap sumberdaya hutan erat kaitannya dengan faktor sosial ekonomi rumah tangganya. Hasil penelitian Syahni *et al.* (2002), tentang tekanan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar hutan kawasan TNKS wilayah Propinsi Sumatera Barat, menunjukkan bahwa faktor pendidikan, luas kepemilikan lahan dan persepsi terhadap keberadaan TNKS, memberikan pengaruh nyata terhadap tekanan aktivitas ekonomi dalam bentuk perluasan lahan.

Dalam kaitan dengan tantangan dalam pengelolaan TNKS, telah dilakukan pengelolaan kawasan TNKS secara terpadu melalui program *Integrated Conservation and Development Project* (ICDP). Program ICDP dalam pengelolaan TNKS telah dimulai sejak tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2002. Program tersebut telah dilaksanakan pada 72 desa penyangga TNKS yang terdapat pada 4 wilayah propinsi.

Kegiatan-kegiatan ICDP-TNKS, dikelompokkan kedalam empat komponen. Dua komponen diantaranya berada di bawah kontrak dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, sedangkan dua lainnya dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (BANGDA), Departemen dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Depdagri, 2002).

Pengembangan wilayah pedesaan adalah salah satu komponen program yang berada di bawah kontrak dengan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Dalam implementasinya di lapangan, tujuan ini dijabarkan dalam bentuk Kesepakatan Konservasi Desa (KKD). KKD merupakan suatu kesepakatan antara masyarakat desa dengan pihak pengelola TNKS dan pemerintah secara umum, yang berisi kesepakatan masyarakat desa untuk mendukung pengamanan, pelestarian TNKS serta mendukung proses pembangunan melalui strategi pembangunan desa yang berwawasan lingkungan (Depdagri, 2002).

Setelah berakhirnya pelaksanaan program ICDP, muncul beberapa pertanyaan berkaitan dengan dampak dari pelaksanaan program tersebut. Rumusan pertanyaan tersebut adalah: apakah pelaksanaan program ICDP dapat mempengaruhi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya di dalam kawasan TNKS; dan sejauh mana program tersebut dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS maupun dari sumberdaya di luar kawasan TNKS atau dari sumberdaya di dalam kawasan yang bersifat tidak merusak ekosistem TNKS. Selain pengaruh pelaksanaan kegiatan ICDP, apakah variabel-variabel sosial ekonomi lainnya, seperti diungkapkan Syahni *et al.* (2002), juga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dari dalam dan dari luar kawasan TNKS?

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Napal Licin dan Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan yang termasuk desa-desa penyangga TNKS. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan Desa Napal Licin sebagai kasus desa yang mendapat fasilitasi program ICDP, sedangkan Desa Pulau Kidak sebagai kasus desa yang tidak mendapat fasilitasi program ICDP. Menurut Balai TNKS (2002), kawasan penyangga TNKS di Kabupaten Musi Rawas, termasuk salah satu kawasan yang mengalami tekanan oleh kegiatan perladangan.

Unit sampel adalah rumah tangga dan respondennya adalah kepala rumah tangga. Penarikan sampel pada kedua lokasi penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *Stratified Random Sampling* (sampling acak berlapis). Menurut Supranto (2000), metode sampling acak berlapis dilakukan dengan cara menarik sampel secara acak di dalam stratumnya. Populasi rumah tangga masyarakat desa sampel dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan sumber penghasilan utama, yaitu: (1) Rumah Tangga Pertanian Tanaman Pangan; (2) Rumah Tangga Perkebunan; dan (3) Rumah Tangga Lainnya. Pada masing-masing kelompok diambil sampel secara proporsional dengan *intensitas sampling* 15 persen, yaitu besarnya sampel yang diambil tergantung kepada besarnya populasi, bila populasi besar maka jumlah sampel yang diambil juga besar dan demikian pula sebaliknya, sehingga sampel yang diambil dapat mewakili populasi yang ada. Jumlah sampel yang dipilih disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Desa lokasi penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel dan sumber penghasilan utama masyarakat pada setiap desa.

No.	Desa/Sumber Penghasilan Utama	Jumlah Populasi*) (RT)	Jumlah Sampel (RT)
1.	Desa Napal Licin		
	Petani Tanaman Pangan	175	27
	Petani Perkebunan	164	25
	Lainnya	29	5
	Jumlah	368	57
2.	Desa Pulau Kidak		
	Petani Tanaman Pangan	194	29
	Petani Perkebunan	163	25
	Lainnya	28	4
	Jumlah	385	58
Jumlah Total (Desa 1+ Desa 2)		753	115

\*) Sumber : Bappeda Kab. Musi Rawas dan BPS Kab. Musi Rawas (2002).

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Pebruari sampai dengan bulan April tahun 2005. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen pada pemerintahan desa, kecamatan dan dokumen yang tersedia pada Balai TNKS.

## 2. Teknik Analisis Data

### 2.1. Ketergantungan Masyarakat Desa Penyangga Terhadap Sumberdaya di dalam Kawasan TNKS

Pelaksanaan program ICDP dimaksudkan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di dalam kawasan TNKS yang bersifat merusak, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat melalui upaya pembangunan desa. Pelaksanaan kegiatan ICDP dapat dikatakan berhasil jika ketergantungan masyarakat desa yang mendapat fasilitasi kegiatan ICDP (desa ICDP) terhadap hasil dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan masyarakat desa yang tidak mendapat fasilitasi kegiatan ICDP (desa Non ICDP). Karena ketergantungan masyarakat desa penyangga di lokasi penelitian sebagian besar terhadap lahan perladangan dan kebun karet, maka dalam penelitian ini hanya membandingkan rata-rata luas ladang dan luas kebun karet yang dikelola responden di dalam kawasan TNKS pada kedua desa penelitian. Metoda Statistika untuk uji beda nyata yang digunakan adalah Uji *Kolmogorov-Smirnov*.

### 2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan dari Sumberdaya di Dalam Kawasan TNKS dan Di Luar Kawasan TNKS

Pengaruh pelaksanaan kegiatan ICDP terhadap ketergantungan pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS juga dapat dianalisis melalui analisis regresi linear berganda dengan memasukan variabel ICDP sebagai salah satu variabel bebas dan variabel tak bebasnya adalah pendapatan dari dalam kawasan TNKS. Variabel bebas lainnya adalah

faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pendapatan dari dalam kawasan TNKS berdasarkan penelitian terdahulu.

Variabel mata pencaharian tetap adalah salah satu faktor sosial ekonomi, yang mempengaruhi ketergantungan masyarakat terhadap TNKS. Mata pencaharian tetap diungkapkan Yusron dan Wardana (1993), bahwa apabila masyarakat memiliki mata pencaharian lain di luar kawasan TNKS, maka kurang tergantung terhadap sumberdaya di dalam kawasan TNKS. Mata pencaharian lain inilah yang didefinisikan sebagai mata pencaharian tetap diluar kawasan dalam penelitian ini. Selain itu, pendidikan dan luas penguasaan lahan juga dimasukkan sebagai variabel yang akan diuji. Variabel tersebut telah digunakan oleh Syahni *et al.* (2002) untuk mengetahui tekanan aktifitas ekonomi masyarakat terhadap kelestarian TNKS, serta secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tekanan perluasan lahan masyarakat pada kawasan TNKS.

Variabel luas penguasaan lahan, dalam penelitian ini dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis dan lokasi lahan yaitu: luas lahan sawah di dalam kawasan, sawah di luar kawasan, ladang di dalam kawasan, ladang di luar kawasan, kebun karet di dalam kawasan, kebun karet di luar kawasan, kebun campuran di dalam kawasan, dan kebun campuran di dalam kawasan. Karena di daerah penelitian tidak ditemukan sawah dan kebun campuran di dalam kawasan TNKS, maka kedua variabel tersebut tidak digunakan. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan ICDP juga dapat dianalisis dari pengaruh pelaksanaan kegiatan ICDP terhadap pendapatan responden dari sumberdaya di luar kawasan TNKS. Program ICDP dapat dikatakan berhasil, apabila pengaruh ICDP signifikan dan berbanding lurus terhadap pendapatan responden dari sumberdaya di luar kawasan TNKS.

Analisis pengaruh pelaksanaan ICDP dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya terhadap pendapatan dari dalam dan dari luar kawasan TNKS, juga dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel tak bebas yang diuji adalah pendapatan dari sumberdaya di dalam dan di luar kawasan TNKS. Variabel bebas yang digunakan di dalam model sama dengan variabel bebas yang digunakan pada pengujian pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS.

Pelaksanaan ICDP merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam pengujian model ini. Penggunaan variabel tersebut dilakukan untuk menguji pengaruh pelaksanaan program ICDP terhadap pendapatan dari dalam dan dari luar kawasan TNKS.

Hasil pengujian yang dilakukan diperoleh dua buah model, yang terdiri dari model regresi pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS (*Yibb*) dan model regresi pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS (*Yibnb*). Model *Yibb* dimaksudkan untuk menguji pengaruh pelaksanaan program ICDP dan variabel-variabel sosial ekonomi lainnya terhadap pendapatan masyarakat dari dalam kawasan TNKS, sedangkan model *Yibnb* dimaksudkan untuk menguji pengaruh pelaksanaan program ICDP dan variabel-variabel sosial ekonomi lainnya terhadap pendapatan dari luar kawasan TNKS. Kedua model tersebut dirumuskan dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Yibb = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \dots + \alpha_g X_g + e$$

$$Yibnb = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_g X_g + e$$

dimana :

$$Yibb = \text{Pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS}$$

$$Yibnb = \text{Pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS}$$

$$X1 = \text{Pendidikan kepala rumah tangga}$$

X2	=	Mata pencaharian tetap
X3	=	Fasilitasi kegiatan ICDP
X4	=	Luas sawah di luar kawasan
X5	=	Luas ladang di luar kawasan
X6	=	Luas ladang di dalam kawasan
X7	=	Luas kebun di luar kawasan
X8	=	Luas kebun di dalam kawasan
X9	=	Luas kebun campuran di luar kawasan
$\alpha, \beta$	=	Koefisien regresi
e	=	error

Untuk menguji tingkat keberartian variabel bebas secara bersama-sama dilakukan *uji-F* dan untuk menguji tingkat keberartian dari masing-masing variabel bebas, dilakukan *uji-t* (uji parsial). Pengaruh dari variabel-variabel bebas yang diuji, dilihat dari besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ). Sedangkan tinggi rendahnya pengaruh dari masing-masing variabel terhadap variabel tidak bebas, dilihat dari koefisien regresinya.

Definisi dan pengukuran variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :

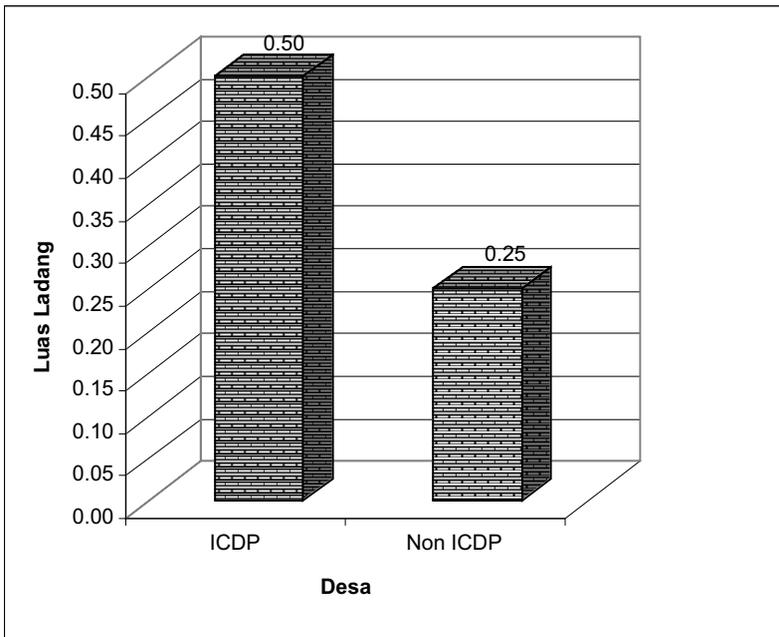
- a. ***Pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS***, adalah semua hasil yang diperoleh masyarakat desa penyangga, yang bersumber dari sumberdaya yang terdapat di dalam kawasan TNKS. Pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS dinyatakan dalam Rp/RT/bln.
- b. ***Pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS***, adalah semua semua hasil yang diperoleh masyarakat dari sumberdaya yang terdapat di luar kawasan TNKS. Pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS dinyatakan dalam Rp/RT/bln.
- c. ***Kegiatan berladang di dalam kawasan TNKS***, adalah kegiatan membuka hutan yang digunakan untuk areal bercocok tanam padi dan tanaman palawija lainnya pada lahan kering di dalam kawasan TNKS.
- d. ***Tingkat pendidikan***, adalah lamanya responden mengikuti pendidikan formal yang dinyatakan dalam satuan tahun.
- e. ***Luas lahan yang dikelola responden di dalam kawasan TNKS***, diukur dari luas lahan yang dikelola responden di dalam kawasan TNKS, baik dikelola secara langsung oleh responden maupun secara tidak langsung, diukur dalam satuan hektar.
- f. ***Luas lahan yang dikelola responden di luar kawasan TNKS***, diukur dari luas lahan yang berada di luar kawasan TNKS, yang dikelola secara langsung oleh responden maupun secara tidak langsung, diukur dalam satuan hektar. Luas lahan yang dikelola yang berada di luar kawasan TNKS terdiri dari luas sawah, ladang, kebun karet dan kebun campuran.
- g. ***Fasilitasi kegiatan ICDP***, merupakan variabel *dummy* yang dinilai dengan dua kategori, yaitu bernilai 1 apabila responden menerima fasilitasi kegiatan ICDP, dan bernilai 0 apabila responden tidak menerima fasilitasi kegiatan ICDP.
- h. ***Mata pencaharian tetap***, adalah merupakan variabel *dummy* yang dinilai dengan dua kategori, yaitu bernilai 1 apabila responden memiliki mata pencaharian tetap dari sumberdaya di luar kawasan TNKS, dan bernilai 0 apabila responden tidak mempunyai mata pencaharian tetap dari sumberdaya di luar kawasan TNKS.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Ketergantungan terhadap Ladang di Dalam Kawasan TNKS

Pelaksanaan kegiatan konservasi terpadu dalam bentuk proyek ICDP terbukti tidak dapat menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap upaya perladangan di dalam kawasan TNKS. Hal ini nampak pada data yang disajikan pada Gambar 2, yakni rata-rata luas ladang yang dikelola responden di dalam kawasan TNKS pada desa ICDP justru lebih besar dibandingkan dengan rata-rata luas ladang yang dikelola responden pada desa non ICDP.

Pernyataan tersebut lebih ditegaskan melalui uji beda nyata terhadap luas ladang yang dikelola responden pada kedua desa, yang diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,01. Nilai tersebut menjelaskan bahwa luas ladang yang dikelola responden di dalam kawasan TNKS pada kedua desa berbeda signifikan pada taraf kepercayaan 5%. Hasil pengujian statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa penyangga memiliki tingkat ketergantungan yang berbeda terhadap kebutuhan ladang di dalam kawasan TNKS. Ketergantungan terhadap ladang di dalam kawasan TNKS di desa ICDP lebih tinggi dibandingkan dengan desa Non ICDP. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan ICDP di desa penelitian tidak dapat mempengaruhi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TNKS.

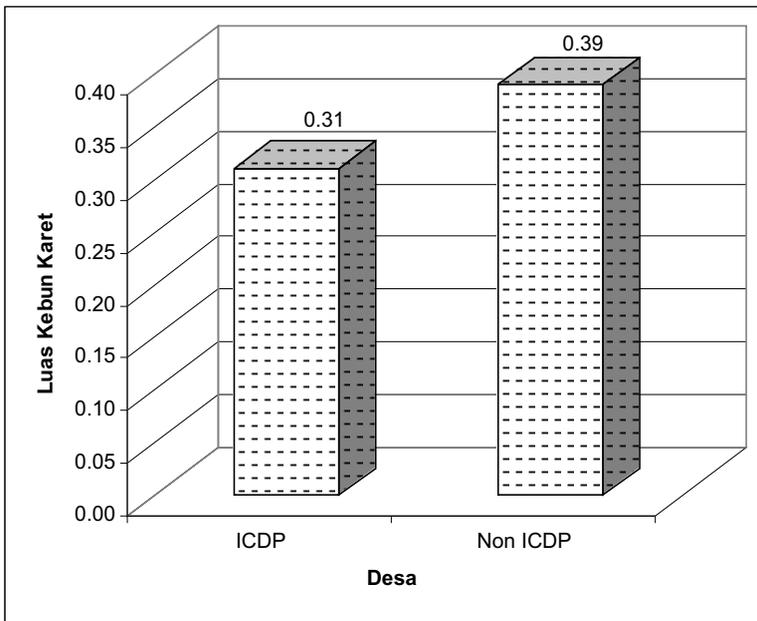


Gambar 1. Rata-rata luas ladang yang dikelola responden di dalam kawasan TNKS

## 2. Ketergantungan terhadap Kebun Karet di Dalam Kawasan TNKS

Ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan lahan kebun karet di dalam kawasan tidak berbeda antara kedua desa. Walaupun rata-rata luas kebun karet yang dikelola responden di dalam kawasan TNKS di desa ICDP lebih rendah dibandingkan dengan desa non ICDP seperti nampak pada Gambar 3, namun secara statistik tidak berbeda nyata.

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui beda nyata rata-rata luas kebun karet yang dikelola responden di dalam kawasan TNKS antara kedua desa, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,961. Nilai tersebut menjelaskan bahwa rata-rata luas kebun karet yang dikelola responden pada kedua desa tidak berbeda nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa program ICDP tidak dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kebun karet di dalam kawasan TNKS.



Gambar 2. Rata-rata luas kebun karet yang dikelola responden di dalam kawasan TNKS

## 3. Model Regresi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan dari Sumberdaya di Dalam Kawasan TNKS (Model *Yibb*) dan Pendapatan dari Sumberdaya di Luar Kawasan TNKS (Model *Yibnb*)

Kebijakan pembangunan desa penyangga TNKS melalui program ICDP diarahkan pada pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap pendapatan dari dalam kawasan TNKS dan peningkatan pendapatan dari luar kawasan TNKS ataupun pendapatan dari dalam kawasan TNKS yang bersifat tidak merusak kawasan TNKS. Untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dilakukan analisis regresi, untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program ICDP dan faktor faktor lainnya terhadap pendapatan masyarakat dari dalam kawasan dan dari luar kawasan TNKS.

Hasil pengujian model regresi pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS (model *Yibb*) dan pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS (model *Yibnb*), tersaji pada Tabel 2. Nilai R<sup>2</sup> pada model *Yibb* sebesar 0,359. Nilai tersebut menunjukkan bahwa naik turunnya pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas di dalam model sebesar 35,90 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang tercakup di dalam model hanya mampu menerangkan peningkatan atau penurunan pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS sebesar 35,90 persen. Sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdefinisi di dalam model ini. Rendahnya nilai R<sup>2</sup> tersebut, kemungkinan disebabkan minimnya penelusuran variabel. Walaupun variabel bebas yang diuji dalam model ini adalah merupakan kompilasi dari beberapa variabel yang berpengaruh nyata pada beberapa penelitian sebelumnya, namun karakteristik sosial budaya juga berpengaruh, sehingga suatu variabel bisa saja berpengaruh signifikan pada suatu lokasi penelitian akan tetapi tidak pada lokasi penelitian lainnya.

Tabel 2. Hasil regresi model pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS (*Yibb*), dan model regresi pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS (*Yibnb*).

Variabel	Model Yihh			Model Yihnh		
	Koefisien	t	Sig.	Koefisien	t	Sig.
Konstanta	4.301,75	0,0728	0,942	408.326,60	1,9294	0,056
X1	-1.636,73	-0,3648	0,716	18.730,84	1,1649	0,247
X2	28.824,27	0,5722	0,568	58.454,78	0,3238	0,747
X3	17.036,94	0,7498	0,455	-141.430,00	-1,7371	0,085
X4	-27.147,20	-1,1539	0,251	290.260,00	3,4431	0,001**
X5	1.626,95	0,0537	0,957	-8.582,77	-0,0791	0,937
X6	149.883,50	6,5540	0,000**	-64.228,40	-0,7837	0,435
X7	-87,86	-0,0130	0,990	176.046,30	7,2961	0,000**
X8	4.716,04	0,3330	0,740	78.877,47	1,5545	0,123
X9	-13.378,50	-0,2246	0,823	251.013,60	1,1761	0,242

Keterangan: \*\*: Signifikan pada taraf 1 %.

Hasil uji *F* model *Yibb*, diperoleh nilai *F* hitung sebesar 6,343 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena nilai probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk menjelaskan pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS.

Besarnya koefisien regresi luas ladang di dalam kawasan TNKS (X6) adalah 149.883,5, angka tersebut menjelaskan bahwa peningkatan luas ladang di dalam kawasan seluas 1 ha dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka dapat meningkatkan pendapatan dari dalam kawasan sebesar Rp. 149.883,5. Peningkatan pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS, dipengaruhi secara signifikan oleh peningkatan luas ladang di dalam kawasan TNKS. Hasil uji statistik tersebut, mengindikasikan bahwa sumber ketergantungan utama masyarakat dari dalam kawasan TNKS adalah perladangan di dalam kawasan. Perladangan memang merupakan mata pencaharian utama masyarakat desa penelitian, selain menyadap karet. Peningkatan luas ladang tentunya dapat menyebabkan kerusakan ekologis kawasan TNKS. Maka dalam upaya pelestarian kawasan TNKS, perlu dilakukan pencegahan terhadap perluasan ladang di dalam TNKS.

Pelaksanaan kegiatan ICDP (variabel X3), diharapkan memiliki koefisien regresi negatif, sehingga berbanding terbalik dengan pendapatan dari sumberdaya dari dalam kawasan TNKS. Hasil uji statistik, variabel X3 justru bernilai positif (berbanding lurus), yang bermakna bahwa pelaksanaan kegiatan ICDP justru meningkatkan pendapatan dari dalam kawasan TNKS. Namun hal ini tidak bisa ditafsirkan secara lebih mendalam, karena hasil uji parsial (*uji t*), koefisien regresi X3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan di dalam kawasan TNKS.

Hasil pengujian model yang kedua yaitu model pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS (*Yibnb*), menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel sosial ekonomi mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) model tersebut sebesar 0,464. Nilai tersebut menjelaskan bahwa naik turunnya pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas di dalam model sebesar 46,40 persen dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdefinisi di dalam model ini Seperti halnya pada model *Yibb*, pada model *Yibnb* pun, memiliki nilai  $R^2$  relatif kecil, hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan dalam penelusuran model.

Nilai F hitung model *Yibnb*, sebesar 9,808, dengan signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitasnya (0,000) jauh lebih kecil dari 0,5, maka model tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS. Atau dapat dikatakan model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi naik turunnya pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS.

Hasil *uji t*, menunjukkan bahwa variabel luas sawah di luar kawasan TNKS (X4) dan luas kebun di luar kawasan TNKS (X7), memiliki pengaruh signifikan terhadap naik turunnya pendapatan dari dalam kawasan TNKS. *Uji t* terhadap variabel bebas yang lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Variabel pelaksanaan kegiatan ICDP (X3), termasuk salah satu variabel yang tidak signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan dan penurunan pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS. Pelaksanaan program ICDP yang pada mulanya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa penyangga, namun hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan responden dari sumberdaya di luar kawasan TNKS. Pelaksanaan program ICDP, tidak dapat menyentuh sendi-sendi perekonomian masyarakat, sehingga sumber pendapatan masyarakat masih tergantung kepada perladangan di dalam kawasan, dan sumber pendapatan dari luar kawasan TNKS belum berkembang. Besarnya koefisien regresi dari variabel luas sawah di luar kawasan TNKS (X4) adalah 290.260,00, nilai tersebut menjelaskan bahwa peningkatan luas sawah di luar kawasan TNKS seluas 1 ha, dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS senilai Rp. 290.260,00. Koefisien regresi luas kebun karet di luar kawasan TNKS (X7) adalah 176.046,30, angka tersebut menjelaskan bahwa peningkatan luas kebun karet di luar kawasan TNKS seluas 1 ha, dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka dapat meningkatkan pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS sebesar Rp. 178.046,30.

Dari kedua uji parsial tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan dari sumberdaya di luar TNKS, dapat dilakukan dengan meningkatkan luas sawah di luar kawasan dan luas kebun karet di luar kawasan. Namun, peningkatan luas kebun karet di luar kawasan TNKS, dihadapkan pada keterbatasan lahan desa.

#### 4. Pembahasan

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ICDP terbukti tidak mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumberdaya dari dalam kawasan TNKS secara signifikan. Serta di lain pihak juga tidak terbukti secara signifikan dalam meningkatkan pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS.

Variabel penerimaan tetap dari luar kawasan TNKS, dikemukakan Yusron dan Wardana (1993), mampu mengurangi ketergantungan terhadap TNKS. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Perbedaan ini disebabkan karena penerimaan tetap pada desa penelitian pada umumnya bersumber dari usaha menyadap karet. Kegiatan menyadap karet sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Pada saat hari hujan, tidak bisa dilakukan penyadapan, maka masyarakat berusaha mencari aktifitas lainnya yang dapat menambah pendapatannya. Kegiatan utama yang dilakukan pada lokasi penelitian ini misalnya adalah membuka ladang. Karena keterbatasan lahan di dalam areal desa, maka mereka membuka ladang di dalam kawasan TNKS.

Berdasarkan hasil *uji t*, pada model pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS, juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan konservasi terpadu (ICDP), tidak signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan dan penurunan pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan konservasi terpadu ICDP, tidak dapat menurunkan ketergantungan masyarakat desa penyangga terhadap sumberdaya di dalam kawasan TNKS. Pelaksanaan program ICDP juga belum mampu meningkatkan pendapatan dari luar kawasan TNKS. Kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan pada program ICDP, hingga tahun ke-3 pasca proyek berakhir tidak menunjukkan pengaruh positif pada peningkatan pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS.

Kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan melalui proyek ICDP di desa lokasi penelitian adalah pembangunan PLTD. Pembangunan PLTD terbukti belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dari luar kawasan TNKS secara signifikan. Sasaran awal program ICDP melalui pembangunan PLTD adalah untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat di luar kawasan TNKS dan mengurangi aktifitas masyarakat di dalam kawasan. Namun ternyata pembangunan PLTD tidak banyak berpengaruh bagi perambah hutan. Kegagalan program ICDP di desa lokasi penelitian, karena penggunaan dana hibah yang kurang tepat. Pelaku perladangan di dalam hutan (perambah) belum mampu memanfaatkan listrik untuk kegiatan ekonomi produktif.

Variabel pendidikan responden juga tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan maupun penurunan pendapatan dari dalam kawasan TNKS. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Syahni *et al.* (2002), yang menemukan bahwa variabel pendidikan responden memiliki pengaruh signifikan terhadap tekanan ekonomi masyarakat terhadap kawasan TNKS. Hasil penelitian ini, juga menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi ketergantungan dalam bentuk peningkatan pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS adalah faktor luas ladang di dalam kawasan TNKS, dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem Taman Nasional. Peningkatan luas ladang yang terus menerus juga akan mengancam keberadaan zona inti dan zona rimba Taman Nasional. Sehingga dalam upaya pelestarian sumberdaya Taman Nasional, perlu diperketat lagi pengawasan terhadap perladangan di dalam kawasan.

Seiring dengan upaya pembatasan perladangan, kendala besar yang akan dihadapi adalah hilangnya sumber penghasilan padi ladang masyarakat. Maka perlu dicarikan sumber

penghasilan lain, selain dari ladang di dalam kawasan TNKS. Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan hasil dari luar kawasan TNKS, atau mengikutsertakan masyarakat dalam upaya konservasi.

Faktor yang dapat meningkatkan pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS yaitu, luas kebun karet di luar kawasan TNKS. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, untuk meningkatkan pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan adalah dengan meningkatkan luasan kebun karet. Namun strategi perluasan lahan pun dihadapkan pada kendala keterbatasan lahan di luar desa. Sementara itu, lahan yang sebagian besar masih belum dikelola adalah kawasan TNKS.

Salafsky dan Wollenberg (2000), menyatakan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat juga dapat dilakukan melalui hubungan langsung masyarakat dengan kawasan Taman Nasional seperti halnya melalui pengembangan hasil hutan non kayu. Hasil hutan non kayu adalah hasil hutan yang berupa getah, buah-buahan dan lainnya. Pengambilan hasil hutan non kayu bersifat tidak merusak kawasan dan memberikan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Kerangka Kerja Pengelolaan TNKS, bahwa pengelolaan Taman Nasional dilakukan dalam sistem zonasi. Zona pemanfaatan khusus, adalah merupakan salah satu zona Taman Nasional yang dapat dikelola oleh masyarakat. Menurut Balai TNKS (2002), Zona pemanfaatan khusus ini adalah wilayah dalam TNKS yang sudah dibuka penduduk sejak sebelum penetapan TNKS dan dikelola secara bersamaan antara Balai TNKS, masyarakat dan pemerintah daerah berdasarkan perjanjian kerjasama ketiga pihak.

Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka tanaman karet adalah komoditi yang memiliki peluang untuk dikembangkan pada zona pemanfaatan khusus TNKS di sekitar Desa Napal Licin dan desa Pulau Kidak. Karena menurut Gouyon (2004), sistem perkebunan karet secara non intensif memberikan kontribusi nyata terhadap konservasi jenis-jenis keanekaragaman hayati hutan. Di samping itu juga memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

Pembangunan kebun karet pada zona penyangga TNKS, dapat mengalihkan aktifitas perladangan masyarakat menjadi usaha perkebunan karet sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Penanaman karet pada zona penyangga sebaiknya dilakukan secara non intensif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penemuan Suharjito, *et al.* (2000), yang menyatakan bahwa kebun karet merupakan usaha yang memberikan hasil secara terus menerus dengan resiko yang rendah. Struktur hutan karet menyerupai hutan sekunder (sehingga dengan demikian secara ekologis, kebun karet lebih baik dibandingkan dengan sistem perladangan berpindah. Maka dapat disimpulkan penanaman budidaya karet pada zona penyangga lebih baik secara ekologis dan ekonomis di daerah Ulu Rawas.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Bentuk ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya di dalam kawasan TNKS di lokasi penelitian ini adalah berupa ketergantungan terhadap lahan untuk berladang dan kebun karet. Pelaksanaan kegiatan ICDP tidak berpengaruh secara nyata terhadap ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya dari dalam kawasan TNKS.

Ketergantungan masyarakat terhadap pendapatan dari sumberdaya di dalam kawasan TNKS, dipengaruhi secara signifikan oleh faktor luas ladang di dalam kawasan TNKS. Peningkatan luas ladang di dalam kawasan TNKS menyebabkan peningkatan pembukaan kawasan TNKS yang dapat berakibat kerusakan kawasan TNKS.

Faktor yang signifikan pengaruhnya terhadap pendapatan dari sumberdaya di luar kawasan TNKS adalah luas sawah dan luas kebun karet di luar kawasan TNKS. Semakin luas kebun karet di luar kawasan, maka pendapatan dari luar kawasan semakin meningkat pula.

Pengelolaan kawasan TNKS memiliki peluang untuk dilakukan melalui hubungan langsung masyarakat dengan kawasan melalui pemanfaatan secara lestari, terutama pada zona pemanfaatan khusus. Maka pengembangan karet dapat dilakukan pada zona pemanfaatan khusus TNKS.

## 2. Saran

Untuk menjaga kelestarian kawasan TNKS, perlu adanya penekanan terhadap perluasan luas ladang di dalam kawasan TNKS, yang diikuti dengan upaya peningkatan pendapatan dari luar kawasan atau pendapatan dari dalam kawasan TNKS yang bersifat tidak merusak. Berdasarkan pengujian statistik, untuk meningkatkan hasil dari luar kawasan, dapat dilakukan melalui perluasan sawah dan kebun karet di luar kawasan TNKS.

Peningkatan luas sawah di luar kawasan TNKS, dihadapkan pada kendala keterbatasan lahan di dalam kawasan desa. Upaya yang paling penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bersifat tidak merusak kawasan TNKS adalah melalui peningkatan akses masyarakat terhadap zona pemanfaatan khusus TNKS. Peningkatan akses diimplementasikan dalam bentuk pengembangan kebun karet rakyat pada zona pemanfaatan khusus TNKS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balai Taman Nasional Kerinci Seblat. 2002. Management Framework for Kerinci Seblat National Park: 2002-2006. KS-ICDP bekerjasama dengan BTNKS dan Direktorat Jenderal PHKA. Sungai Penuh.
- Bappeda Kabupaten Musi Rawas dan BPS Kabupaten Musi Rawas. 2002. Kecamatan Rawas Ulu Dalam Angka 2001. Kerjasama Bappeda Kabupaten Musi Rawas dengan BPS Kabupaten Musi Rawas. Surulangun.
- Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang. 2002. Kerinci Seblat-Proyek Pengembangan Wilayah dan Konservasi Terpadu: TNKS-ICDP Komponen B, Pengembangan Wilayah/Pedesaan; Laporan Triwulan No. 13, Januari - Maret 2002. Kerjasama AHT Group Consultants dengan PT. Tricon Jaya dan PT. Amythas Experts and Associates.
- Gouyon, A. 2004. Ekosertifikasi Sebagai Sebuah Insentif Untuk Konservasi Keragaman Hayati dalam Sistem Wanatani Karet Rakyat: Sebuah Kajian Pendahuluan. World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor.

- Salafsky, N. dan E. Wollenberg. 2000. Linking Livelihood and Conservation: A Conceptual Framework and Scale for Assessing the Integration of Human Needs and Biodiversity. *World Development*, 28 (8), 1421-1438.
- Suharjito, D., A. Khan, W.A. Djatmiko, M.T. Sirait, dan S. Evelyana. 2000. Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Aditya Media. Yogyakarta.
- Supranto, J. 2000. Teknik Sampling: Untuk Survey dan Eksperimen. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syahni, R., Mahdi, Yusmini, F. Tanjung dan R. Hakimi. 2002. Tekanan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Terhadap Kelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat. *Jurnal Stigma*, X (4), 364-370.
- Yusron, M. dan I.P. Wardana. 1993. Analisis Ekosistem daerah Perbatasan Taman Nasional Kerinci Seblat Propinsi Sumatera Barat: Hasil Pemahaman Singkat. Integrated Conservation and Development Project. Bogor.

**KEARIFAN LOKAL PETANI DALAM MEREHABILITASI  
LAHAN KRITIS (STUDI KASUS DI DESA SUMBEREJO,  
KECAMATAN BATUWARNO, KABUPATEN WONOGIRI)**  
*(Local Farmer's Wisdom in Critical Land Rehabilitation (Case Study at  
Sumberejo Village, Batuwarno Sub District, Wonogiri District))*

Oleh / By :  
Sulistya Ekawati

**ABSTRACT**

*The past policy of rehabilitation and soil conservation emphasized on technical aspect and disregard social aspect. It also disregard local cultural value of society. The consequences is that activities were less in success. The objective of this article is to find out local wisdom of society in farm rehabilitation as a social learning for all stakeholders. The research strategy used single case study. Data was collected by in depth interview, focus group discussion, content analysis and observation, in 2005. Analyses of data was processed by interactive method. Result of study indicates that society with its wisdom is ready to rehabilitate critical land in surroundings neighborhood by choosing appropriate crop type. Teak plants (*Tectona grandis*) are considered to be "sejatine kayu" (real of wood), because it is excellence in their ability to adapt in critical land, durability of wood, quality of wood, the ability to generated the source of wellspring and high sell value. Management technique of crop is applied with very simple method, characteristic by local seed, very close planting space, no intensive maintenance and need cutting system. Those kinds of crop management cause private forest is sustained managed. This study suggest policy for development of rehabilitation and soil conservation activities, need to take not only on technical aspect, but also economic, social and local society culture.*

*Keywords : local wisdom, rehabilitation and soil conservation, policy*

**ABSTRAK**

Kebijakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada masa lalu lebih menekankan aspek teknis dan mengabaikan aspek sosial, termasuk diantaranya nilai budaya lokal masyarakat setempat, akibatnya kegiatan tersebut kurang berhasil. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui kearifan lokal masyarakat dalam merehabilitasi lahan sebagai pembelajaran sosial bagi semua *stakeholders*. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal. Data dikumpulkan pada tahun 2005 dengan melakukan *indepth interview, focus group discussion, content analysis* dan *observation*. Proses analisis data secara interaktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa: masyarakat dengan kearifannya sanggup merehabilitasi lahan kritis yang ada di sekitarnya dengan memilih jenis tanaman yang sesuai. Tanaman jati (*Tectona grandis*) dianggap sebagai "sejatine kayu" (sesungguhnya kayu), karena mempunyai keunggulan dalam hal: kemampuan beradaptasi di lahan kritis, keawetan kayu, kualitas kayu, kemampuan memunculkan sumber mata air dan nilai jual yang tinggi. Teknik pengelolaan tanaman yang diterapkan sangat sederhana, dengan ciri : bibit lokal, jarak tanam rapat,

---

<sup>1)</sup>Peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

pemeliharaan tidak intensif dan sistem tebang butuh. Pengelolaan tanaman tersebut menjadikan hutan rakyat yang ada dikelola secara lestari. Saran kajian ini adalah kebijakan pembangunan ke depan, termasuk diantaranya dalam kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, harus memperhatikan bukan hanya aspek teknis, tetapi juga aspek ekonomis, sosial dan budaya masyarakat setempat.

Kata kunci : kearifan local, nilai, rehabilitasi lahan

## I. PENDAHULUAN

Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa lalu, termasuk diantaranya kebijakan dalam rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lalu lebih dititikberatkan pada aspek teknis dan mengabaikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, akibatnya terjadi konflik kepentingan. Pemerintah mempunyai kepentingan agar lahan kritis yang terlantar tersebut segera ditumbuhi dengan jenis tanaman kayu-kayuan tertentu yang mempunyai pengaruh baik terhadap konservasi tanah dan air, sedangkan masyarakat menghendaki tanaman yang ditanam memberikan manfaat baginya. Salah satu penyebab kegagalan beberapa Proyek Inpres Penghijauan di beberapa daerah termasuk di antaranya di Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri adalah kurang diperhatikannya nilai budaya lokal setempat (FKKM, 1999).

Masyarakat desa sebenarnya sudah mempunyai pengetahuan lokal yang diperoleh dari nenek moyangnya dan berkembang seiring dengan interaksinya dengan alam. Kelompok *grass root* ini telah menunjukkan keberhasilan yang sangat mengagumkan melalui proses adaptasi yang terus menerus selama berabad-abad dengan lingkungan dimana mereka hidup. Nurhadi (2000) dalam penelitiannya di Dusun Kedung Keris, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong pembangunan hutan rakyat swadaya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap alam.

Petani di Jawa mempunyai pedoman bertani yang disebut sebagai *pranata mangsa*. *Pranata mangsa* juga sebagai pedoman melestarikan lingkungan, khususnya tanah pertanian dan masih relevan digunakan oleh petani di Jawa Tengah dan sekitarnya (Wuryatno, 1999). Contoh kearifan lokal lain adalah praktek perladangan berpindah. Perladangan berpindah dahulu dianggap primitif dan keliru, sekarang diakui sebagai sistem pertanian yang memperhatikan kelestarian lingkungan (Chambers, 1988).

Belajar dari kelompok *grass root* tersebut, saatnya lahir kesadaran baru untuk menyadari bahwa pengetahuan lokal merupakan sumber pengetahuan yang bernilai, termasuk diantaranya dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kearifan lokal dalam kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan perlu digali dan dipelihara untuk mendukung pembangunan kehutanan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui kearifan lokal masyarakat dalam merehabilitasi lahan sebagai pembelajaran sosial bagi semua *stakeholders* yang terlibat dalam pembangunan, termasuk dalam rehabilitasi hutan dan lahan.

## II. METODE PENELITIAN

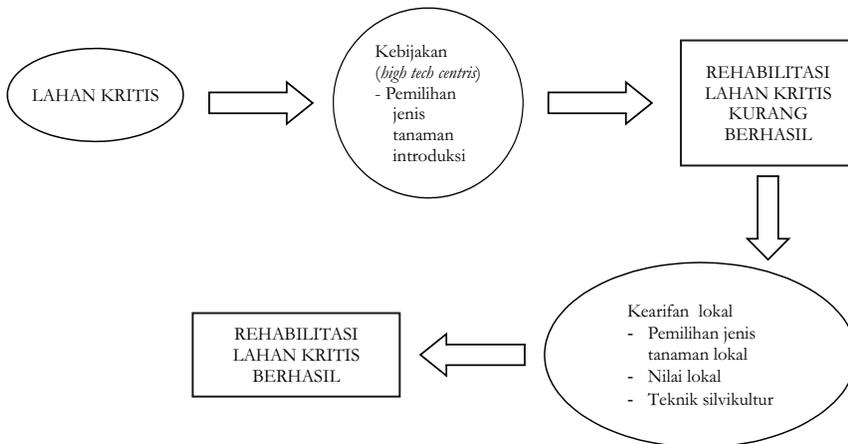
### A. Kerangka Pikir

Secara umum kearifan lokal dipahami sebagai pengetahuan lokal dalam suatu komunitas lokal. Kearifan lokal ini ditransfer dari nenek moyangnya dan disesuaikan menjadi keterampilan dan keahlian yang bisa dipakai untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam pembangunan dan menjadikan pengetahuan tersebut sesuai dengan cara hidup masyarakatnya (Youngsuksaporn *et al.*, 2003).

Pengetahuan adalah suatu proses sosial karena pengetahuan lahir sebagai produk dari interaksi yang berkelanjutan serta dialog di antara aktor yang berbeda dan sumberdaya yang berbeda pula. Warren *et al.* (1995) mendefinisikan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) sebagai pengetahuan setempat yang unik yang ada pada masyarakat atau komunitas tertentu. Pengetahuan lokal ini penting karena merupakan basis informasi bagi masyarakat tersebut dalam melakukan komunikasi dan pengambilan keputusan.

Pada awalnya kondisi Desa Sumberejo sangat kritis, banyak lahan terlantar. Pada tahun 1972 pemerintah melalui beberapa proyek yang bersifat *top down* melakukan upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada lahan kritis. Pertimbangan-pertimbangan teknis lebih mendominasi dalam pengambilan keputusan, aspek sosial ekonomi kurang diperhatikan, akibatnya adalah tanaman yang ditanam banyak yang mati.

Di tingkat akar rumput, masyarakat dengan pengetahuan lokal yang dimiliki berusaha menanami lahan kritis yang ada di sekitarnya dengan jenis-jenis tanaman yang sesuai, baik dari segi biofisik maupun sosial ekonomi. Masyarakat menyadari sepenuhnya akan potensi sumberdaya alam yang ada di sekitarnya dan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Pengetahuan dari luar yang dirasa asing bagi masyarakat kurang diterima, dengan kearifan budaya yang ada, mereka mengembangkan sendiri teknologi untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Proses rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Sumberejo digambarkan dalam diagram seperti tampak pada Gambar 1.



Gambar1. Proses Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Sumberejo, Kabupaten Batuwarno, Kabupaten Wonogiri

Figure 1. Process of The Forest and Land Rehabilitation at Sumberejo Village, Batuwarno Sub District and Wonogiri District

## B. Metode Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus mengarah pada pendiskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. Menurut Yin (2004), studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*. Jenis penelitian studi kasus yang digunakan adalah studi kasus tunggal.

Data dikumpulkan dengan dengan melakukan *indepth interview*, observasi, *focus group discussion* dan studi pustaka dari bulan Mei sampai dengan November 2005. Sumber data yang digunakan tidak mewakili populasinya, tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Pengambilan informan mencakup petani, pemimpin formal dan informal yang ada di desa, penyuluh dan pejabat Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Wonogiri. Peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. *Indepth interview* dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan masyarakat desa, dengan menggunakan *snowball sampling*. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji data sekunder dari instansi terkait (Dinas Kehutanan, BPS, Catatan Kelompok dan sebagainya). *Focus group discussion* dilakukan dengan melakukan diskusi kelompok dengan seluruh anggota kelompok tani hutan rakyat. Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati kondisi fisik lahan dan kondisi fisik tanaman (Nasution, 1992; Bodgan dan Taylor, 1993; Hadari dan Nawawi, 1995).

Cara yang digunakan untuk meningkatkan validitas dalam penelitian ini adalah dengan melakukan triangulasi, baik triangulasi data, triangulasi metode dan triangulasi peneliti. Triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat *multiperspektif*, artinya untuk menarik simpulan yang mantap diperlukan tidak hanya satu cara pandang.

Triangulasi data dilakukan dengan cara menggunakan beragam sumber data yang ada, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap keberadaannya jika digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Data yang sama diambil melalui metode yang berbeda, yaitu melalui *indepth interview*, FGD, observasi lapangan dan studi pustaka. Triangulasi peneliti dilakukan dengan cara pengujian validitas dari beberapa peneliti. Menurut Sutopo (2002), ada beberapa cara yang digunakan dalam melakukan triangulasi peneliti antara lain dengan melakukan diskusi untuk membahas hasil penelitian dengan beberapa orang peneliti., dalam penelitian ini diskusi dilakukan dengan 20 orang peneliti.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis interaktif, artinya analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Ada tiga komponen pokok dalam analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan dengan verifikasinya. Tiga komponen tersebut saling berinteraksi dan membentuk siklus.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Bio Fisik Lahan

Menurut kriteria Schmid dan Ferguson, Desa Sumberejo beriklim D/kering dengan curah hujan tahunan rata-rata 2.108 mm, banyaknya hari hujan tahunan 160 hari. Distribusi hujan yang tidak merata dan rendahnya curah hujan di daerah ini sering kali menyebabkan kekeringan (Mulyana dan Sugeng, 1997). Musim kemarau yang panjang sering melanda daerah ini dan menyebabkan vegetasi yang mampu bertahan hidup sangat terbatas.

Topografi Desa Sumberejo bergelombang dan berbukit dengan struktur tanah didominasi batuan gamping berlapis. Berdasarkan peta geologi, daerah ini didominasi oleh jenis tanah asosiasi litosol mediteran coklat masam berbahan induk tuf vulkan medier dengan fisiografi volkan dan bukit lipatan. Kondisi geografis dan struktur geologis dengan batuan kapur berlapis/terlipat telah memberi kesan bahwa daerah ini seolah-olah daerah batu bertanah. Solum tanah sangat tipis, tanah hanya sedikit muncul di sela-sela batuan. Desa Sumberejo berada pada daerah pegunungan dengan kemiringan lahan yang cukup tinggi (> 40%) dengan tanaman penutup yang sedikit, sehingga sangat rawan terhadap erosi. Kondisi ini menyebabkan petani cenderung membiarkan lahannya terlantar.

#### B. Kegiatan Rehabilitasi Lahan yang dilakukan Pemerintah

Untuk merehabilitasi lahan terlantar pemerintah mengambil kebijakan memilih teknik rehabilitasi lahan gabungan sipil teknis dan vegetatif, yaitu dengan penanaman tanaman *fast growing*. Beberapa Proyek Rehabilitasi Lahan di Desa Sumberejo yang dilakukan pemerintah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Beberapa Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Sumberejo  
*Table 1. Programs of Forest and Land Rehabilitation at Sumberejo Village*

No.	Tahun (Year)	Nama Proyek (Project Name)	Kegiatan (Action)
1.	1972	<i>World Food Programme</i>	Penanaman <i>Eucalyptus alba</i> seluas 50 Ha
2.	1972	<i>Upper Solo Watersbed Management and Upland Development Project</i>	Penanaman <i>Acacia auriculiformis</i> dan <i>Eucalyptus alba</i>
3.	1976	Inpres Penghijauan	Penanaman <i>Acacia auriculiformis</i> seluas 150 Ha
4.	1979	Proyek Pusat Pengembangan Pengelolaan DAS (Proyek P3DAS)	Pembuatan terasering, penanaman <i>Acacia auriculiformis</i>
5.	1979	<i>Upper Solo Watersbed Management Through People's Participation and Income Generation</i>	Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi tanah dan air, dengan kegiatan terasering, penanaman, silvopasture dan sebagainya

Pada Tabel 1 terlihat bahwa jenis tanaman yang digunakan untuk merehabilitasi lahan di Desa Sumberejo adalah tanaman *Acacia auriculiformis* dan *Eucalyptus alba*. Beberapa program rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tersebut kurang berhasil, hanya  $\pm 30\%$  tanaman yang hidup. Masyarakat merasa asing dengan kedua jenis tanaman tersebut, sehingga mereka tidak mau memelihara tanaman yang ditanam. Manfaat yang dirasakan masyarakat dari tanaman kayu tersebut hanya sebatas kayu bakar, karena kualitas kayu tanaman acacia dan eucalyptus memang kurang baik.

Secara teknis tanaman *Eucalyptus alba* dan *Acacia auriculiformis* mempunyai sifat mudah hidup pada kondisi kritis dan cepat pertumbuhannya, tetapi kenyataan yang terjadi berbeda. Tanaman akasia dan eucalyptus yang ditanam prosentase tumbuhnya rendah, karena tidak ada partisipasi dari masyarakat untuk memeliharanya.

## C. Kearifan Lokal Masyarakat untuk Merehabilitasi Lahan

### 1. Pemilihan Jenis Tanaman

Kegagalan program rehabilitasi lahan dan hutan yang pernah dilakukan dan kekeringan yang sering melanda desa tersebut mendorong masyarakat untuk mencari jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi alam di daerah tersebut. Tanaman jati (*Tectona grandis*) sudah lama ada dan ditanam masyarakat sebagai batas kepemilikan lahan. Berdasarkan pengamatan petani, tanaman jati tumbuh subur walaupun tumbuh di daerah kritis, oleh karena alasan tersebut masyarakat Desa Sumberejo memilih tanaman jati sebagai tanaman hutan rakyatnya.

Tanaman jati mempunyai kualitas kayu yang bagus dan awet, oleh karena itu tanaman ini mendapat sebutan sebagai "*sejatine kayu*". Sebutan "*sejatine kayu*" bagi jati tidak terlalu berlebihan, karena menurut Heyne (1987:1671), jati (*Tectona grandis* L.f) merupakan tanaman kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi karena kualitas kayunya. Dalam klasifikasi kayu perdagangan, kayu jati tergolong kayu mewah yang memiliki tingkat keawetan dan kekuatan tingkat I. Tanaman jati mempunyai biji yang disebut dengan *janggleng*, yang artinya "*urip ingkang langgeng*" (hidup yang lestari atau abadi).

Petani tidak menyukai tanaman *Acacia* sp dan *Eucalyptus* sp, karena kualitas kayunya kurang baik, sehingga masyarakat menggunakan kayu tersebut sebagai kayu bakar. Dengan pengamatan visual dan logika berpikir yang sederhana petani mengamati bahwa kedua jenis tanaman introduksi tersebut tidak menggugurkan daun di musim kemarau, sehingga kedua tanaman tersebut dianggap menyedot air tanah yang ada. Tanaman jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau, sehingga tanaman jati tidak menghabiskan air tanah yang ada, bahkan cenderung dapat menimbulkan beberapa mata air baru di daerah tersebut. Saat ini di desa Sumberejo ada 8 sumber mata air, dua diantaranya dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Wonogiri untuk mencukupi kebutuhan air sebanyak 750 KK.

Sistem pengelolaan sumberdaya alam secara tradisional tersebut ternyata memiliki kesesuaian logika dengan ilmu pengetahuan modern. Hasil pengukuran evapotranspirasi oleh beberapa ahli hidrologi menunjukkan bahwa tanaman Acacia mangium dan *Eucalyptus alba* mempunyai nilai evapotranspirasi lebih tinggi dari pada tanaman jati (*Tectona grandis*), seperti tampak pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Evapotranspirasi pada Beberapa Jenis Tanaman  
 Table 2. The Value of Evapotranspiration on Some Plants

No.	Jenis Tanaman (Plant Species)	Evapotranspirasi (mm/th) (Evapotranspirations)	Sumber data (Data Source)
1.	<i>Acacia</i> sp	1.600 - 2.400	Asdak, 1995
2.	<i>Eucalyptus alba</i>	1.642	Pudjiharta, 1995
3.	<i>Tectona grandis</i>	1.100 - 1.200	Asdak, 1995

Vegetasi memerlukan air untuk pengangkutan unsur hara dari dalam tanah untuk metabolisme. Melalui daun, air yang berasal dari tanah diuapkan sebagai bagian dari proses fisiologi tanaman yang disebut transpirasi. Transpirasi sulit dipisahkan dengan evaporasi, maka sering disatukan menjadi evapotranspirasi. Menurut Nugroho (2002), evapotranspirasi punya pengaruh yang penting terhadap besarnya cadangan air tanah terutama untuk kawasan yang berhujan rendah, lapisan tanah dangkal dan sifat batuan yang tidak dapat menyimpan air. Desa Sumberejo merupakan daerah dengan curah hujan rendah, solum tanah tipis dan formasi batuan karts, sehingga evapotranspirasi mempunyai pengaruh yang penting terhadap besarnya cadangan air tanah.

Pilihan masyarakat untuk menanam jati tidak salah, karena menurut Heyne (1987), jati (*Tectona grandis* L.f) termasuk dalam famili Verbenaceae, yang merupakan vegetasi alami pada formasi hutan tropik gugur daun di daerah India, Myanmar, Laos dan Indonesia. Jati tumbuh baik pada tanah sarang, terutama pada tanah yang mengandung kapur. Jenis ini tumbuh di daerah dengan dengan musim kering yang nyata, tipe curah hujan C - F, jumlah hujan rata-rata 1.200 - 2.000 mm/tahun, pada ketinggian 0 - 700 m dari permukaan laut.

## 2. Teknik Silvikultur

Pengelolaan hutan rakyat jati di Desa Sumberejo dilakukan secara tradisional, jauh dari pedoman teknik silvikultur yang ada.

### a. Sumber Benih

Biji jati sebagai sumber benih diperoleh masyarakat dari pohon setempat yang mempunyai *performance* bagus dan cukup umur sebagai sumber benih. Di desa itu ada satu pohon jati besar yang dirujuk masyarakat setempat sebagai sumber benih. Masyarakat desa sudah memahami bahwa kualitas tanaman sangat dipengaruhi oleh benih asal tanaman tersebut diambil. Petani sangat selektif dalam memilih sumber benih yang akan ditanam.

### b. Pembibitan dan Penanaman

Cara penanaman jati di Desa Sumberejo ada 3 cara, yaitu:

- 1) Biji jati disebar langsung ke lokasi penanaman
- 2) Penanaman dengan sistem cabutan. Di bawah tegakan jati banyak tumbuh anakan alami jati, petani mencabutnya untuk dipindahkan ke lahan yang kosong.
- 3) Biji jati disemaikan di persemaian, kemudian dengan sistem *stump*, bibit ditanam di lapangan

Sistem penanaman jati tersebut dilakukan karena relatif mudah dan tidak memerlukan tambahan modal (*polybag*, tenaga kerja, pupuk).

### c. Jarak Tanam

Salah satu ciri khas hutan rakyat jati dan mahoni di Desa Sumberejo adalah jarak tanamnya yang sangat rapat, kurang dari 0,5 m dan tidak beraturan. Penyuluhan untuk menggunakan jarak tanam yang ideal sering dilakukan, tetapi petani tetap tidak mau menjarangi tanamannya. Beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa petani mempertahankan jarak tanam yang ada adalah :

1. Petani merasa sayang jika harus mengurangi jumlah tanaman di lahannya untuk penjarangan. Menurut petani, "tanduran wis genah urip kok dipateni" (tanaman sudah jelas hidup, tetapi dicabut).
2. Dengan jarak tanam yang rapat, pada waktu penebangan tidak perlu menunggu terlalu lama sampai tanaman yang disulam cukup umur kembali untuk ditebang.
3. Kondisi lahan yang berbatu, sehingga penanaman dilakukan mengikuti lahan yang ada tanahnya.

### d. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan antara lain menyiangan dan pendangiran, biasanya dilakukan sampai tanaman berumur 3 tahun. Pemupukan dilakukan pada saat tanam, sebagai pupuk dasar biasanya digunakan pupuk kandang. Pemangkasan dilakukan petani, sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan kayu bakar. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan petani kurang intensif. Hal tersebut dapat dipahami karena usaha tani hutan rakyat merupakan usaha tani sampingan bagi petani, sehingga petani tidak mencurahkan tenaga kerja dan modal yang dimilikinya untuk mengelola hutan rakyatnya.

### e. Penebangan

Sistem penebangan yang diterapkan adalah system tebang butuh, artinya petani hanya menebang kayunya kalau membutuhkan. Petani menjadikan tanaman kayunya sebagai tabungan, kalau ada kebutuhan mendesak seperti menyekolahkan anak, perawatan orang sakit, hajatan dan sebagainya. Dengan sistem tebang butuh, kelestarian hutan rakyat dapat terjaga

### 3. Nilai Lokal

Setelah hutan rakyat berkembang, ada suatu nilai baru yang berkembang di masyarakat Desa Sumberejo. Kalau dahulu status sosial seseorang dinilai dari luas kepemilikan lahan, jumlah ternak, bentuk rumah dan sebagainya. Sekarang petani yang mempunyai tanaman kayu dengan diameter tertentu, yang sudah besar dan tua dalam jumlah banyak, dianggap sebagai orang kaya (*sugih*), berarti kepemilikan tanaman jati dijadikan salah satu indikator untuk mengukur kekayaan seseorang.

Disamping itu, berkembang nilai *isin* atau malu jika mempunyai lahan yang terlantar tidak ditanami. Masyarakat desa malu kalau dianggap sudah tidak membutuhkan uang lagi, sehingga tidak mau menanam tanaman kayu-kayuan sebagai tabungan jika ada kebutuhan yang mendesak.

Nilai lain yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Sumberejo adalah kebiasaan memberikan bekal anaknya yang baru saja berumah-tangga dengan cara membuatkan sebuah rumah. Tanaman kayu-kayuan yang mereka tanam sangat bermanfaat untuk mewujudkan kebiasaan ini. Tradisi ini sampai sekarang masih dijalankan, bahkan jika domisili anak di luar kota sekalipun, orang tua tetap mengirimkan kayu dengan sebuah truk untuk membuatkan rumah anaknya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Rehabilitasi lahan kritis di Desa Sumberejo dengan pendekatan kearifan lokal berhasil. Indikator keberhasilan tersebut adalah lahan kritis berubah menjadi hamparan hutan rakyat seluas 142 Ha, munculnya beberapa sumber mata air baru di daerah tersebut dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menanam kayu.
2. Kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang menekankan pada aspek teknis dan mengabaikan aspek sosial budaya setempat tidak berhasil. Masyarakat dengan kearifannya memilih sendiri jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi biofisik dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat memilih tanaman jati yang diyakini sebagai *sejatine kayu* (aslinya tanaman kayu-kayuan)
3. Tanaman jati diyakini masyarakat dapat mendatangkan sumber mata air bagi daerah tersebut. Secara ilmiah tanaman jati (*Tectona grandis*) mempunyai nilai evapotranspirasi lebih rendah (1.100 1.200 mm/th) daripada tanaman *Eucalyptus alba* (1.642 mm/th) dan *Acacia* sp (1.600 2.400 mm/th).
4. Masyarakat mengelola tanaman jati secara tradisional, dengan ciri khas : bibit lokal, jarak tanam rapat, pemeliharaan tidak intensif dan sistem tebang butuh. Pengelolaan tanaman tersebut menjadikan hutan rakyat yang ada di daerah tersebut lestari.
5. Nilai-nilai lokal yang ada di Desa Sumberejo yang menunjang kelestarian pengelolaan hutan rakyat jati adalah : kepemilikan tanaman jati dipakai sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang; rasa *isin* (malu) jika membiarkan tanahnya terlantar dan budaya membekali anaknya yang baru menikah dengan membangun sebuah rumah dari kayu jati.

### B. Saran

1. Kebijakan pembangunan ke depan, termasuk diantaranya dalam kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, harus memperhatikan aspek teknis, sosial dan budaya masyarakat setempat.
2. Sistem pengetahuan lokal sebaiknya jangan dipahami sebagai pengetahuan yang tuntas dan sempurna. Sistem pengetahuan lokal sebaiknya dipandang sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang sejalan dengan tuntutan kebutuhan manusia.
3. Kearifan lokal dalam mendayagunaan sumberdaya alam dapat dijadikan pembelajaran oleh semua *stakeholder* yang terlibat dalam proses pembangunan. Kearifan lokal dapat berjalan seiring bahkan dapat mengisi dan melengkapi teori modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, C. 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Bodgan, R and S J Taylor. 1993. Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian. Diterjemahkan oleh A. Khozin Affandi. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Chambers,R. 1988. Pembangunan Desa mulai dari Belakang (terjemahan P. Sudrajat). LP3ES. Jakarta.
- FKKM. 1999. Evolusi Hutan Rakyat Pegunungan Kapur Selatan dalam Hutan Rakyat Pegunungan Kapur Selatan. Warta Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM). Yogyakarta. Vol 2 No. 11.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari. 1995. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Heyne,K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia. Buku III. (Diterjemahkan oleh Badan Litbang Kehutanan). Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Indrowuryatno.1999. Pranata Mangsa dalam Aktifitas Pertanian di Jawa. Dalam Kusnaka Adimihardja (editor) Petani Merajut Tradisi Era Globalisasi. Pendayagunaan Sistem Pengetahuan Lokal dalam Pembangunan. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Nugroho, SP dan Sadhardjo S. 2002. Hutan Pinus dan Hasil Air. Pusat Pengembangan Sumberdaya Hutan Perhutani. Cebu.
- Nurhadi. 2000. "Kearifan Lokal dalam Pengembangan Hutan Rakyat". Jurnal Hutan Rakyat Vol II No.1. Mei 2000. Yogyakarta. Pusat Kajian Hutan Rakyat Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Nasution, S. 1992. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Penerbit Tarsito. Bandung.
- Pudjiharta, Ag. 1995. Cara Perhitungan dan Manfaat Data Evapotranspirasi. Informasi Teknis No. 555/1995. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam. Bogor.
- Sutopo,H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Sebelas Maret University Press. Surakarta
- Warren, DM. Slikkerveer, LJ and Brokensha, D. 1995. The Cultural Dimension of Development: Indigenous Knowledge Systems. Intermediate Technology Publication. London.
- Yin, Robert K. 2004. Studi Kasus Desain & Metode. (Diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir). Judul Asli Case Study Research Design and Methods. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Youngsuksatthaporn,T. Tangjitpiboon, T and Pittayasophon,S. 2003. Leveraging Local Wisdom with Science and Technology. Thailand Experience. National Science and Technology Development Agency. Thailand. [www.Preeda@nstda.or.th](http://www.Preeda@nstda.or.th)
- Yunita, T. 1999. Dari Paket Teknologi ke Prinsip Ekologi. Perubahan Pengetahuan Petani tentang Pengendalian Hama. Dalam Kusnaka Adimiharja (editor). Petani Merajut Tradisi Era Golbalisasi. Perberdayaan Sistem Pengetahuan Lokal dalam Pembangunan. Humaniora Utama Press. Bandung.

# PERAMBAHAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI : SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGIS (*Forest Encroachment at National Park of Rawa Aopa Watumohai: A Sociological Approach*)

Oleh / By :  
Subarudi<sup>1)</sup> & Indra A.S.L.P. Putri<sup>2)</sup>

## ABSTRACT

*The National Park of Rawa Aopa Watumohai (NPRAW) located in South East Sulawesi province has five main sub-ecosystems that are: (i) low land rain forest, (ii) low mountain forest, (iii) savana, (iv) peat forest, and (v) mangrove. The biggest threat of sustainable ecosystems is forest encroachment. Therefore, the research conducted was focused on the process of the forest encroachment. The aims of this research are: (1) to identify general condition and problems at the NPRAW, (2) to analyze the character and behavior of forest encroachers, and (3) to formulate a solution strategy for handling the forest encroachment. The results of the research showed that the total area of the PNRRAW is 105,194 ha spread out over 4 districts (South Konawe, Konawe, Kolaka, and Bombana). The main problem faced by the PNRRAW is forest encroachment achieving a tenth of its total area. The forest encroachment is triggered by a land transaction between local and migrants communities. The land transaction is an illegal activity from the point of view of the existing regulation because it covers crime, trapping, and mark up on it. The strategies for handling the forest encroachment are: (i) community empowering, (ii) proper handling of forest encroachment cases, and (iii) effective management of the NPRAW.*

*Key words : forest Encroachment, National Park, and Sociological Approach.*

## ABSTRAK

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) adalah kawasan pelestarian alam yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki 5 (lima) tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan rendah, savana, rawa, dan mangrove. Ancaman terbesar dari kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayatinya adalah perambahan hutan. Oleh karena kajian tentang perambahan hutan di kawasan TNRAW menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk: (i) mengidentifikasi kondisi dan permasalahan umum TNRAW, (ii) mengkaji karakteristik dan perilaku perambah, dan (iii) menyusun strategi penanganan dan penyelesaian kasus perambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TNRAW terletak di 4 kabupaten, yaitu kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana dengan luas kawasan 105.194 hektar. Permasalahan utama dalam pengelolaan TNRAW adalah perambahan yang luasnya sudah mencapai sepersepuluh dari total kawasannya. Modus operandi perambahan sangat unik yang bernaung dibawah proses jual-beli lahan dari penduduk asli kepada pendatang (baca perambah hutan). Dari sisi hukum, posisi jual beli lahan sangat lemah dan sudah menjurus kepada tindakan kriminal berupa penipuan dan “mark up” luasan tanah jual beli di kawasan TNRAW. Upaya penyelesaian konflik perambahan hutan di kawasan TNRAW dapat diselesaikan dengan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanganan terhadap perambah, dan peningkatan efektivitas pengelolaan TNRAW. Berkaitan dengan penanganan terhadap perambah dapat dilakukan melalui serangkaian tahapan, yaitu: (i) tatap muka dengan masyarakat

---

<sup>1)</sup>Peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

<sup>2)</sup>Peneliti pada Balitbang Kehutanan Sulawesi

perambah dan penjual lahan, (ii) meneliti dan klarifikasi surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan, (iii) penyelidikan atas kasus-kasus pemalsuan dan tindak kriminal, (iv) penyidikan/pemeriksaan atas kasus penyerobotan lahan, dan (v) sosialisasi hasil kerja tim kepada masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Kata kunci : perambahan Hutan, Taman Nasional, and Pendekatan Sosiologis I.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) merupakan Taman Nasional yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/1990 Tanggal 17 Desember 1990 dengan luas kawasannya 105.194 hektar. TNRAW mempunyai arti yang sangat penting bagi sejarah bio-geografi Pulau Sulawesi karena memiliki tipe-tipe ekosistem yang sangat khas, unik dan tergolong cukup lengkap antara lain: (i) ekosistem mangrove, (ii) ekosistem hutan hujan dataran rendah, (iii) ekosistem savana, (iv) ekosistem rawa dan (v) ekosistem hutan pegunungan rendah yang menjadi habitat berbagai jenis hidupan liar (*wildlife*) yang perlu dipertahankan kelestariannya.

Disamping itu areal kawasan konservasi TNRAW yang begitu luas memiliki berbagai fungsi strategis, antara lain: (1) sebagai daerah tangkapan air bagi daerah-daerah sekitarnya, (2) sebagai pengatur proses hidrologis dan memiliki pengaruh terhadap iklim mikro (3) sebagai benteng pertahanan terhadap angin kencang, instruksi air laut dan gelombang tsunami melalui ekosistem mangrovenya, (4) sebagai waduk alami yang mencegah banjir di musin hujan dan penyedia air di musim kemarau melalui ekosistem rawanya, (5) sebagai tempat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, (6) sebagai habitat dan perlindungan satwa dan tumbuhan liar, (7) sebagai tempat rekreasi dan wisata alam dan (8) sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar TNRAW (Tepu, 2004).

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pengelolannya, Balai TNRAW mengalami banyak hambatan dan kendala. Berdasarkan data dan informasi yang ada, salah satu kendala utamanya adalah perambahan kawasan. Timbulnya perambahan kawasan TNRAW disebabkan oleh permasalahan yang cukup kompleks. Disatu sisi, terjadi klaim tanah warisan oleh penduduk asli yang telah mencapai luas sekitar 20.500 hektar (Unit TNRAW, 2000) dan di sisi lain, tingginya tingkat migrasi penduduk dari Sulawesi Selatan ke kawasan tersebut untuk dapat memiliki lahan garapan sebagai tempat berkebun coklat karena harga komoditas tersebut cukup tinggi dan stabil. Kondisi ini memicu terjadinya jual beli lahan di kawasan TNRAW yang diklaim sebagai tanah warisan mereka tanpa melalui prosedur yang sah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak pengelola Taman Nasional telah melakukan berbagai upaya mulai dari tindakan persuasif, pemberian somasi hingga tindakan pembongkaran rumah-rumah yang ada di wilayah kawasan yang dirambah. Namun berbagai tindakan tersebut kurang membuahkan hasil bahkan menimbulkan konflik yang semakin dalam dan panjang antara pengelola TNRAW dengan masyarakat perambah.

Informasi dan publikasi tentang perambahan hutan di TNRAW masih sangat terbatas dalam bentuk laporan-laporan dari instansi terkait (Riyanto, 2004) sehingga kajian tentang perambahan hutan di TNRAW dengan pendekatan sosiologis sangat diperlukan. Hal ini dilakukan terutama untuk mencari solusi terbaik atas konflik yang terjadi di wilayah

perambahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (i) mengidentifikasi kondisi umum TNRAW dan permasalahannya; (ii) mengkaji perilaku perambah hutan, (iii) menilai upaya-upaya penanganan perambahan oleh pengelola TNRAW; dan (iv) menyusun strategi penyelesaiannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dalam penyelesaian konflik antara pengelola TNRAW dengan masyarakat perambahan.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TNRAW yang terletak di Sulawesi Tenggara terutama di daerah yang ditempati oleh para perambah yaitu, di blok Lampopala. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yakni Bulan Agustus sampai Oktober 2005.

### B. Kerangka Teoritik

Sesuai dengan topik kajian tentang perambahan hutan dalam kaitannya dengan jual beli lahan adat/warisan, maka pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah tinjauan sosiologis yang menguraikan secara jelas tentang aspek-aspek yang mempengaruhi tingkah laku (*behaviour*) perambah hutan dan penduduk asli yang mengaku sebagai pewaris lahan adat.

Pendekatan ini didasarkan kepada teori tingkah laku bahwa tingkah laku seseorang merupakan cermin budaya masyarakat, lingkungan sosial dan pendidikan. Masyarakat adalah kelompok individu yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Setiap individu yang terbentuk merupakan hasil interaksi lingkungan sosial dan kualitas pendidikan yang menghasilkan sudut pandang dan tingkah laku hidupnya.

Penjelasan tentang teori perilaku yang detail telah banyak digunakan dalam ilmu marketing yang mempelajari tentang bagaimana perilaku seseorang dalam memutuskan untuk membeli sesuatu yang dipengaruhi 4 (empat) faktor utama, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis (Kotler, 1995).

Faktor budaya, faktor ini mempunyai pengaruh yang paling meluas dan mendalam terhadap perilaku konsumen melalui aspek-aspek *kultur*, *sub-kultur* dan kelas sosial. *Kultur* (kebudayaan) adalah determinan yang fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang. Setiap *kultur* terdiri dari *sub-sub kultur* yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan simulasi anggotanya yang lebih spesifik. *Sub kultur* mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras dan daerah geografis. Kelas sosial mencerminkan stratifikasi social dalam masyarakat yang tersusun secara hirarkis dan anggota-anggotanya memiliki tata nilai, minat dan perilaku yang mirip.

Faktor sosial, faktor ini mempengaruhi perilaku konsumen melalui kelompok acuan, keluarga, serta peranan dan status sosial. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku seseorang. Anggota keluarga merupakan kelompok primer yang paling berpengaruh, terutama orang tua. Melalui pengaruh orang tua, seseorang memperoleh orientasi terhadap agama, politik, dan ekonomi serta suatu rasa ambisi pribadi, penghargaan pribadi, dan cinta. Peran dan status merupakan posisi orang tersebut dalam setiap kelompok (keluarga, klub dan organisasi).

Faktor pribadi, faktor ini mempengaruhi keputusan seorang pembeli melalui karakteristik pribadi, yaitu usia dan tingkatan hidup (orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya), pekerjaan (mempengaruhi pola konsumsinya), keadaan perekonomian (meliputi pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan kekayaan, hutang, kekuatan untuk meminjam, dan pendirian terhadap belanja dan menabung), gaya hidup (melukiskan "keseluruhan orang" tersebut berintegrasi dengan lingkungannya), kepribadian (karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang dalam mencerminkan tanggapan yang relatif konsisten dan tetap terhadap lingkungannya) beserta konsep diri (citra pribadi mencerminkan citra merek yang akan dibelinya).

Faktor psikologis, faktor ini mempengaruhi pilihan pembelian seseorang melalui 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi (faktor pendorong dalam diri seseorang), persepsi (proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti), pengetahuan (menjelaskan perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman), serta kepercayaan (merefleksikan pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal) dan pendirian (evaluasi kognitif yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan yang mapan dari seseorang terhadap suatu obyek atau gagasan).

Berdasarkan Teori perilaku yang dijelaskan oleh Kotler (1995), faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang kemungkinan masih dapat digunakan sebagai acuan dan analisis dalam kajian perambahan hutan adalah faktor budaya, sosial, dan psikologis dengan unsur-unsur penyusunnya yang juga terbatas diterapkan karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya penelitian.

### C. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dan diskusi dengan para perambah hutan dalam suatu diskusi kelompok, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait yaitu jumlah penduduk, luas areal yang dirambah, dan asal usul perambah hutan.

### D. Metode Analisis dan Sintesis

Berdasarkan kerangka teoritis, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode *retrospektif* yang seringkali dipakai dalam penelitian marketing, yaitu mewawancarai sejumlah pelaku pembeli terakhir (baca: perambahan hutan) dan meminta mereka untuk mengingat kembali kejadian-kejadian yang mendorong pembelian mereka (baca: menjadi perambah hutan) (Kotler, 1995).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kondisi Umum TNRAW dan Permasalahannya

#### 1. Kronologis Penetapan Kawasan TNRAW

Secara umum pembentukan kawasan TNRAW diawali dengan penunjukan hutan Watumohai sebagai Taman Buru dengan luas 50.000 ha oleh Menteri Pertanian tahun 1976 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 648/Kpts/Um/10/1976.

Tahun 1983 Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan untuk menetapkan kawasan konservasi yang terdiri dari Cagar Alam Rawa Aopa dan Taman Buru Gunung Watumohai menjadi Taman Nasional. Usulan tersebut disetujui oleh Menteri Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan No. 198/Kpts-II/1985 (penetapan TB Gunung Watumohai seluas 50.000 ha) dan SK Menteri Kehutanan No. 138/Kpts-II/1985 (penetapan Suaka Margasatwa Rawa Aopa seluas 55.560 ha).

Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 189/Kpts-II/1985, TB Gunung Watumohai dibagi menjadi SM Gunung Watumohai seluas 41.244 hektar dan TB Dataran Rumbia seluas 8.756 hektar, sehingga luas suaka margasatwa secara keseluruhan menjadi 96.804 hektar yang dikukuhkan dengan SK Deklarasi TNRAW di Kaliurang No. 444/Kpts-II/1989 tanggal 1 April 1989.

Perubahan SM Rawa Aopa dan TB Gunung Watumohai menjadi TNRAW terjadi tahun 1990 melalui SK Menteri Kehutanan No.756/Kpts-II/1990 tanggal 17 Desember 1990 seluas 105.194 hektar. Sejak tahun 1997 TNRAW yang semula dikelola oleh Sub Balai KSDA Sulawesi Tenggara kemudian dikelola tersendiri oleh UPT Unit TNRAW yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997. Peningkatan status TNRAW menjadi Balai TNRAW terjadi tahun 2002 melalui SK Menhut No. 6186/Kpts-II/2002.

## 2. Luas dan Letak TNRAW

Secara geografis TNRAW terletak pada posisi 121°4' - 122044' Bujur Timur (BT) dan 04022' - 04039' Lintang Selatan (LS). Berdasarkan letak administratif terletak pada 4 kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana.

Secara umum kawasan TNRAW memiliki topografi datar, berbukit sampai dengan bergunung. Bentang alam di daerah ini berupa pantai, dataran rendah sampai berbukit di wilayah selatan, sedangkan di bagian utara bertopografi berat sampai bergunung. Ketinggian kawasan dari permukaan laut berkisar dari 0 - 981 meter dpl. Tempat tertinggi adalah Gunung Makaleo (798 m dpl) dibagian utara dan Gunung Watumohai (550 m dpl) di bagian tengah/selatan (Tepu, 2004).

## 3. Potensi dan Lokasi Wisata Alam

TNRAW memiliki beberapa obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) yang potensinya dapat dikembangkan di kemudian hari, diantaranya : (1) Muara Lanowulu dimana terdapat perkampungan tradisional nelayan dengan panorama hutan mangrove yang masih sangat bagus, (2) Savana Lanowulu-Langkowala yang merupakan salah satu savanna yang terdapat di kawasan Taman Nasional ini dan dapat memberikan gambaran kekayaan kehidupan keanekaragaman hayati khas savana, (3) Rawa Aopa yang unik yang merupakan rawa air tawar terluas di Sulawesi dan memiliki kekayaan jenis burung air yang cukup tinggi, (4) Gunung Watumohai yang memiliki kekayaan keanekaragaman jenis hutan hujan dataran rendah yang menakjubkan dan (5) Air Terjun Pinanggoosi setinggi 30 meter dengan panorama hutan tropis dataran rendah.

## 4. Permasalahan di TNRAW

Riyanto (2004) menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan gangguan kawasan yang dihadapi oleh Balai TNRAW adalah: (i) perburuan rusa/jonga dengan peralatan berburu

dari mulai jerat hingga senjata api, (ii) kebakaran hutan yang diakibatkan oleh pembakaran rumput dan alang-alang oleh pemburu rusa agar tumbuh tunas muda yang disukai rusa, (iii) pemungutan kayu dan hasil hutan non kayu, (iv) pengambilan bahan tambang, (v) tumpang tindih antara kawasan TNRAW dengan lahan transmigrasi, dan (vi) penyerobotan/perambahan dan klaim lahan oleh beberapa kelompok masyarakat bahwa areal tersebut merupakan tanah leluhurnya.

Perambahan kawasan TNRAW ini sebenarnya telah terjadi sejak awal pembentukan Taman Nasional dan dari tahun ke tahun luas areal perambahan cenderung mengalami peningkatan yang cukup pesat. Bila pada tahun 2000 diperkirakan luas areal perambahan hanya sekitar  $\pm$  3.100 hektar, maka pada tahun 2005 luas areal perambahan diperkirakan telah mencapai sepersepuluh dari luas areal kawasan TNRAW.

Perambahan tersebut apabila tidak dilakukan upaya-upaya penanganan yang tepat, maka akan mempengaruhi kondisi dan situasi ODTWA serta mengancam keutuhan kawasan Taman Nasional yang dimiliki TNRAW.

## **B. Perilaku Perambah Hutan**

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi langsung dengan para perambah hutan di wilayah Lampopala/Langkowala dan Horodopi terungkap bahwa sebagian besar perambah (98%) berasal dari suku Bugis yang datang dari Sulawesi Selatan, sisanya berasal dari suku Jawa dan Nusa Tenggara (Lombok/Sasak).

Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) hal yang diperhatikan untuk mendalami perilaku perambah hutan, yaitu: (i) pola penguasaan lahan, (ii) perilaku perambah hutan, dan (iii) pola penjualan lahan.

### **1. Pola Penguasaan Lahan**

Umumnya para perambah yang menguasai lahan di blok Lampopala/Langkowala memperoleh atau membeli lahan tersebut dari orang-orang yang mengaku sebagai penduduk asli setempat yang berasal dari suku Moronene, sedangkan perambah yang menguasai lahan di Horodopi umumnya mengaku membeli lahan dari penduduk asli yang berasal dari suku Tolaki yang menjadi pemilik awal dari tanah tersebut karena merupakan warisan dari nenek moyangnya.

Setelah terjadi transaksi jual beli lahan, maka pembeli lahan (perambah) berhak atas lahan yang dibelinya dengan luasan yang bervariasi antara 100 - 150 hektar. Umumnya lahan tersebut berbentuk persegi panjang yang ditandai batas-batasnya dengan lahan rambahan lain dengan menggunakan batas alam. Hal ini dilakukan karena baik penjual dan pembeli lahan tidak bisa menunjukkan bukti-bukti atau tanda terima bahwa memang telah terjadi pembelian lahan. Peneliti telah berusaha untuk melihat secara langsung bukti transaksi tersebut, tetapi perambah berupaya menolak dengan berbagai alasan.

Saat ini di lokasi perambahan yang terdapat di blok Lampopala/Langkowala terdapat tiga orang tuan tanah yang dikatakan sebagai "pemilik lahan" yang sah karena memperoleh lahan dengan cara membeli langsung dari penduduk asli. Untuk dapat menjadi seorang "pemilik lahan" maka seorang perambah tersebut harus memiliki kekayaan dan modal yang cukup atau dengan kata lain pemilik lahan tersebut umumnya memiliki tingkat ekonomi yang jauh lebih baik dibanding para perambah lain misalnya dengan kemampuan untuk mengeluarkan uang untuk membayar lahan atau membeli sarana pendukung pertanian seperti

traktor tangan seharga Rp. 16.000.000 dan berbagai peralatan pertanian lain yang langsung diantar ke lokasi oleh *dealer* penjual traktor.

## 2. Perilaku Perambah Hutan

Sekelompok perambah hutan di kawasan TNRAW yang berhasil diwawancarai ternyata juga pernah tinggal dan membuka hutan di beberapa lokasi, seperti di kawasan cagar alam Pelihari, di daerah Sangata, Kabupaten Bontang yang masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kutai (TNK), Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pengalaman dan hasil pengamatan penulis, perilaku perambah hutan di TNRAW hampir sama dengan perilaku perambah hutan di kawasan TNK, dimana kawasan TNK telah dikapling-kapling dengan luasan antara 300-400 m<sup>2</sup> dan dijual dengan harga sekitar Rp. 1-2 juta/kapling (Subarudi, 2001).

Pembelian lahan oleh masyarakat pendatang dari penduduk asli seringkali dijadikan modus operandi pelaku perambahan di kawasan TNRAW. Walaupun proses jual beli lahan tersebut memiliki banyak kelemahan dari sisi hukum. Pertama, penduduk asli selaku penjual lahan tidak memiliki bukti yang kuat dan legal secara hukum sebagai ahli waris yang sah dari sebidang tanah adat. Kedua, tanah adat yang dijual tidak memiliki akta tanah berupa luasan dan batas-batas (sebelah Utara, Selatan, Barat, dan Timur) serta lokasi tanah yang tepat. Ketiga, jika benar orang-orang yang mengaku sebagai penduduk asli tersebut memang telah lama berdiam di lokasi tersebut, maka mereka harus memiliki sejarah kepemilikan lahan di TNRAW. Silsilah kepemilikan lahan dan status keturunan (bangsawan) dari pemilik lahan adat yang harus dibuktikan kebenarannya oleh ahli-ahli sejarah atau antropologi yang pernah membahas tentang masyarakat yang hidup di sekitar kawasan TNRAW. Keempat, orang-orang yang mengaku sebagai penduduk asli dan ahli waris lahan tersebut tidak memiliki akta waris berupa persetujuan (tanda tangan) dengan ahli waris lainnya yang juga berhak atas lahan adat yang dikuasainya.

Berdasarkan kelemahan hukum diatas, penduduk asli selaku oknum penjual tanah dapat dinyatakan telah melakukan tindak kriminal berupa tindak penipuan dengan mengakui lahan tersebut sebagai lahan adat warisan nenek moyangnya dan diperjual belikan kepada masyarakat perambah. Disamping itu, si pelaku perambahan dapat saja melakukan “mark up” atau dibesar-besarkan luasan lahan yang dibelinya sehingga seorang 'pemilik' (baca: pembeli lahan) dapat menguasai lahan di TNRAW berkisar antara 100-150 hektar.

Disamping itu, seiring dengan berjalannya waktu dan kerutinan tugas petugas Balai TNRAW memasuki lokasi perambahan dan melakukan penyuluhan, sebagian besar perambah (92%) telah menyadari bahwa sebenarnya mereka membeli lahan *illegal* yang masuk dalam wilayah TNRAW. Secara tidak langsung mereka mengakui bahwa penguasaan lahan mereka lemah secara hukum karena tanpa bukti kepemilikan yang sah, namun perambah tersebut masih tetap bersikukuh bahwa mereka berhak atas lahan tersebut karena mereka telah membeli (walau tanpa bukti pembayaran yang sah) dari penduduk asli sehingga mereka mempertahankan hak-hak adat penduduk asli. Pendapat ini timbul terutama didukung oleh faktor ekonomi dimana perambah tersebut telah menggantungkan hidupnya pada lahan rambahannya sehingga akan berusaha mempertahankan lahan rambahan tersebut dengan berbagai cara.

Meskipun memiliki banyak kelemahan dan cacat hukum, kasus jual beli lahan di kawasan TNRAW dapat dianalogikan sebagai benang kusut, karena terlihat adanya dukungan dari “oknum” pejabat pemerintah. Dukungan ini menyebabkan peningkatan posisi tawar dan rasa

percaya diri pelaku perambahan karena mendapat “legalitas” dari Pemda Kecamatan dan Kabupaten Bombana.

Diantara pemilik lahan di kawasan TNRAW ada yang memiliki bukti berupa kwitansi jual beli lahan yang ditandatangani oleh aparat desa serta saksi-saksi. Mereka juga memiliki Surat Keterangan Tanah sebagai bukti kepemilikan lahan yang diterbitkan oleh oknum pemerintah daerah. Bahkan di areal perambahan yang terletak di Horodopi, pemilik tanah yang telah mengantongi surat bukti pembayaran PBB karena mereka secara rutin membayar PBB untuk lahan garapannya tersebut, meskipun lokasi yang ditunjukkan pada PBB tersebut tidak sesuai dengan lokasi areal lahan garapannya yang terdapat di lapangan. Padahal bukti pembayaran PBB tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan lahan sebagaimana tertulis dalam setiap kuitansi pembayaran PBB.

### 3. Pola Penjualan Lahan

Pola jual beli lahan dilakukan dengan dua cara, yaitu: (i) dengan menukarkan berbagai barang berharga seperti sepeda motor atau televisi atau barang berharga lain yang diminta oleh sipenjual lahan dengan luasan tanah tertentu (biasanya lahan tergolong cukup luas dan harga tidak sebanding dengan harga pasaran tanah pada umumnya), dan (ii) dengan membayar sejumlah uang tertentu yang umumnya bernilai sangat rendah yaitu berkisar Rp. 50.000 Rp. 100.000 per hektar.

Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa motivasi utama dari penjual lahan adalah memperoleh keuntungan secara cepat dari kegiatan jual beli lahan tersebut, meskipun mereka telah mengetahui bahwa lahan yang mereka jual termasuk dalam areal kawasan TNRAW. Sedangkan pembeli lahan umumnya mengaku bahwa pada awalnya mereka tidak mengetahui (pura-pura tidak tahu) bahwa lahan yang mereka beli termasuk dalam areal kawasan TNRAW.

Pola penjualan lahan oleh si “pemilik” lahan kepada pendatang baru sangat menarik dengan menggunakan sistem insentif yang ternyata sangat “mumpuni” untuk mengundang orang-orang luar yang tercatat sebagai perantau atau pengangguran yang tidak memiliki lahan baik dari orang Jawa dan orang Selatan (Penyebutan diri atas orang-orang yang berasal dari Sulawesi Selatan).

Setiap kepala keluarga “pendatang” yang akan mengolah lahan ditawarkan untuk menggunakan traktor, bibit dan faktor produksi lainnya secara gratis, dan si penggarap (sebutan untuk pendatang haram) hanya diminta untuk menyediakan tenaga saja. Jika si penggarap memiliki uang maka pengolahan lahannya dilakukan oleh orang lain dengan membayar biaya persiapan lahan sebesar Rp. 125.000 per ha. Namun jika penggarap ingin mengolah sendiri lahannya maka si penggarap akan mendapatkan pinjaman alat misalnya traktor dan hanya diminta untuk mengeluarkan biaya pembelian solar.

Pemilik lahan juga terus memberi motivasi kepada si penggarap untuk semakin giat mengolah lahan karena si penggarap tidak perlu mengeluarkan modal atau uang untuk mengelola lahan garapannya. Dalam hal ini si penggarap didorong untuk mengolah lahannya seluas mungkin dan tidak dibatasi sesuai dengan kemampuannya dalam mengolah lahan. Sebagai contoh, apabila penggarap mampu mengolah lahan sekitar 4 hektar dan ditanami dengan tanaman coklat, maka si penggarap tidak dipungut biaya apapun kecuali memberikan kompensasi setengah (bagi sama) dari lahan yang telah diolahnya. Dalam hal ini penggarap lahan dan si “pemilik lahan akan memiliki lahan yang sudah ditanami tanaman coklat masing-masing seluas 2 ha.

Dalam upaya meningkatkan sikap loyal si penggarap terhadap si “pemilik” lahan, maka si penggarap juga akan dibebaskan dari berbagai pungutan hingga masa panen tanaman coklat tiba. Pada panen pertama hasil kebun coklat akan menjadi milik si penggarap sepenuhnya dan panen tahun kedua, si “pemilik” lahan mulai bertingkah dengan berpura-pura menagih sewa bayaran atas lahan yang digarapnya. Biasanya si “pemilik” lahan dengan berbagai cara akan langsung menawarkan penjualan lahan tersebut kepada si penggarap dengan harga sekitar Rp. 2-3 juta per hektar yang dibayarkan dari hasil panen coklat mereka. Pembayaran ini dapat saja dicicil dalam 2-3 kali pembayaran dan hal ini seolah-olah dipandang sebagai suatu “kemurahan” hati si “pemilik” lahan padahal skema tawaran pembayaran ini didasarkan kepada logika bahwa kondisi keuangan si penggarap yang terbatas. Setelah si penggarap membayar lunas maka lahan tersebut telah menjadi milik si penggarap.

Dengan demikian, disamping faktor kesuburan lahan (indikator warna lahan yang hitam kecoklat-coklatan) di kawasan TNRAW dan berbagai “skenario” kemudahan yang ditawarkan oleh pemilik lahan kepada si penggarap untuk memiliki lahan garapannya akan berdampak terhadap peningkatan jumlah pendatang dari Selatan untuk memiliki lahan dan ditanami berbagai komoditas yang menguntungkan. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama laju peningkatan dan perubahan tutupan lahan hutan (*forest land use change*) di kawasan TNRAW menjadi kebun coklat dan jeruk.

### **C. Upaya Penanganan yang Dilaksanakan oleh Balai TNRAW**

Berbagai cara telah dilakukan oleh Balai TNRAW untuk menanggulangi perambahan yang makin marak di kawasan tersebut dengan tujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam TNRAW, misalnya dengan melakukan penyuluhan atau pendekatan persuasif. Selain itu Balai TNRAW juga telah melakukan somasi agar mereka pindah dari lokasi perambahan hingga batas waktu tertentu, namun mereka juga tidak menghiraukan somasi tersebut.

Salah satu langkah yang ditempuh untuk menanggulangi perambahan misalnya adalah melalui pembentukan Tim Operasi Penanggulangan Perambahan TNRAW didasari oleh Keputusan Gubernur Sultra No. 318 Tahun 2000 yang diketuai oleh Pembantu Gubernur Wilayah Kepulauan. Adapun tugas tim adalah: (1) melakukan koordinasi, inventarisasi, penertiban dan pengawasan TNRAW dan kawasan hutan lain disekitarnya dari perambahan/penyerobotan oleh masyarakat/peladang liar, (2) mengambil langkah-langkah penanggulangan dari penyerobotan dan pengrusakan kawasan TNRAW dan kawasan hutan lainnya, (3) melakukan analisa dan evaluasi penanganan kasus perambahan/penyerobotan serta membantu tindak lanjut penyelesaian yang diperlukan, (4) melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada warga masyarakat baik perambahan/penyerobotan maupun masyarakat lain di sekitarnya, dan (5) mengambil tindakan tegas terhadap perambah/penyerobot sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan operasi penanggulangan perambahan TNRAW didukung oleh adanya pelaksanaan operasi pengamanan yang dipertegas melalui Surat Kepala Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Sulawesi Tenggara No. 19998/Kwl-5/2000 tanggal 3 Nopember 2000. Kegiatan operasi pengamanan tersebut dikonsentrasikan di wilayah Lanowulu, Hukae Lama dan Lampopala/Langkowala, dengan kegiatan dan tindakan berupa penyelidikan, tatap muka dengan masyarakat, klarifikasi surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan dan penyidikan/pemeriksaan. Tetapi target tersebut tidak dapat direalisasikan karena mendapat tentangan dari anggota DPRD yang pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat dalam kawasan TNRAW (Riyanto, 2004).

Kasus penanganan perambahan hutan kemudian menjadi makin berlarut-larut karena ketidak serasian antara langkah Gubernur Sulawesi Tenggara saat itu dengan DPRD nya. Hal ini disebabkan karena Gubernur Sulawesi Tenggara telah memilih alternatif ke dua dari 3 alternatif solusi yang ada, yaitu: (1) pengosongan bertahap, (2) pengosongan total (pembersihan), dan (3) pengosongan secara selektif.

Menteri Kehutanan sendiri melalui suratnya No. 644/Menhut-V/2001, tanggal 2 Mei 2001 lebih cenderung memilih alternatif pertama yaitu pengosongan secara bertahap dengan kegiatannya berupa: (i) mengeluarkan seluruh perambah termasuk pondok dan rumah, (ii) tanaman yang tumbuh di lokasi perambahan dibiarkan dan dapat dipetik hasilnya dalam jangka waktu tertentu (sampai tidak produktif lagi), dan (iii) melakukan rehabilitasi dengan penanaman jenis tumbuhan asli TNRAW (Riyanto, 2004).

Melihat kondisi perambahan yang semakin meluas dan dukungan Pemda yang terkesan lambat dan cenderung mengulur-ulur waktu, maka walaupun akhirnya terkesan jalan sendiri karena tidak mendapat dukungan yang optimal dari aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat, Balai TNRAW dengan melibatkan aparat kepolisian akhirnya melakukan pengusiran terhadap perambah dengan jalan merubuhkan rumah-rumah perambah dan sebagian ada yang dibakar sehingga menimbulkan kepanikan dari para perambah.

Namun hal tersebut juga tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan dan bahkan menimbulkan konflik yang berkepanjangan karena walaupun sejumlah perambah telah pergi meninggalkan areal perambahan karena traumatik namun sebagian besar keluarga perambah masih tetap bertahan (terutama pemilik lahan) di tempat tersebut karena perambah tersebut hanya mengungsi sementara waktu untuk kemudian kembali lagi ke areal rambahannya setelah petugas operasi TNRAW meninggalkan tempat tersebut.

Fakta dan data yang ada menunjukkan bahwa si “pemilik” lahan telah mengundang banyak pendatang untuk bersama-sama menggarap lahan miliknya. Bahkan ada pemilik lahan yang mengatakan akan tetap bertahan di lokasi tersebut sekalipun mereka harus mati ditempat perambahan sehingga akhirnya kasus tersebut membawa dan melibatkan pemerintah daerah setempat untuk turut menyelesaikan kasus tersebut dan kadangkala menjadi komoditas politik terutama bagi para pejabat baru di Kabupaten Bombana.

#### **D. Langkah Penyelesaian dan Penanganan Konflik Perambahan Hutan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai data dan fakta yang ditemui di lapangan yang ternyata belum juga mampu menyelesaikan persoalan perambahan hutan di TNRAW, penulis mengusulkan tiga langkah penting yang perlu dipertimbangkan oleh pengelola TNRAW dalam upaya menyelesaikan dan menangani kembali konflik perambahan hutan tersebut, diantaranya: (i) pemberdayaan masyarakat, (ii) penanganan perambah secara tuntas, dan (iii) peningkatan efektivitas pengelolaan TNRAW.

##### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

Melihat sepak terjang penduduk asli yang menjual lahan di kawasan TNRAW dilakukan semata-mata untuk tujuan komersial (memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat), maka tindakan represif berupa perusakan dan pembakaran pondok-pondok perambah hutan tidaklah tepat dan efektif karena hanya menimbulkan balas dendam dan konflik sosial yang berkepanjangan. Sebagai gantinya dapat dicarikan alternatif penyelesaian lainnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi tanggung

jawab semua semua pihak yang terkait seperti pemerintah daerah, Balai TNRAW, berbagai lembaga pemerintah lain dan lembaga donor serta LSM dengan melakukan penanganan yang terpadu. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah mengupayakan peningkatan taraf hidup atau tingkat ekonomi masyarakat asli yang umumnya berprofesi sebagai petani dengan tingkat pendapatan yang sangat minim.

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, maka pengelola TNRAW harus mampu berperan aktif mencari model-model pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan para pihak (*stakeholders*) sebagai upaya mewujudkan program pengentasan kemiskinan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemda di era otonomi daerah.

Diharapkan dengan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat akan memberikan dampak positif berupa peningkatan wawasan dan pola pikir masyarakat asli untuk berperan dalam menjaga keutuhan kawasan TNRAW karena kawasan tersebut telah memberikan penghidupan dan menjadi bagian hidup mereka sehari-hari.

## 2. Penanganan Perambah

Pelaku perambahan juga memerlukan penanganan yang spesifik dan serius karena adanya dukungan politis dari elit-elit politik lokal, sehingga upaya penanganan perambah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menuntut pengelola TNRAW untuk menyusun suatu strategi penanganan perambah dengan membentuk suatu tim terpadu penyelesaian kasus perambahan hutan di TNRAW. Adapun Tim tersebut dapat terdiri dari Ketua (akademisi dari Unhalu), Anggota (perwakilan Balai TNRAW, Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten terkait, Badan Pertanahan Negara Propinsi, Bappeda, Kejaksanaan, dan Kepolisian setempat serta LSM yang memiliki integritas dan dipercaya oleh masyarakat.

Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi: (i) tatap muka dengan masyarakat perambah dan penjual lahan, (ii) meneliti dan klarifikasi surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan, (iii) penyelidikan atas kasus-kasus pemalsuan dan tindak kriminal, (iv) penyidikan/pemeriksaan atas kasus penyerobotan lahan, dan (v) sosialisasi hasil kerja tim kepada masyarakat luas.

### a. Tatap Muka dengan Masyarakat Perambah dan Penjual Lahan

Dengan berbagai upaya harus diusahakan diadakan pertemuan antara masyarakat perambah dan penjual lahan dengan mediator yang telah disetujui oleh masing-masing pihak. Pencarian mediator sangat diperlukan agar pertemuan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pertemuan ini harus diungkapkan tentang kebenaran dan kesalahan dari pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli lahan dari segi hukum dengan mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga hal ini tidak menjadi preseden buruk kemudian hari. Pemda dan Babinsa setempat harus juga berani mengatakan sesuatu yang benar sebagai kebenaran dan sesuatu yang salah sebagai kesalahan agar menjadi bahan pelajaran bagi semua pihak bahwa semua pihak punya kedudukan yang sama dalam hukum.

### b. Meneliti dan Mengklarifikasi Surat-Surat Kepemilikan/Penguasaan Lahan

Surat-surat yang dipegang baik oleh perambah sebagai pembeli lahan dan penduduk asli yang menjual lahan “adat” harus dapat diperiksa keaslian dokumen dan dilengkapi dengan fakta dan bukti-bukti di lapangan bahwa tanah tersebut memang milik keluarga “istimewa”.

Jika mengaku keturunan bangsawan harus dibuktikan dengan bukti kesejarahan bahwa benar di lokasi tersebut pernah ada sebuah kerajaan atau pemerintahan adat yang berkedudukan di lokasi tersebut.

Jika memang penjual merupakan keturunan, maka dapat dibuktikan mengapa tanah leluhur dijual seperti 'tanah pribadi' tanpa disertai dengan pernyataan dari ahli waris-waris lainnya yang masing hidup atau keturunan ahli waris yang sudah meninggal dunia. Hukum positif yang berlaku mensyaratkan jika tanah warisan akan dijual harus ada surat persetujuan dari ahli-ahli waris karena dikhawatirkan akan terjadi gugat-menggugat dari ahli waris lainnya setelah tanah tersebut ditempati oleh pihak pembeli.

Selain itu harus dilakukan klarifikasi dan pelurusan terhadap berbagai surat dan dokumen resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Surat asli tapi palsu tersebut digunakan oleh pelaku perambah sebagai pegangan untuk tetap mempertahankan lahan rambahan tersebut, meskipun secara nyata dan jelas terlihat di lapangan bahwa lahan tersebut terletak di dalam kawasan TNRAW dan seharusnya tidak memiliki dokumen negara lain.

#### c. Penyelidikan Atas Kasus-Kasus Pemalsuan Dokumen dan Tindak Kriminal

Apabila dalam kasus-kasus penjualan tanah dengan dokumen yang seadanya atau ada dokumen palsu atau asli tapi palsu, maka aparat penegak hukum dapat mengenakan sanksi pidana karena hal tersebut dipandang sebagai tindakan kriminal yang diatur sanksinya dalam KUHP.

Penegakkan hukum seperti ini sangat dinanti-nantikan oleh semua pihak sehingga akan membuat jera bagi orang yang akan membeli tanah dan penjual tanah agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi penjualan tanah.

Mestinya pihak pembeli curiga jika ada orang yang menjual lahan dengan luasan yang cukup besar (100-150 ha) dengan harga yang sangat murah. Hal ini menandakan bahwa penjual tanah telah melakukan penipuan.

Peraturan dalam transaksi jual beli tanah hendaknya harus dicek terlebih dahulu di tingkat kecamatan, apakah betul tanah tersebut adalah milik penjual atau kemungkinan penjual hanya mengaku-ngkau bahwa lahan tersebut adalah miliknya. Jika kecamatan melakukan kesalahan dengan memberikan surat kepemilikan lahan kepada orang yang memang tidak berhak, maka aparat penegak hukum dapat memproses Camat tersebut sebagai terdakwa karena membuat surat keterangan palsu yang dapat merugikan orang lain.

#### d. Penyidikan/Pemeriksaan Atas Kasus Penyerobotan Lahan

Jika memungkinkan dalam pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dapat saja ditingkatkan ketahap penyidikan sehingga akan mempercepat kerja Tim dalam mengajukan proses hukum bagi pihak yang terlibat.

Keterangan dari para pihak yang memberatkan tersangka dapat juga ditindak lanjuti sebagai keterangan saksi-saksi sehingga dapat dijadikan alat bukti hukum untuk membawa tersangka menjadi terdakwa di tingkat pengadilan.

Proses hukum tersebut hendaknya harus segera dan cepat dilaksanakan agar penyelesaian kasus penyerobotan lahan dapat segera ditangani dan tidak timbul kesan bahwa aparat hukum sengaja memancing diair keruh atau mencari kesempatan dalam kesempatan.

#### e. Sosialisasi Hasil Kerja Tim

Sosialisasi hasil kerja tim harus diumumkan kepada publik karena tim telah bekerja secara profesional dan netral dalam rangka menemukan fakta-fakta hukum dan kebenaran dalam kasus sengketa lahan atau kawasan hutan.

Sosialisasi hasil kerja tim dapat dipandang sebagai perwujudan dari tanggung jawab publik (*public accountability*) sehingga hal tersebut dapat menjadi pelajaran (*lesson learned*) bagi tim-tim lain yang ditunjuk sebagai tim penyelesaian kasus-kasus konflik lahan di daerah. Kemungkinan besar hasil kerja tim ini akan dapat diadopsi bagi daerah-daerah lain yang mempunyai tipe dan karakteristik konflik lahan yang sama.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam penanganan masalah perambahan di kawasan TNRAW, pihak pemerintah daerah diharapkan dapat bersikap lebih proaktif dengan melakukan relokasi petani perambah secara tuntas dan menyediakan lahan pengganti bagi perambah. Agar petani perambah yang telah direlokasi keluar dari kawasan TNRAW tidak kembali lagi ke dalam kawasan TNRAW, maka lahan pengganti tersebut diharapkan merupakan lahan yang layak bagi kegiatan pertanian dan perkebunan serta dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang direlokasi karena mayoritas perambah memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pekebun.

### 3. Peningkatan pengelolaan TNRAW

Penanganan masalah perambahan hutan yang tidak kunjung selesai dan kelihatannya malah bertambah luas, maka hal ini memerlukan perhatian yang sangat khusus dan serius dari pihak pengelola TNRAW apabila ingin keutuhan kawasan TNRAW dipertahankan. Dalam hal ini pihak pengelola TNRAW diharapkan tidak hanya melakukan aksi keluar (eksternal) seperti penyuluhan dan pendidikan terhadap kader-kader konservasi, tetapi juga melakukan pembenahan ke dalam (internal) pengelola.

Faktor-faktor yang dapat dipandang sebagai titik lemah dari pihak pengelola selama ini sehingga terjadi peningkatan perambahan yang tergolong cukup pesat adalah kurangnya pemantauan terhadap seluruh wilayah kawasan TNRAW. Hal ini menuntut manajemen sistem informasi yang kuat sehingga tersedia data yang akurat dan *up to date* mengenai berbagai gangguan terhadap kawasan TNRAW. Kurangnya tenaga yang tersedia untuk menangani kawasan per satuan luas kawasan merupakan faktor utama yang menyebabkan masih minimnya pengawasan terhadap seluruh wilayah yang ada. Untuk itu instansi vertikal yang berada di atas Balai TNRAW dalam hal ini Departemen Kehutanan perlu memikirkan alternatif jalan keluarnya, yang antara lain dapat ditempuh melalui penambahan jumlah tenaga yang disertai dengan pemekaran wilayah unit pengelolaan sehingga setiap unit pengelola hanya menangani wilayah yang luasnya lebih kecil tetapi intensif dan konsisten dalam satu kesatuan utuh untuk menghindari fragmentasi hutan menjadi luasan yang lebih kecil. Selain itu sangat perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pengelolaan seperti penyediaan sarana patroli yang memadai, juga pemeliharaan dan perbaikan serta pembangunan kembali pal batas yang hilang.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

TNRAW adalah kawasan pelestarian alam seluas 105.194 ha yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentang di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana.

TNRAW memiliki 5 tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan rendah, savana, rawa, dan mangrove, dan obyek dan daya tarik wisata berupa muara Lanowulu, savana Lanowulu-Langkowala, rawa Aopa, gunung Watumohai, dan air terjun.

Pengelolaan TNRAW belum sepenuhnya efektif, karena terbatasnya jumlah dan kualitas SDM per satuan luas kawasan yang dikelolanya, kekurangan pembiayaan dan sarana prasarana pendukung. Permasalahan utama dalam pengelola TNRAW adalah perambahan yang luasnya telah mencapai sepersepuluh dari total kawasan yang dimilikinya.

Penjual lahan umumnya adalah penduduk asli yang mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat/warisan dari nenek moyangnya, sedangkan pembeli merupakan pelaku perambahan yang mengaku pemilik lahan sah setelah membeli lahan adat tersebut.

Kedudukan proses jual beli lahan di kawasan TNRAW lemah dari sisi hukum atau cacat hukum karena (i) tidak ada alat bukti pembayaran, (ii) tidak memiliki bukti ilmiah tentang kebangsawanan di wilayah TNRAW, (iii) tidak ada akta waris, dan (iv) tidak memiliki akta jual beli tanah.

Strategi penyelesaian konflik perambahan hutan di kawasan TNRAW dapat diselesaikan dengan cara: (a) pemberdayaan masyarakat, (b) penanganan terhadap jual beli lahan di kawasan TNRAW, (3) peningkatan efektivitas pengelolaan TNRAW.

Penanganan terhadap jual beli lahan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya (i) tatap muka dengan masyarakat perambah dan penjual lahan, (ii) meneliti dan klarifikasi surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan, (iii) penyelidikan atas kasus-kasus pemalsuan dan tindak kriminal, (iv) penyidikan/pemeriksaan atas kasus penyerobotan lahan, dan (v) sosialisasi hasil kerja tim kepada masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum.

### B. Saran

Balai TNRAW dan Pemda Kabupaten terkait perlu melaksanakan pola-pola pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan TNRAW sebagai upaya mencari alternatif penghasilan untuk mereduksi penghasilan-penghasilan dari penjualan lahan-lahan ilegal.

Perlunya penegakan hukum yang konsisten dan terus menerus oleh aparat penegak hukum sebagai upaya perlindungan kawasan TNRAW dari para pelaku yang mengkomersialisai lahan-lahan yang ada di TN tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymus, 1994. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepariwisata Perum Perhutani, Jakarta.
- Riyanto, B. 2004. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam: Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap Debt for Nature Swaps. Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- Subarudi, 2001. Upaya Penyelamatan Taman Nasional Kutai. Info Sosial Ekonomi Volume 2 Nomor 1, Tahun 2001. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan, Bogor.
- Tepu, M. 2004. Mengungkap Pesona Wisata Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Majalah Surili Vol. 30/No. 1/Maret 2004. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- Unit Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, 2000. Rencana Karya Lima Tahun Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

## INDEX PENGARANG

### A

Asep, H. "Analisis Pemungutan Rotan pada Dua Kelompok Masyarakat Pemungut". 3 (2) Juni 2006: 91 - 107.

### B

Bakhdal. "Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Hutan Lindung di Pasaman, Sumatera Barat". 3 (3) September 2006: 161 - 174.

### E

Epi, S. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan di Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP)". Maret 2006: 17 - 40.

Epi, S. "Kajian Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Rakyat sebagai Dasar Acuan Pemanfaatan Hutan Rakyat". 3 (1) Maret 2006: 75 - 90.

Epi, S. "Analisa Strategi Pengelolaan Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) untuk Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Hutan". 3 (2) Juni 2006: 117 - 132.

### F

Fitri, N. "Konsep Nilai Ekonomi Total dan Metode Penilaian Sumberdaya Hutan". 3 (1) Maret 2006: 1 - 16.

### K

Kirsfianti, G. "Nilai Ekonomi Air di Sub DAS Konto dan Sub DAS Cirasea". 3 (1) Maret 2006: 41 - 60.

### M

Mamat, R. "Ketergantungan Masyarakat terhadap Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Pasca Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Terpadu". 3 (3) September 2006: 191 - 204.

### N

Nur Arifatul. "Analisis Peranan Sektor Kehutanan Dalam Perekonomian Indonesia : Sebuah Pendekatan Model Infut-Output". 3 (1) Maret 2006 : 61 - 74.

Nur Arifatul. "Analisis Dampak beberapa Hutan di Indonesia terhadap Distribusi Pendapatan Masyarakat". 3 (2) Juni 2006: 133 - 146.

### S

S. Andi Cahyono. "Faktor Penentu Kemiskinan Petani Penyadap Getah Pinus di Desa Somagede, Kebumen, Jawa Tengah". 3 (2) Juni 2006: 109 - 116.

S. Andi Cahyono. "Karakteristik Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Penyadap Getah Pinus di Desa Somagede, Kebumen, Jawa Tengah". 3 (2) Juni 2006: 147 - 159.

Sulistya, E. “Kearifan Lokal Petani Dalam Merehabilitasi Lahan Kritis (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Pratuwarno, Kabupaten Wonogiri”. 3 (3) September 2006: 207 -216.

Subarudi. “Perambahan Hutan di Taman Nasional Rawa Aopa, Watomuhai : Sebuah Pendekatan Sosiologis”. 3 (3) September 2006: 215 - 229.

## Y

Yanto, R. “Analisis Partisipasi pada Program Hutan Kemasyarakatan (Studi di Koto Panjang, Riau)”. 3 (3) September 2006: 175 - 189.

## **Petunjuk Bagi Penulis**

**BAHASA :** Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.

**FORMAT :** Naskah diketik diatas kertas A4 putih dengan huruf Times New Roman 12 pt dengan 2 spasi. Pada semua tepi kertas disisakan ruang kosong minimal 3,5 cm.

**JUDUL :** Judul dibuat tidak lebih 2 baris (max 10 kata) dan harus mencerminkan isi tulisan. Judul diketik dalam huruf capital dengan font 14 pt. Nama penulis dicantumkan di bawah judul.

**ABSTRAK :** Abstrak dibuat tidak lebih dari 200 kata berupa intisari permasalahan secara menyeluruh, bersifat informatif mengenai hasil yang dicapai, menggunakan huruf Times New Roman 10 pt, 1 spasi, dalam 1 paragraph.

**KATA KUNCI :** Kata kunci dicantumkan di bawah abstrak tidak lebih dari 5 istilah.

**URAIAN ISI :** Diatur dalam Bab dan Sub Bab sesuai dengan kebutuhan dan ditulis berdasarkan ketentuan pembaban sebagai berikut :

- I, II, III, dan seterusnya : Bab
- A, B, C, dan seterusnya : Sub Bab
- 1, 2, 3, dan seterusnya : Sub sub Bab
- a, b, c, dan seterusnya : Sub sub sub Bab
- 1), 2), 3), dan seterusnya : Sub sub sub sub Bab
- a), b), c) dan seterusnya : Sub sub sub sub sub Bab
- (1), (2), (3), dan seterusnya : Sub sub sub sub sub sub Bab
- (a), (b), (c), dan seterusnya : Sub sub sub sub sub sub sub Bab

Semua nomor ini ditulis rata dibatas kiri tulisan.

**TABEL :** Judul Tabel dan Keterangan yang diperlukan ditulis dengan jelas dan singkat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tabel harus diberi nomor. Penggunaan tanda titik (.) dan spacebar pada angka di dalam tabel masing-masing menunjukkan nilai pecahan/ desimal dan kebulatan seribu.

**GAMBAR :** Grafik dan ilustrasi lain yang berupa gambar garis harus kontras dan dibuat dengan tinta hitam. Setiap gambar garis harus diberi nomor, judul dan keterangan yang jelas dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

**FOTO :** Foto harus mempunyai ketajaman yang baik, diberi judul dan keterangan seperti pada gambar.

**DAFTAR PUSTAKA :** Daftar Pustaka yang dirujuk harus disusun menurut abjad nama pengarang dengan mencantumkan tahun penerbitan.

Contoh Penulisan Pustaka :

Shapiro, E. 2000. Macroeconomic Analysis, Fifth Edition, Galgotia Publications, New Delhi, 16, 351-363.

ISSN 1829-8109



9 771829 810996